

**B C**

# PERLAWANAN IDENTITAS

(Studi Terhadap Strategi Pembinaan Kader dan Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menghadapi Modernisasi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur)

**SKRIPSI**

Fis 502/07

07

0



Disusun Oleh :

**TRIONO WAHYU SANTOSO**

NIM. 070116517

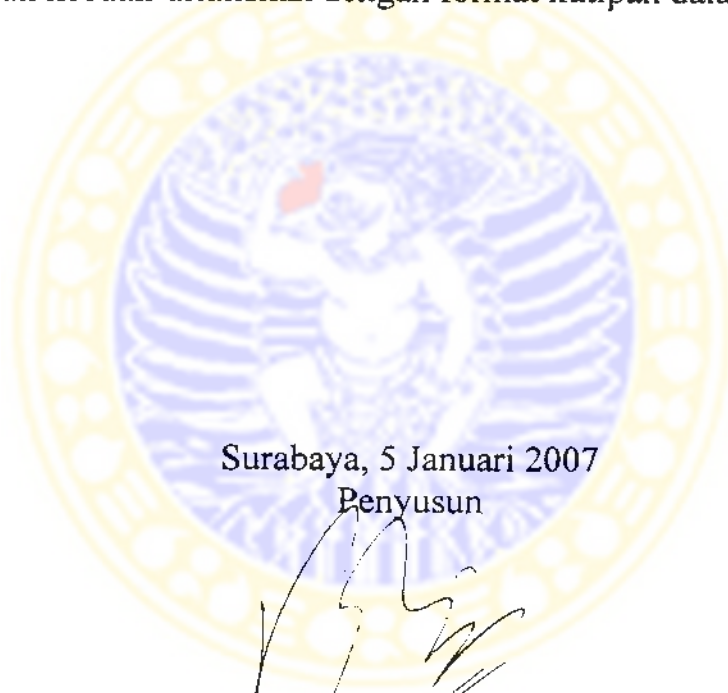
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Semester Gasal 2006/2007**



## **Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat**

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.



Surabaya, 5 Januari 2007  
Penyusun

TRIONO WAHYU SANTOSO  
NIM. 070116517

## **PERLAWANAN IDENTITAS**

( Studi Terhadap Strategi Pembinaan Kader dan Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menghadapi Modernisasi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur )

### **Skripsi**

Maksud : sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

*Disusun Oleh :*

**TRIONO WAHYU SANTOSO**

**NIM. 070116517**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Semester Gasal 2006/2007**

## Persembahan

Sabarlah wahai saudaraku tuk menanggapi cita  
Jalan yang kau tempuh sangat payung tak sekedar batu karang  
Yakinlah wahai saudaraku kemegahan kan menjelang  
Walau kita tak mendapati masanya  
Tetaplah Al Haq pasti menang  
Tanam di hati benih iman sehati  
Berpada dengan jiwa robani  
Tempa jasadmu jadi pahlawana sehati  
Tuk tegakkan kalimat illahi  
Pancang tekatmu, jangan mudah mengeluh  
Pastikan azzammu semakin meninggi  
Kejayaan Islam bukan sekedar mimpi  
Namun janji Allah yang akan pasti

IZZATUL ISLAM

**Saking Manah Kulo...**

**Kagem Ibu lan Bapak**

"Alhamdulillah, dalem sak meniko sampun lulus, ngapunten menawi lulusipun telat lan ngrepoti panjenengan. Nyuwun pandongonipun, engkang putro saget dados tiyang engkang miguno kagem agama kados menopo engkang Ibu kalian Bapak kersaaken,"

**Gawe kang mas Arief ( mbak Eka ) lan kang mas Sigit (mbak..)**

"akhire wahyu lulus mas. Suwun gawe sembarangane sing wis diwenehno gawe Ade'mu sing nduablek iki"  
(Jazzakumullah atas jalan yang antum berdua tunjukkan pada Ade' mu ini. Ade' tidak pernah berpikir akan berada dalam lingkungan orang-orang yang berusaha sholeh. Semoga kita bertiga tetap istiqomah berada dijalan ini)

**To Salman Farisi Fahmi Arief ( Isal )**

**My Inspiration...!!**

Cepat besar le!, kalo sudah besar jadi anak sholeh, Dien ini telah menanti pengorbanaanmu.

**Uhibbukum fillah!**

**Ikhwah 4 x 4 m** (opo wis diambakne?)

Irwan Setiawan..jazzakumullah atas kesabarannya membina ane..afl karena belum pernah membuat antum bangga..Insyallah suatu hari, Pak!!...

Akhire naik jenjang jadi anggota muda rek! Arwan [antum dhisik..i terus Akh!..Lu2s dhisik e..nikahe dhisik] Yudho [Akhire lu2s bareng Akh! Nek sido pindah yo ojo karo Pindy!] Ikak [ndang lu2s ben ra dipecat, opo nikah dhisik ae?] Anas [La tha'zan ya Akhi, innaallaha ma anna. Perjuangan serta cita2 antum masih panjang Akh!]

**Old Ikhwah's FISIP**

Mas Teguh [dateng pundi mas?], Mas Agus [suwun support e], Mas Yudi [Gunnars the loser!], Abah Sadin [jangan jadi bandot tua!..], Aa' Arif [my bos forefer..], Bang Novi [sudah saatnya MU juara!], Mas Hendra [ndang bali o mas!], Mas Bagoes [4 tahun..akhiri pisah, Jazzakumulloh], Bos Andri [ojo sampek ngilang, Bos!], Bang Tjahjo [Al Ustate AL muka'..rom Al Nglimbang-nglimbung], Mas Aris [mie man..], Ismanto [Tetep anti kemapanan], Buwono [ndang dimarekno, ojo diangen2 tok] and All Mbak2 serta Ukhti2 seperjuangan, jazzakumullah!!

**Young Ikhwah's FISIP**

Priyo [bersama sampai akhir!], Dimas [cepat lulus pak Wapres], Arifin [antum dhisik Akh], Yazid [sido bali Nganjuk?], Heri [selamatkan sosiologi!], Doddy [cah Nganjuk yo mbalek Ngajuk], Heru [suwun rewangane Akh], Ansory [tak tunggu Jihadmu!], Sonto [...huaaaak..], Yusuf, Dadang, Zamrony, Kurniawan and AL Quds crew.

**Ikhwah Kampus Baru**

Nasrul, Kak Budi, Aferu, Gus Ulil, Aas, Sunu [jazzakumullah atas komputernya], Khoirul, Adi, Sony, Pak T, Sahrony, Fierza, Totok, Ukak, Ginta, dll Jazzakumulloh atas kebersamaannya,  
[Coz We Care]

**Ikhwah DPW PKS Jawa Timur**

Ust. Habib dan Mas Umar [jazzakumullah atas waktu yang diberikan untuk wawancara]. Semoga apa yang menjadi idealisme kita tidak hanya berhenti pada takaran mimpi. Semoga Allah memberi kesabaran buat antum semua untuk mewujudkan cita2 perjuangan kita semua

**KAMMI komsat Airlangga**

Dibyoy, Anwar, Rohaye, Rizki dll jazzakumullah  
**SOSIS crew**

Setetes keringat kita akan menjadi saksi perjuangan [af1 ane lu2s paling belakang...semoga cepet2 jadi ummahat..jangan lupa undangannya...]

**Sosiologi 2001**

[1] Ratih, Eka mey, Ivana. [2] Dian -Papi-, Dian R, Munuk, Petty, Ningsih, Iis, Cicil, Ayu. [3] Arwan, Anang, Adi, Dinar, Icha, Febri, Lutfi, Arie, Ana, Nur, Intan, Anita, Ani, Nike. [4] Awak dewe', Aries, Ahmad, Firdiah, Cinthia, Mia. [Terakhir] Nurul, Eko, Aang, Putra, Ringga, Matu, Fahrizal. Terima kasih atas kebersamaannya.

**Konco Anyar**

Mas Dino [Mitra motor] and Imam-mie, suwun  
**Jo2ran 48**

Bu Mar, Emak, Mauludi, Rahmad, Ihyak, Sigit [ndeso], Sigit, Wawan, Edi, Wahyu cilik, Anang, Edi, Fuad, Hendry, Salim, Robitoh, Rilla, Sandy, Mamad, Pak Awie, Alif, Mas Widya terima kasih

**dHop Collection**

Mc. Bow yang selalu menjadi partner sejati [insyaallah iso konsentrasi total], Mas Ammar [di dHop aja mas, biar kita sering berkumpul lagi untuk kejayaan dHop], Kenanga Offset: Om Okta, Om Pink, Om [Haji] Venus, Pak Ri [cah geger], Pak Alex, Mas Yoyok [kapan mas?], Mandra, dll terima kasih

**Geng Smuntan**

Syeikh Catur, Kyai Pendik, Ramang, Mas Miko, Jito [dadi guru ojo moletan], Gogot, [mama]Ike, Ellis, Ratna, Rana, Chusnul[nunik], Ukthi Indah dll suwun.

Terakhir buat seseorang entah siapa dan dimana sekarang dia berada, tapi saya merasa harus mengucapkan terima kasih atas doa2 yang tidak pernah putus serta kesabarannya untuk menanti. Jika Allah mengijinkan, semoga kita dipertemukan untuk bersama-sama meniti jalanNya.

Perjuangan ini baru memulai babak baru, semoga kita di beri keIstiqomahan. Allahu Akbar

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah mendapatkan persyaratan dan disetujui untuk  
diujikan



Surabaya, 19 Desember 2006  
Dosen Pembimbing

Drs. Sudarso. M, Si.  
NIP. 132014462

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan penguji pada tanggal 5 Januari 2007





## Abstraksi

Dalam penelitian ini membahas tentang strategi pembinaan dan kebijakan politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi arus modernisasi. Sistem politik demokrasi menjadi gambaran identitas baru yang dibawa oleh arus modernisasi. Dengan menjelaskan latar belakang historis modernisasi yang terjadi di Eropa memberikan gambaran tentang realitas sosial yang terjadi di Eropa pada saat modernisasi terjadi.

Penelitian ini menggunakan pisau analisa berupa teori Modernisasi (kalsik dan Modern), Teori Identitas, Gerakan Kebangkitan dan Partai Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan secara Purposive dengan informan kunci dua orang yaitu; Ust. Shmad Habibul Muiz yang merupakan Ketua Bidang Pembinaan Kader (BPK) Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur dan Umar Sholahudin yang merupakan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Dengan wawancara secara langsung data kemudian di analisa secara kualitatif dengan tambahan data-data yang berbentuk dokumen.

Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, pertama Gerakan-gerakan Islam tubuh dan berkembang seiring arus modernisasi yang membuka kebebasan berekspresi bagi setiap manusia, kedua selain adanya peluang untuk mengaktualisasikan diri, gerakan-gerakan tersebut juga menghadapi nilai-nilai identitas baru yang bertentangan terhadap nilai-nilai identitas yang dianutnya.

Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera yang lahir dari proses modernisasi berusaha untuk berinteraksi dengan nilai-nilai identitas baru yang dibawa modernisasi tersebut dengan menekankan pada aspek pembinaan kader dan strategi politik yang berkaitan dengan syariat Islam.

## PENGANTAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan fenomena partai politik baru yang banyak menarik perhatian para peneliti. Mereka mencoba menganalisa fenomena PKS dari berbagai disiplin ilmu –khususnya ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada aspek pembinaan dan strategi politik PKS –berkaitan dengan penerapan syariat Islam sebagai “*senjata*” dalam mempertahankan identitasnya melawan arus modernisasi.

Indonesia sebagai negara dunia ketiga tidak dapat melepaskan diri dari arus modernisasi tersebut. Identitas – identitas baru yang sebelumnya tidak dikenal mampu mempengaruhi kondisi masyarakat di Indonesia. Demikian halnya dengan identitas keagamaan yang ada khususnya Islam. Mereka bergerak pada takaran pendidikan serta pelayanan yang bersifat persuasif terhadap pemerintah, sampai bergerak pada takaran politik praktis yang berorientasikan perubahan dasar negara –penerapan syariat Islam.

PKS memilih strategi untuk masuk dalam sistem yang ada di Indonesia. PKS mengambil kebijakan untuk aktif dalam Pemilu guna meminimalisir konflik dengan penguasa serta jalan untuk mencapai tujuan gerakan. Mereka menawarkan alternatif politik baru yang bersifat melayani dan bukan untuk mencapai kekuasaan semata. Tawaran-tawaran politik baru yang mampu menarik massa, sehingga menempatkan PKS menjadi *rising star* pada pemilu 2004.

PKS menekankan pada aspek pembinaan kader yang terstruktur dan berkelanjutan. Penekanan akan nilai-nilai keIslam dalam aktifitas sehari-hari kader menjadi hal mutlak yang dilakukan oleh setiap kader PKS. Dengan basis kader yang kuat PKS mampu menjaga identitas agar selalu tepat pada garis

tujuannya. Sebagai partai politik Islam, PKS tidak bisa dilepaskan pada tujuan penegakan syariat Islam. PKS menawarkan penerapan syariat Islam yang berkeadilan yang mampu diterima oleh orang Islam, orang non Islam, kelompok kepercayaan sampai orang-orang yang tidak menganggap adanya tuhan, Islam substansional bukan hanya Islam formal.

Akhirnya peneliti hanya mampu mengucapkan terima kasih pada; (a) Bpk. Drs. Soedarso M.Si yang berkenan membimbing peneliti sehingga mampu menyelesaikan tepat waktu -*"yang penting bisa mempertanggung jawabkan, Yu!"*-, (b) Bpk. Drs. Doddy S. Singgih M.Si sebagai dosen wali selama 11 semester -*"Sekarang Yon sudah lulus ,Pak!"*- (c) Bpk. Drs. Herwanto MA dan Bpk. Karnaji S,sos M.Si yang berkenan menjadi tim penguji -*"ternyata kita sidang cuman 1 jam ,Pak"*- (d) Bpk. Drs. Dwi Narwoko, MA yang telah meluluskan tahap-tahap awal penelitian ini meskipun sudah 4 semester berubah terus -*"terima kasih karena sudah di pindah dosen pembimbingnya"*- (e) Bpk. Dr. Musta'in Mashud atas "perdebatan" selama 2 semester -*"maaf Pak, saya terpaksa pindah biar cepat lulus"*- (f) Bpk. Novri Susan S,sos yang selalu mendorong dan memberi masukan dari awal untuk menyelesaikan penelitian ini -*"maaf Pak(Mas), ane tidak bisa mewujudkan impian antum, ane memang gagal menjadi seorang Sosiolog tapi ane tidak ingin gagal menjadi manusia"*- (g) dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, semoga amalan kita menjadi amal yang produktif yang mampu memberikan solusi baik secara akademis maupun praktis.

**Luko Maruto, 17 Januari 2007 / 27 Dzulhijah 1427 H**

Triono Wahyu Santoso

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Dalam 1	i
Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	ii
Halaman Judul Dalam 2	iii
Halaman Persembahan	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Abstraksi	vii
Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Rumusan Masalah	6
I. 3. Tujuan Penelitian	6
I. 4. Manfaat Penelitian	7
I. 5. Kerangka Teoritik	
a. Teori Modernisasi	
a. 1. Teori Modernisasi Klasik	7
a. 2. Modernisasi Anthony Giddens	9
b. Identitas	
b. 1. Identitas Manusia	11
b. 2. Bentuk Perlawanan Identitas	15
c. Gerakan Kebangkitan (Revivalis) Islam	
c. 1. Sebab-sebab kemunculan gerakan kebangkitan Islam	16
c. 2. Bentuk-bentuk Kebangkitan	18
c. 3. Prinsip-prinsip Revivalis	19
d. Partai politik	
d. 1. Fungsi Partai Politik	21
II. Metode Penelitian	
II. 1. Metode Penelitian	30
II. 2. Obyek dan Lingkup Penelitian	31
II. 3. Unit Analisa	32
II. Teknik Pengumpulan Data	33
II. Analisis Data	33
<b>BAB II. MODERNISASI, SEJARAH DAN IDENTITASNYA</b>	
A. Mendefinisikan (keembali) Modernisasi	34
B. Sejarah Modernisasi di Eropa	40
C. Identitas Masyarakat Eropa	46
D. Globalisasi Sebagai Sarana Transformasi Nilai	51
E. Modernisasi di Negara-negara Ketiga	54

<b>BAB III. IDENTITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM SEJARAH INDONESIA</b>	
A. Identitas Islam dalam Sejarah Indonesia	60
B. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera	70
C. TARBIYAH sebagai Penyokong Kegiatan	81
D. Ikhwanul Muslimin dan Pengaruh Pergerakannya	86
<b>BAB IV. PERLAWANAN IDENTITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	
A. Pengantar	92
B. Manifesto Identitas Islam Politik Baru di Indonesia	93
C. Pembentukan Identitas KAdler	
C. 1. Proses Pembinaan	98
C. 2. Identitas Kader Partai Keadilan Sejahtera	107
D. Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera	
D. 1. Politik Dakwah	111
D. 2. Syariat Islam yang ber-Keadilan	115
<b>BAB. V. KESIMPULAN</b>	
Kesimpulan	122
Saran	123
Daftar Pustaka	125
Lampiran - lampiran	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. 1. Latar Belakang

Dalam Pemilu era multi partai, fenomena identitas keagamaan sudah menjadi fenomena tersendiri. Pada pemilu pertama, tahun 1955, partai yang kental dengan identitas keislamannya diantaranya Masyumi, NU, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan beberapa partai kecil lainnya. Di kalangan partai non Islam diantaranya PARKINDO ( Partai Kristen Indonesia ) dan Partai Katolik. Kemudian diteruskan pada Pemilu kedua, tahun 1971, dimana jumlah partai mulai berkurang dan hanya tinggal 10 partai. Pada saat Orde Baru berkuasa, perombakan besar-besaran terjadi. Kontestan pemilu dipangkas habis menjadi hanya 3 organisasi peserta pemilu (OPP), yaitu Golkar –yang tidak mau disebut sebagai partai politik- yang terdiri dari partai-partai beraliran nasionalis seperti PNI, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terdiri dari kelompok-kelompok marheanisme. Sedangkan Partai-partai yang beraliran Islam seperti NU dan Masyumi ber*Fusi* menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fase difusi partai-partai politik itu diawali dengan adanya “Konsensus Nasional” yang kemudian ditandai oleh penggunaan asas tunggal, yaitu Pancasila, sebagai ideologi dan asas partai.

Pada era reformasi yang telah dua kali melaksanakan Pemilu yaitu tahun 1999 dan 2004, adanya keterbukaan akan sistem kepartaian menyebabkan era Pemilu multi partai kembali terjadi . Pada Pemilu 2004, partai-partai dengan identitas keagamaan muncul kembali, baik yang berasaskan keIslaman seperti

Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera –metafosis dari Partai Keadilan (PK) yang tidak lolos *Electoral Treshold* pada Pemilu 1999, maupun partai-partai berasakan nasionalis dengan basis islam kultural seperti Partai Kebangkitan Bangsa –berbasiskan kaum NU- dan Partai Amanat Nasional –secara cultural dekat dengan Muhammadiyah.

PKS adalah sebuah fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer Indonesia. Ini tidak hanya karena perkembangan partai yang sangat pesat dalam hal keanggotaan dan perolehan suara dalam Pemilu, tetapi juga karena PKS menawarkan pendekatan baru yang berbeda dalam politik Islam dan juga kemampuan mempertahankan identitas keIslamannya yang hampir tidak pernah ada di Indonesia. Partai yang berbasiskan kelompok Islam terpelajar – tumbuh dan berkembang di wilayah kampus- berdiri 20 April 2002 yang merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan ( PK ) pada Pemilu 1999 yang tidak lolos *Electoral Threshold* (ET).

PKS memang partai yang unik. Di saat partai serupa yang mengusung formalisasi agama (baca: islam) di ruang politik tengah mengalami kemerosotan suara, PKS malah sebaliknya. Bahkan PKS, menurut Airlangga Pribadi, mematahkan tesis dominan dalam politik Indonesia yang memprediksikan terjadinya jalan buntu masa depan Islam politik di Indonesia<sup>1</sup>. Menurut Airlangga, diskursus yang dominan di kalangan akademisi melihat Islam politik sebagai sesuatu yang statis, beku dan tidak dinamis. Apalagi bila tesis Liddle tentang pemilahan Islam politik dalam kerangka oposisi biner diametrikal; substansialis-skripturalis, Islam kultural-Islam politik, Inklusivitas-Eksklusivitas,

---

<sup>1</sup> Airlangga Pribadi, PKS: Lintasan Baru Islam Politik, Opini Republika, 10 Juli 2004

digunakan. PKS, bila dilihat dengan kaca mata Liddle tadi, menurut Airlangga, dengan mudah dikategorikan sebagai kelompok eksklusif- skripturalistik.

Akan tetapi dalam kasus ini, Airlangga menilai tidak sesederhana itu. Ia mengatakan:

Namun demikian kategorisasi sederhana yang terbatas tersebut, memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengelaborasi bahwa, walaupun PKS terlibat aktif dalam gemuruh atmosfer politik identitas Islam pasca kepemimpinan Soeharto, hal ini tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera terjebak semata-mata pada pengedepanan agenda politik simbolik, yang berifat eksklusif dan komunalistik (tipikalisasi yang sering dialamatkan oleh kalangan akademisi terhadap kekuatan Islam politik)<sup>2</sup>.

Di bandingkan dengan partai-partai lainnya yang juga berasaskan Islam seperti PPP dan PBB, Partai yang dilatarbelakangi oleh gerakan Tarbiyah ini cenderung kental identitas keagamaannya. PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dan organisasi utamanya dari luar dan menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan. Hal ini bisa dilihat dalam aktifitas kepartaiannya dan simbol-simbol yang digunakan, seperti penggunaan bahasa-bahasa atau kata-kata yang diambil dari bahasa arab dalam program-program kerjanya atau pada penggunaan atribut para kader dan simpatisannya yang menggambarkan identitas keislaman.

Kemampuan mempertahankan identitas keagamaan menjadi aspek lebih yang dimiliki oleh PKS. Yon Machmudi, mengategorikan PKS dalam tipologi Santri Global, dimana memiliki orientasi global dan cenderung menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan Islam di Luar Negeri.. Hal ini diwujudkan dengan Aksi damai yang melibatkan massa dengan skala besar dari para kader dan simpatisan partai mendukung perjuangan rakyat Palestina, Irak, Afghanistan sampai penolakan akan standar ganda Amerika terhadap Israel. Aksi yang terakhir

---

<sup>2</sup> ibid



yang melibatkan ratusan ribu peserta dalam mendukung kemenangan HAMAS serta menentang embargo ekonomi yang digalang Amerika Serikat terhadap Palestina yang diikuti dengan pencanangan program *One Man One Dollar* ( setiap kader diwajibkan memberikan sumbangan sebesar 1 dollar untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina ). Disamping isu-isu internasional, PKS juga eksis menyoroti kebijakan pemerintah dengan cara-cara formal -lewat perwakilan legislatifnya di DPR- disamping melakukan usaha-usaha non formal dengan melakukan aksi-aksi simpatik, seperti wacana Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornografi yang diikuti dengan akan terbitnya majalah Playboy edisi Indonesia yang mengusung kebebasan seks.

Posisi inilah yang menempatkan PKS sebagai kelompok yang mampu memanfaatkan isu Globalisasi dalam menjaga eksistensi mereka Secara historis globalisasi berarti meluasnya pengaruh suatu kebudayaan atau agama ke seluruh penjuru dunia. Namun konsep dan istilah globalisasi yang digunakan semenjak tahun 1990-an, tidak dapat dipahami berdasarkan pengertian tersebut. Sebab, dalam istilah globalisasi saat ini terkandung sejumlah perkembangan terbaru di dunia, yang ditandai oleh sejumlah besar tendensi sosiologis yang amat kuat, yang tidak dikenal dalam masa-masa sebelumnya.

Seorang sosiolog Australia, Malcolm Waters pada tahun 1995 dalam bukunya "Globalisasi", mendefisikan globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial-budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Anthony Giddens mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi dari dunia lua relasi social yang

menghubungkan jarak local seperti sebuah jalan dari kejadian local terbentuk oleh even yang terjadi beberapa mil jauhnya dan sebliknya ( Giddens,1990 ). Giddens melihat proses tersebut sebaga pelibatan 'destinasi ruang-waktu', yang mana interaksi semakin erat melewati ruang sehingga orang tidak lagi harus hadir secara fisik untuk berinteraksi dengan yang lain.

Bentuk-bentuk globalisasi dampat dilihat pada aspek-aspek social masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pengaruh globalissi tampak pada pembukaan pasar bebas, berdirinya lembaga-lembaga keuangan dan perekonomian dunia – IMF, WTO-, berkembangnya perusahaan multinasional seperti Mc Donal, industri-industri Otomotif di Negara-negara berkembang, di bidang politik standarnisasi Demokrasi global yang dipakai sebagai system politik dunia . Di bidang media komunikasi yang ditandai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang amat pesat. Berkat penelitian di bidang elektromagnetik, berturut-turut orang menciptakan telegraf, telepon, radio, kemudian televise sampai pada alat komunkasi tanpa batas lewat teknologi Internet, serta isu-isu lain seperti penegakan HAM, lingkungan hidup dan persetaraan Gender.

Berubahnya aspek-aspek sosial tersebut memberikan perubahan pada identitas social masyarakat,. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut harus mampu beradaptasi dengan dampak – dampak globalisasi. Dalam proses adaptasi, identitas-identitas dalam kelompok tersebut mengalami pergeseran-pergeseran dari identitas dasarnya. Inilah yang membawa kelompok-kelompok tersebut kearah identitas baru yang tentunya membawa konflik internal. Tetapi kelompok-

kelompok lain ada yang mampu beradaptasi dengan dampak dari globalisasi dengan tetap mempertahankan identitasnya.

Perkembangan globalisasi yang didorong oleh modernitas dengan membawa nilai-nilai baru akan mengalami perlawanan dari kelompok-kelompok identitas local –seperti etnis, budaya sampai agama- yang sudah lama berkembang. Kelompok-kelompok identitas tersebut akan berusaha mempertahankan eksistnsinya tidak hanya dengan menguatkan kondisi internal mereka, tetapi akan mencoba mencari simpati dari individu-individu diluar kelompok mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk mencoba membentuk lembaga formal yang diakui public dan bersifat terbuka seperti organisasi-organisasi swadaya masyarakat termasuk didalamnya Partai Politik Islam –termasuk Partai Keadilan Sejahtera yang kental dengan identitas keIslamannya. Menarik untuk menganalisa kelompok-kelompok identitas –disini Partai Keadilan Sejahtera dalam usahanya mempertahankan identitas dari tantangan Modernitas yang dibawa oleh Globalisasi.

## **I. 2. RUMUSAN MASALAH**

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan, Pertama, modernisasi merupakan wacana global yang di dorong proses Globalisasi yang harus diterima oleh semua negara, kedua, modernisasi membawa nilai-nilai baru yang ditimbulkan dari proses penerapannya, ketiga nilai-nilai baru tersebut mempengaruhi nilai-nilai yang telah ada pada kelompok-kelompok identitas dalam masyarakat dan yang keempat, kelompok-kelompok identitas dalam masyarakat harus mampu beradaptasi terhadap dampak modernitas tanpa menghilangkan nilai-nilai

identitasnya, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan penelitian. *Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mempertahankan identitas keagamaannya dalam menghadapi modernisasi?*

### **I. 3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah modernisasi serta nilai-nilainya
2. Untuk mengetahui cara – cara yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan identitasnya terhadap modernisasi khususnya dalam bidang pembinaan serta kebijakan politiknya

### **I. 4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Mengetahui perkembangan gerakan-gerakan Islam di Indonesia
2. Memberikan gambaran umum tentang identitas keagamaan dalam Partai Keadilan Sejahtera.

### **I. 5. KERANGKA TEORITIK**

#### **a. Teori Modernisasi**

##### **a. 1. Teori Modernisasi Klasik**

Analisa terhadap modernisasi sudah diawali oleh empat teoritikus klasik besar Sosiologi yaitu Karl Marx, Marx Weber, Emile Durkheim dan George Simmel. Karl Marx menganggap modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalis. Marx mengakui kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi dari masyarakat sebelumnya ke masyarakat Kapitalisme<sup>3</sup>. Marx Weber melihat masalah

---

<sup>3</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern –edisi Keenam-*, Jakarta. Prenada Media. 2003

kehidupan modern yang paling menentukan adalah perkembangan rasionalitas formal dengan mengorbankan tipe rasionalitas lain dan mengakibatkan munculnya kerangkeng-besi rasionalitas<sup>4</sup>. Weber melihat pengaruh dari Birokrasi-birokrasi yang semakin kuat dari sebelumnya daripada bentuk-bentuk organisasi yang telah ada sebelumnya.

Emile Durkheim lebih melihat adanya Solidaritas organik yang menentukan modernisasi yang kemudian menimbulkan pelemahan pada kesadaran kolektif<sup>5</sup>. Kebebasan yang lebih besar dan produktivitas yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh solidaritas organik akan menimbulkan berbagai masalah, seperti melemahnya moralitas bersama, orang yang cenderung merasa dirinya lemah tak bermakna dalam kehidupan modern (*Anomi*).

Sementara Simmel digambarkan sebagai "sosiolog pertama modernitas", hal ini digambarkan Frisby yang melihat bahwa Simmel menghubungkan dua sisi utama yang saling berhubungan –kota dan ekonomi uang. Kota merupakan tempat modernisasi dipusatkan atau diintensifkan, sedangkan ekonomi uang menyebabkan penyebaran modernisasi dan perluasannya (Frisby, 1992:69)<sup>6</sup>. Sementara Poggi mengambil tema modernisasi yang berkaitan dengan uang dari pemikiran Simmel. Poggi melihat ada tiga pandangan dalam karya Simmel menyangkut modernisasi, Pertama; bahwa modernisasi memberikan keuntungan bagi umat manusia, terutama fakta bahwa melalui modernisasi mampu mengungkapkan berbagai potensi yang belum terungkap, tersembunyi dan yang tertekan dalam masyarakat pramodern .

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

Kedua, Simmel menguraikan besarnya pengaruh uang terhadap masyarakat modern dan Ketiga; Simmel memusatkan perhatian pada upaya menjelaskan akibat merugikan dari uang terhadap modernisasi, terutama alienasi. Masalah alienasi akan membawa pada masalah sentral teori sosiologi tentang "tragedi culture", melebarnya jarak pemisah antara kultur objektif dan kultur subjektif.

### a. 2. Modernisasi Anthony Giddens

Giddens memperkenalkan pendekatan dualitas atas teorinya tentang modernisasi. Dalam teori Strukturasinya Giddens ada tiga aspek modernisasi, pertama perentangan ruang dan waktu.

Kerangka konseptual perentangan waktu-ruang mengarahkan kita pada hubungan yang kompleks antara peristiwa local (kondisi *co-presence*) dan interaksi lintas jarak (kaitan kehadiran dan ketidakhadiran). Dalam kondisi modern, tingkat perentangan waktu-ruang jauh lebih tinggi dibanding kurun sebelumnya, dan hubungan antara peristiwa local dan yang jauh juga direntang. Globalisasi terutama mengacu pada proses perentangan ini....<sup>7</sup>

Giddens membagi masyarakat dalam tiga tipologi menyangkut tingkat perentangan waktu dan ruang<sup>8</sup>. Pertama; *Tribal Society* yang dicirikan masih kuatnya pengaruh adat serta tradisi, intensitas tatap muka yang relatif tinggi. Kedua; *Class-divided Society* yang berada pada takaran simbiosis wilayah kota yang relatif maju dengan pedesaan yang masih konsisten dengan nilai adat dan tradisi. Dan yang ketiga; *Capitalism (Class Society)* yang merupakan bentuk negara-bangsa serta adanya pemisahan ekonomi dan politik.

Aspek kedua adalah Reflektifitas-institusional, di mana orientasi manusia kepada adat, tradisi, serta sistem nilai lainnya mengalami perubahan. Ketetapan-ketetapan yang sifatnya kodrati smakin kehilangan daya pembentuknya terhadap

<sup>7</sup> *ibid*, kutipan dari *The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990)*, hlm 64

<sup>8</sup> B. Herry-Priyono. *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. 2002

cara hidup manusia. Pada kondisi inilah, Giddens menggambarkan kondisi dunia seperti tunggang langgang berlarian tidak tentu arah (*Runaway World*). Aspek yang terakhir menyangkut sistem abstrak, dimana kepercayaan dalam masyarakat modern disadarkan pada dua mekanisme institusional yang menjadi penggerak proses Refleksifitas<sup>9</sup> yaitu; *alat simbolis* yang merupakan sarana pertukaran yang bisa diedarkan terlepas dari siapa atau kelompok mana yang memegangnya pada waktu dan tempat tertentu.

Yang kedua adalah *sistem ahli* yang menyangkut gugus kinerja yang berisi berbagai kemandirian profesional yang menjadi prasarana pengorganisasian bidang-bidang material dan sosial hidup. Dari segala aspek yang terjadi, Giddens sampai pada kesimpulan bahwa proses-proses dalam pendekatan strukturasinya pada gejala modernisasi tidak lepas dari improvisasi teknologi yang dikebangkan manusia sendiri.

Globalisasi menampakkan bahwa tidak seorangpun dapat mengelak dari transformasi yang dilahirkan modernitas, termasuk risiko buatan yang dibawa. Manusia tidak dapat menutup diri hanya pada wilayah lokal yang dia tempati, tetapi dengan wilayah-wilayah global yang lebih luas. Peristiwa di lingkup local semakin terkait erat dengan peristiwa dan proses yang terjadi amat sangat jauh jaraknya, begitu pula sebaliknya.

Perentangan waktu dari ruang yang kemudian terjadi secara global disebut sebagai globalisasi. Dalam kondisi seperti itu ditunjukkan pola bahwa kondisi modernitas secara inheren bersifat mengglobal. Empat gugus penyangga modernisasi ( kapitalisme, industrialisme, pemata-mataan, control alat kekerasan )

---

<sup>9</sup> ibid

juga merupakan empat gugus institusional globalisasi : ekonomi kapitalis dunia, pembagian kerja internasional, sistem Negara-bangsa, dan tata militer dunia<sup>10</sup>.

Proses strukturasi modernitas ini juga menerobos jauh ke wilayah hidup pribadi. *Self* ( diri ) semakin lolos dari penentuan tradisi komunitas local. Karena itu, “identitas diri juga semakin menjadi proyek yang refleksif<sup>11</sup>. Di mana keseluruhan cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba pilihan yang disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan yang global.

Giddens melihat gelombang massif globalisasi *bukan menekan manusia menjadi kerumunan – kerumunan pasif*, melainkan justru mengintensifkan manusia dalam mencari identitas diri yang bersifat melokal ( downward re-embedding) di samping pencarian menglobal (upward disembedding ). Proses ganda ”mengglobal dan melokal juga menjelaskan mengapa berbagai gerakan identitas kolektif seperti gerakan keagamaan, nasionalisme, etnis bermunculan kembali. Dalam proses ganda mengglobal dan melokal ini, politik identitas yang tidak berorientasi pada prosedur subsidiaritas dan desentralisasi pada akhirnya akan menjadi bentuk politik aliran yang usang, tidak responsif dan otoriter.

## **b. Identitas**

### **b. 1. Identitas Manusia**

Identitas manusia sangat kompleks, di mana manusia dipandang tidak hanya memiliki satu identitas bahkan juga multi-identitas<sup>12</sup>. Ada dua macam identitas manusia, *Petama* apa yang disebut sebagai Ascribed identity dimana

---

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 71

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 114 dan *Modernity and Self Identity* ( Cambridge: Polity Press, 1990 ), hlm. 5

<sup>12</sup> Amin maalouf, *In Name of Violence and the Need to Belong* ( New York: Arcade Publishing, 2000)



identitas manusia itu sudah ada sejak manusia itu lahir atau dengan kata lain identitas yang menempel dan tidak bisa ditolak oleh manusia itu sendiri, misalnya: ras, bahasa, etnic, agama dimana identitas-identitas itu lebih dulu diberikan. *Kedua* adalah *Achieved identity*, identitas yang diberikan karena pilihan atau aksi social tertentu, seperti: posisi ekonomi, klas social, profesi, posisi politik, status social yang mana identitas tersebut diberikan setelah manusia melakukan aktifitas tertentu.

Menurut Michael E. Brown ada tiga perspektif dalam memahami Identitas yaitu; Primodialisme, Istrumentalisme dan Konstruksi Sosial. *Pertama*, Primodialisme dimana melihat identitas etnis, ras, agama, budaya dll- bersifat stabil, fixed, ascribed (identitas manusia yang diberikan sejak manusia itu lahir atau dengan kata lain identitas yang menempel dan tidak bisa ditolak oleh manusia itu sendiri ), tidak dapat berubah dalam jangka waktu yang relatif lama, dengan kata lain identitas etnis dalam sebuah kelompok etnis bersifat *taken as givens*, seperti identitas kelompok etnis yang berdasar pada *primodial sentiment*, consensus kebudayaan yang terinternalisasi pada anggota kelompok pada institusi primer seperti keluarga, klan, kelompok kepercayaan, neighbourhood, dan local, yang mana individu lahir dan tinggal. Sentimen primodial seperti identitas inti, identitas dasar, yang mana lebih dulu eksis dibandingkan dengan identitas lain seperti identitas personal, klas, partai politik, dan nasionalisme dimana sentimen primodial tersebut berpengaruh pada tingkah laku individu dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dalam hubungannya dengan komunitas-komunitas yang lain termasuk didalamnya konflik hubungan.

*Kedua*, Instrumentalis yang melihat identitas sebagai sebuah bentuk manipulasi dari beberapa kelompok elite politik dalam mencapai tujuannya. Paul Brass mengatakan bahwa

*“ethnic communities are created and transformed by particular elite in modernizing and in post-industrial societies urdegoing dramatic change”*.

Nilai –nilai yang ada dalam dalam masyarakat seperti budaya, ras, dan agama yang berlaku dalam masyarakat dijadikan olet elit politik untuk persaingan kepentingan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, konflik etnis dan budaya terjadi jika kepentingan kelompok-kelompok elit lebih mendominasi terhadap tujuan dari kelompok etnis.

*Ketiga*, gabungan dari dua perspetif diatas, yaitu Konstruksi Sosial. Dalam perspektif ini, anggota – anggota dari komunitas etnis atau agama bekerja sama dengan elit-elit politik dalam tujuannya. Nilai-nilai seperti mistik, sejarah, tradisi atau symbol-simbol kebudayaan kelompok-kelompok keagamaan digunakan oleh para elite untuk memperbarui atau menciptakan sebuah identitas baru yang diharapkan oleh kelompok-kelompok keagamaan tersebut, dengan kata lain konflik identitas terjadi disebabkan dinamisasi dari proses konstruksi social yang sedang terjadi.

Alex Inkeles dan David Smith dalam bukunya *Becoming Modern* memperlihatkan beberapa indikator menyangkut apa yang disebut individu modern, yaitu: *Opennes to new experince*. Individu modern harus mempunyai keterbukaan terhadap hal yang sifatnya baru, namun bukan bentuk kelataban. *The readiness for sosial change*. Individu yang modern selalu siap menerima perubahan sosial. Artinya, ia mau menerima kenyataan akan adanya perubahan

yang menyeluruh di dalam masyarakat. *The realism of the growth of opinion.* Individu modern harus memiliki kemampuan untuk peduli terhadap masalah yang timbul di sekitarnya dan mampu menempatkan dirinya dalam kerangka posisi dan pemikiran orang lain yang dikenal dengan istilah empati. Manusia modern juga bisa memberikan nilai positif terhadap pendapat orang lain. *The need of information.* Individu modern selalu 'haus' untuk terus memperoleh dan mengikuti perkembangan keadaan sekitarnya. Oleh karena itu ia selalu memiliki sejumlah informasi yang dianggap penting. *Oriented toward future and functuality.* Individu modern selalu berorientasi ke masa depan dengan melihat masa sekarang dan mengambil pengalaman dari masa lampau. Di samping itu ia harus mau menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Kesetiaan untuk menepati waktu dan janji, merupakan suatu yang sangat melekat pada individu modern. *Efficacy.* Artinya, individu modern percaya betul bahwa ia dan masyarakat harus mampu mengontrol lingkungan sekitarnya, bukan sebaliknya. *Planning.* Individu modern harus memiliki perencanaan yang jelas. *Calculability.* Individu modern harus mempunyai keyakinan bahwa lingkungannya harus dapat diperhitungkan. *The valuing of technical skill.* Kemampuan teknis merupakan sesuatu yang sangat bernilai bagi individu modern. *Aspiration, educational and accupational.* Individu modern harus memiliki aspirasi yang tinggi dan percaya, pendidikan merupakan kebutuhan sangat mutlak dalam kehidupannya. Di samping itu, manusia modern harus percaya, dalam memperoleh pekerjaan dan kedudukan bukan karena faktor yang sifatnya tradisional tetapi berdasarkan prestasi dan nilai keilmuan yang dimilikinya. *Awarenessof and respect for the dignity of other.* Individu modern harus bisa menghargai pendapat orang lain,

harus percaya bahwa orang lain mempunyai kemuliaan dan kebajikan seperti yang dimilikinya, bukan melecehkan atau meremehkan sesamanya. *Optimism*. Manusia modern harus selalu bersikap optimis dan tidak cepat menyerah terhadap keadaan dan tantangan yang dihadapinya.

## **b. 2. Bentuk Perlawanan Identitas**

Perry Anderson, William I. Robinson, Jorge Castaneda dan Martha Harnecker menawarkan sebuah strategi baru untuk merespon kondisi obyektif yang ditimbulkan akibat arus modernisasi yaitu *Strategi Defensif*<sup>13</sup>. Dasar pemikirannya, dalam konteks globalisasi-neoliberal yang didorong oleh modernisasi, strategi perjuangan yang bersifat lokal-nasional dan terisolasi dari lingkup perjuangan internasional adalah mustahil.

*"Perjuangan yang bersifat lokal harus dipandang sebagai sebuah pengalaman praktis....untuk membangun sebuah proyek alternatif terhadap kapitalisme" (Harnecker)*

Strategi defensif ini menawarkan sebuah jalan keluar terhadap upaya melawan arus globalisasi dengan *perlawanan transnasional*.

James Petras, seorang Sosiolog di Universitas Binghamton AS, berpadangan lain. Petras memajukan sebuah strategi yang berlawanan secara diametral yaitu *Strategi Ofensif*<sup>14</sup>. Dia cenderung melihat dengan adanya gerakan – gerakan sosial yang terkoordinasi secara baik yang sanggup memblok, melawaan dan pada akhirnya menjatuhkan rejim neoliberal.

---

<sup>13</sup> Dikutip dari artikel Strategi Defensif dan Ofensif August 10, 2006 (Posted by coenhp in Politik. Trackback)

<sup>14</sup> Ibid

### **c. Gerakan Kebangkitan (*Revivalis*) Islam**

#### **c. 1. Sebab-aeabab kemunculan gerakan kebangkitan Islam**

Di dunia Muslim, telah muncul kebangkitan Islam yang penting dan sangat jelas terlihat. Pengukuhan iman dan identitas ini mempunyai pengaruh hebat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang tercermin dalam pakaian, perubahan gaya hidup sosial, kesenian, dan, paling jelas terlihat, dalam arena dan kekuasaan politik. Bersamaan dengan munculnya kebangkitan Islam, muncul pula tuntutan yang semakin kuat terhadap partisipasi rakyat dalam sistem politik.<sup>15</sup>

Indek bangkitnya Islam dalam kehidupan pribadi banyak: perhatian yang makin besar pada ibadah (mengunjungi masjid, shalat, puasa), memperbanyak program serta publikasi agama, lebih menekankan pakaian dan nilai-nilai Islam, serta revitalisasi tasawuf. Pembaharuan yang lebih luas ini juga disertai penegasan kembali Islam dalam kehidupan umum: bertambahnya pemerintahan, organisasi, hukum, bank, lembaga keajahteraan sosial, dan lembaga pendidikan yang berorientasikan Islam.<sup>16</sup> Senada dengan Dekmejian, bahwa kebangkitan Islam terjadi dalam beberapa bentuk. Pada tingkat yang paling umum, kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam.<sup>17</sup>

Esposito beranggapan bahwa di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem yang lebih demokratis.<sup>18</sup> Gerakan kebangkitan agama (dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>16</sup> Esposito, John L, *Islam Kontemporer : Reformasi atau Revolusi ?*, Bandung : Mizam, 1995, hal.22.

<sup>17</sup> Dekmejian, R. Hrair, *Kebangkitan Islam : Katalisator, Kategori dan Konsekuensi* dalam Hunter, Shireen T., *Politik Kebangkitan Islam (terj)*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2001, hal.3

<sup>18</sup> Esposito, *Op.cit*, hal. 1

hal ini Islam, *pen*) ditandai dengan semakin tingginya kesadaran dalam berpartisipasi dalam wilayah politik.

Mengenai penyebab lahirnya gerakan-gerakan Islam, Dekmejian memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, hubungan kausal antara krisis sosial dan kebangkitan keagamaan memiliki validitas yang substansial dalam latar belakang budaya yang beraneka ragam.<sup>19</sup> Ia menyebutkan bahwa kondisi-kondisi krisis yang melatarbelakangi gerakan kebangkitan Islam adalah konflik identitas, krisis legitimasi, konflik politik, konflik kelas, krisis ekonomi, krisis budaya, dan kemandulan kekuatan militer, yang bertindak sebagai katalisator dari respon *revivalis* Islam.<sup>20</sup>

Validitas dari faktor-faktor krisis ini diperkuat oleh pandangan diri dan pandangan dunia dari banyak umat Islam, terutama kalangan *revivalis*. Pandangan yang disebut terakhir tentang kondisi Islam adalah pandangan tentang kesuraman dan mala petaka yang ditandai oleh kemerosotan internal, sekularisasi, ketidakadilan ekonomi, penindasan politik dan kekalahan militer. Salah satu akibat utama dari kemerosotan Islam adalah krisis identitas baik individual maupun kolektif di kalangan kaum umat Islam. Tugas untuk menemukan pengganti kerangka identitas akan terbukti sulit karena Islam merupakan sistem sosial yang meliputi agama (*din*), negara (*daulah*) dan hukum (*syari'ah*).

Beberapa ciri krisis yang paling menonjol dewasa ini adalah (1) *pervasif*—kondisi krisis ini tidak terbatas pada negara-negara tertentu, namun meresap di seluruh dunia Islam; (2) *Komprehensif*—krisis-krisis itu meliputi berbagai bidang sekaligus: sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, psikologi, dan spiritual; (3)

---

<sup>19</sup> Dekmejian, *Op.cit*, hal 5

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.8

*kumulatif*—krisis ini bersifat kumulatif, menggambarkan puncak kegagalan upaya pembangunan bangsa, pembangunan sosial-ekonomi dan keperkasaan militer; (4) *Xenophobisme*, kebencian terhadap orang asing. Dalam pandangan para intelektual revivalis, integritas kebudayaan Islam dan *way of life* Islam itu juga terancam oleh kekuatan-kekuatan non-Islam seperti sekularisme dan modernitas, yang didorong oleh pemerintah Islam.<sup>21</sup>

### c. 2. Bentuk-bentuk Kebangkitan Islam

Bentuk-bentuk kebangkitan Islam beraneka ragam dan hampir tak terbatas dari satu negara ke negara lainnya. Namun, ada tema-tema yang jelas: perasaan bahwa sistem-sistem politik, ekonomi dan sosial yang ada telah gagal; ketidaksukaan dan kadang-kadang penolakan terhadap barat; pencarian identitas dan keotentikan yang lebih jelas; dan keyakinan bahwa Islam memberikan ideologi yang memadai bagi negara dan masyarakat suatu alternatif yang sah untuk menggantikan nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme sekuler.<sup>22</sup>

Berbagai kepentingan politik gerakan-gerakan Islam itu mendorong mereka untuk menjadi oposisi revolusioner terhadap pemerintah, atau berpartisipasi dalam sistem politik yang ada sebagai gerakan oposisi. Dalam sejumlah kasus, gerakan Islam menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi kekuatan yang berkuasa dalam sistem politik. Spektrum yang luas ini dapat dikategorikan dalam empat posisi umum yang di dalamnya kebangkitan Islam dan demokratisasi saling berhubungan. Keempat posisi gerakan Islam itu adalah (1) oposisi revolusioner terhadap sistem politik yang ada; (2) oposisi yang diakui atau bekerja sama dan beroperasi dalam sistem politik yang ada; (3) berpartisipasi aktif

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 9-13

<sup>22</sup> Esposito, *Op.cit*, hal.24

dalam pemerintahan melalui aliansi atau koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik lain, dan (4) kekuatan kontrol dalam sistem politik yang ada.<sup>23</sup>

Fazlur-Rahman<sup>24</sup> membagi dalam beberapa tipologi gerakan pembaharuan dalam Islam, *Pertama*, Gerakan *Revivalis* (kebangkitan Islam). *Kedua*, Gerakan *Modernis*. *Ketiga*, Gerakan *Neo-Revivalis* yang merupakan produk dari modernisme Islam dan tumbuh dari *degenerasi* (kemerosotan) modernisme, dan *Keempat*, Gerakan *Neo-Modernis*, yang berusaha mengolah kembali modernisme.

### c. 3. Prinsip-prinsip gerakan kebangkitan (Revivalis) Islam

Berbagai upaya perlawanan yang dilakukan oleh kalangan revivalis terhadap berbagai macam faktor yang mengancam eksistensi Islam dilandaskan pada prinsip-prinsip yang tentu saja secara tegas bertolak belakang dengan prinsip-prinsip sekulerisme. Prinsip-prinsip ideologis kalangan revivalis Islam kontemporer tersebut antara lain:

1. *Din wa al-Daulah*. Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu dan tempat. Pemisahan antara agama (*din*) dan negara (*daulah*) tidak dapat diterima. Hukum syari'ah dalam Islam bersifat *inheren*. Al Qur'an memberikan syari'ah dan negara menegakkannya.
2. *Al-Qur'am dam al-Sunnah*. Fondasi Islam adalah Al-Qur'am dan al-Sunnah—Hadits Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan untuk kembali pada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek umat nabi yang puritan dalam mencari keaslian dan pembaruan.

<sup>23</sup> Esposito-Voll, *Op.cit*, hal. 40

<sup>24</sup> Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Pustaka Antara, Jakarta, 1999, hal. 9



3. *Puritanisme dan Keadilan Sosial*. Nilai-nilai dan adat istiadat budaya Barat ditolak sebagai sesuatu yang asing bagi Islam. Pada akhirnya media massa diperintahkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan praktek-praktek Islam daripada menyebarkan pengaruh-pengaruh budaya asing. Kembali pada jalan yang benar juga mensyaratkan penegakan keadilan sosial-ekonomi. Semua harta kekayaan menjadi milik masyarakat dan akhirnya menjadi milik Tuhan; manusia hanya memanfaatkan kekayaan yang didapat melalui usahanya. Islam mengakui hak-hak milik pribadi, namun membatasinya sesuai dengan kesejahteraan masyarakat secara umum.
4. *Kedaulatan dan Hukum Allah berdasarkan Syari'ah*. Tujuan pokok dari umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi—Nizam al Islam—di mana syari'ah merupakan undang-undang tertinggi.
5. *Jihad : Pilar Keenam*. Muslim yang baik diperintahkan untuk menjalankan Rukun Islam Lima dan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan berkomitmen untuk bertindak membangun masyarakat yang ideal sesuai dengan syari'ah. Untuk membangun masyarakat yang demikian diperlukan adanya usaha untuk menghancurkan kehidupan *jahiliyah*—masyarakat pra-Islam yang kafir—dan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan duniawi mereka melalui jihad. Upaya jihad tidak untuk “bertahan”, tujuan jihad adalah menaklukkan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia, yang meliputi negara, sistem sosial dan tradisi-tradisi asing, di mana mujahidin akan melakukan jihad yang “komprehensif” termasuk menggunakan kekerasan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dekmejian, *Op. cit*, hal. 14-15.

#### **d. Partai Politik**

Dalam sistem demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara.<sup>26</sup> Menurut Macridis, partai merupakan konsekuensi dan bukan ‘penyebab’ demokrasi, tetapi sekali mereka muncul, mereka memperkuat kondisi-kondisi sebelumnya, yakni kelangsungan demokrasi.<sup>27</sup>

Seorang sarjana bernama Sigmund Deumann—sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarto—memberikan definisi partai politik sebagai berikut :

“ Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.”<sup>28</sup>

#### **d. 1. Fungsi Partai Politik**

Fungsi-fungsi partai politik banyak dipaparkan oleh para ahli politik dalam bermacam versi. Namun secara umum fungsi-fungsi tersebut terdiri dari representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 15

<sup>27</sup> Macridis, Roy C., *Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai*, dalam Ikhlusul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Yogyakarta : Tiara Wacana, edisi revisi 1996, hal.22.

<sup>28</sup> Budiarto, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah pengantar dalam Miriam Budiarto (Peny.), Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Gramedia, 1982, 14.

<sup>29</sup> Macridis, *op.cit*, hal.26.

Fungsi representasi adalah ekspresi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai. Kadang-kadang fungsi representasi lebih sering ditampilkan daripada fungsi perantara (brokerage), yaitu partai merupakan ekspresi kepentingan tertentu, kelas tertentu atau kelompok sosial tertentu.<sup>30</sup> Sedangkan artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-*input*-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.<sup>31</sup> Sebelum menjalankan artikulasi politiknya, partai politik harus terlebih dahulu menjalankan fungsi komunikasi politik yang dimilikinya. Fungsi ini dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.<sup>32</sup> Kedudukan partai dalam arus informasi dalam suatu negara yang bersifat dua arah adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the ruler*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*).<sup>33</sup>

Fungsi berikutnya adalah konversi dan agregasi. Keduanya adalah varian dari representasi dan perantara. Dengan konversi kita mengerti transformasi dari apa yang disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang berhasil akan tergantung pada keseimbangan yang tepat antara bahan yang dimasukkan (*intake*) dan yang dikeluarkan (*out put*).<sup>34</sup> Sedangkan agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal .26

<sup>31</sup> Koirudin, *Op.cit*, hal.86.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 103

<sup>33</sup> Budiarjo, *Op.cit*, hal.14

<sup>34</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 26.

kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.<sup>35</sup>

Integrasi memiliki varian-varian fungsi seperti sosialisasi, mobilisasi dan partisipasi. Sosialisasi adalah proses, di mana kumpulan norma-norma sistem politik ditransformasikan (ditularkan) kepada orang-orang yang lebih muda;<sup>36</sup> Melalui kursus-kursus pendidikan partai menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Terutama dalam negara berkembang, yang bangsanya sering heterogen sifatnya, partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.<sup>37</sup> Fungsi ini sangat diharapkan karena negara-negara baru sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.<sup>38</sup> Fungsi pengintegrasian ini dapat pula disepadankan dengan fungsi sebagai pengatur konflik.

Fungsi mobilisasi yang dimiliki partai politik adalah variasi ekstrem dari sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukkan secara cepat sejumlah orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu-menahu, tidak tertarik, atau takut, ke dalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan menjamin dukungan massa. Sedangkan fungsi partisipasi berdiri di antara mobilisasi dan sosialisasi.<sup>39</sup> Herbert McClosky, seperti yang dikutip Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka

---

<sup>35</sup> Koirudin, *Op.cit*, hal 91

<sup>36</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 27.

<sup>37</sup> Budiarjo, *Op.cit*, hal. 16

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>39</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 27.

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>40</sup>

Fungsi persuasi yang dilakukan oleh partai politik adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>41</sup> Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik memanfaatkan berbagai macam media komunikasi untuk mempengaruhi masyarakat secara luas.

Bertolak belakang dengan fungsi di atas adalah fungsi represi. Dalam melakukan represi, partai, melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota, mengendalikan nasib semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara yang tidak hanya tidak mengizinkan adanya oposisi tetapi juga menghukum pihak oposisi yang membangkang.<sup>42</sup>

Fungsi penting lainnya adalah rekrutmen. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus ia merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.<sup>43</sup> Oleh karena itu rekrutmen juga dimaknai sebagai latihan (training) dan persiapan untuk kepemimpinan; terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintah atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi yang baik adalah pemilihan.<sup>44</sup> Rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan

<sup>40</sup> Budiarjo, *Op.cit*, hal.1

<sup>41</sup> Macridis, *Op.cit*.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 27-28

<sup>43</sup> Budiarjo, *Op.cit*, hal. 16

<sup>44</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 28

kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.<sup>45</sup>

Fungsi lainnya adalah pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Anggota partai mencapai persetujuan tentang tujuan-tujuan utama partai, dan sebelum itu mereka mempunyai kesempatan untuk memperdebatkan tujuan-tujuan tersebut.<sup>46</sup>

Fungsi dukungan yang dijalankan oleh partai politik dilakukan dengan menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem di mana partai tersebut beroperasi. Tidak ada partai yang dapat hidup untuk waktu yang lama tanpa adanya usaha menanamkan pola kepercayaan di kalangan rakyat yang bisa mendukungnya dan kelangsungan sistem politik secara keseluruhan.<sup>47</sup>

#### Jenis dan Tipologi Partai Politik

Dari berbagai bentuk dan jenis partai politik yang ada, terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil. Maurice Duverger menawarkan perbedaannya menjadi partai elit atau partai tradisional (*partis de cadre*) dan partai massa (*partis de masses*). Dan satu bentuk lain yang terletak di antara keduanya, yaitu partai "tak langsung" (*indirect parties*).<sup>48</sup>

Di Eropa, partai-partai elit tidak bertujuan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak mungkin, tetapi mereka lebih menekankan pada mendapatkan

---

<sup>45</sup> Koirudin, *Op.cit*, hal 101.

<sup>46</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 28

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>48</sup> Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan (terj)*, Yogyakarta : Bina Aksara, 1984, hal. 6.

dukungan dari orang-orang terkemuka, mereka lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Warga negara yang terkemuka itu dicari atau karena prestise mereka, yang akan memberkahi partai itu dengan pengaruh moral tertentu, atau karena kekayaan orang tersebut, yang akan memungkinkan partai tersebut mendapat bantuan dalam biaya-biaya untuk berkampanye. Organisasinya bersifat lentur, struktur organisasinya juga memiliki otonomi yang cukup besar. Oleh karena desentralisasi ini, maka organisasi pusat partai politik tersebut boleh dikatakan tidak mempunyai kekuasaan apapun.<sup>49</sup>

Ada juga perbedaan yang dilakukan oleh Macridis yang didasarkan pada: (a) sumber dukungan partai; (b) organisasi internal; (c) fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakannya (*mode of action*).

(a) *Sumber-sumber dukungan partai* : Disarankan satu perbedaan dasar: komprehensif lawan sektarian. Yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Partai-partai sektarian adalah partai-partai yang memakai kelas, daerah (*region*) atau ideologi sebagai daya tariknya.

(b) *Organisasi Internal*: Dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (*persyaratan*) yang ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak sama sekali bagi keanggotaannya. Partai-partai tertutup cenderung menjadi otoriter, yaitu para

---

<sup>49</sup> Maurice, *Op.cit*, hal. 6-7

anggota diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap prosedur pertimbangan yang terbuka; kebalikannya adalah partai terbuka. Partai-partai tertutup cenderung menekankan aksi langsung dan diarahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintah; partai-partai terbuka menekankan aksi politik dan menghormati pluralisme politik.

(c) *Cara-cara bertindak dan fungsi*: Dua tipe dasar yang kita ajukan, adalah *diffused* (menyebar) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan ke-perwakilan-an (*representativeness*), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu; sedangkan partai yang *diffused* (menyebar) menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenai cara-cara tindakannya, partai yang *diffused* pada umumnya akan menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa, sedangkan partai yang terspesialisasi akan membatasi tipe aksi mereka kepada prosedur-prosedur yang dapat diterima.<sup>50</sup>

Koirudin membagi partai-partai dalam lima jenis. *Pertama*, jenis partai proto. Partai jenis ini merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol, yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau intraparlemen. Basis dukungannya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif rendah (sederhana). Belum sepenuhnya sebagaimana dalam ciri parpol modern. Ciri faksional masih menonjol, dan ciri yang jelas adalah pembedaan antara kelompok anggota dan non-anggota.

---

<sup>50</sup> Macridis, *Op.cit*, hal. 30



*Kedua*, jenis partai kader. Secara historis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya kebanyakan kelas menengah ke atas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologinya rendah sebab aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.

*Ketiga*, jenis partai massa. Berkembangnya jenis ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Orientasi parpol ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani dan massa lainnya. Tujuannya adalah untuk pendidikan politik dan kemenangan pemilu. Ideologi dan organisasinya rapi.

*Keempat*, jenis partai diktatorial. Partai jenis ini merupakan sub tipe partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan kontrol ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana anggota parpol dituntut mengabdikan secara total.

*Kelima*, jenis partai *catch-all*. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya menjadi anggotanya. Tujuannya memenangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelompok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak terlalu kaku.<sup>51</sup>

Lebih lanjut Koirudin melakukan tipologi berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan asas dan orientasi, parpol diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu parpol pragmatis, parpol doktriner dan parpol kepentingan. Yang dimaksud dengan parpol pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Parpol

---

<sup>51</sup> Koirudin, Op.cit, hal.78-80

pragmatis, biasanya muncul dalam sistem dua partai berkompetisi yang relatif stabil. Parpol doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>52</sup>

Selain itu, Almond, sebagaimana yang dikutip Koirudin, menggolongkan parpol berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu *pertama*, parpol yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah; *kedua*, parpol yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha; *ketiga*, parpol yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katholik, Protestan, dan Hindu; dan *keempat*, parpol yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Koirudin, *Op.cit.*, hal. 81-82

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 83

## II. METODE PENELITIAN

### II. 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mencoba membuktikan kebenaran apa adanya, bukan kebenaran yang dapat digeneralisir. Menurut Bogdan dan Taylor ( Moleong, 1990:5 ), rumusan metodologi kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic, sehingga individu atau organisasi tidak boleh diisolasi ke dalam bentuk variable atau hipotesa. Peneliti harus memandang individu dan organisasi sebagai bagian dari suatu kesatuan.

Dalam penelitian ini interpretasi kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. **Ian Craib**<sup>54</sup> mengungkapkan bahwa fenomenologi tertarik dengan mengidentifikasi masalah yang berasal dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan obyek-obyek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi di dalam kesadaran individual secara terpisah dan kemudian secara kolektif didalam interaksi antar kesadaran-kesadaran.

Pada bagian inilah suatu kesadaran “bertindak” (*acts*) atas data inderawi yang masih mentah akan menciptakan makna. Dan dengan cara yang sama, dapat dilihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak tersebut tanpa berusaha

---

<sup>54</sup> Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern Dari Parsons sampai Habermas*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hal 129

masuk lebih dekat dan mengidentifikasi melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya. Menurut **Muhadjir**<sup>55</sup>, telah terjadi beragam aksentuasi dan pemaknaan fenomenologi. Secara makna ontologik, metode penelitian berdasarkan pendekatan fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam satu konteks natural dan bukan parsial.

## **II.2 . Obyek dan Lingkup Penelitian**

Obyek dari Penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera sebagai suatu partai politik yang memiliki identitas keIslaman cukup kental di bandingkan dengan partai – partai politik lain yang berasaskan keIslaman. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada kemampuan adaptasi Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi perkembangan modernisasi yang masuk ke Indonesia.

Ruang lingkup penelitian Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur, dengan asumsi bahwa gerakan ini di Jawa Timur memiliki kesamaan dalam aktivitas politiknya dengan Partai Keadilan Sejahtera di daerah lain, sehingga diharapkan dapat menjelaskan tentang Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia.

---

<sup>55</sup> Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hal. 12-13

### II. 3. Unit Analisa

Unit analisa dari penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera sebagai suatu lembaga yang diwakili oleh individu-individu. Individu yang dipergunakan adalah para aktor (pemimpin) gerakan dan aktivis politik yang juga merupakan bagian dari Gerakan Islam tersebut, yang kemudian disebut sebagai informan.

Sehingga pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive*, yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang bisa diketahui sebelumnya. Menurut Spradley, dalam memilih informan didasarkan atas pertimbangan, *pertama*, mereka menguasai dan memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati. *Kedua*, mereka tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti. *Ketiga*, mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. *Keempat*, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi dari kemasannya sendiri. dan *kelima*, mereka pada mulanya tergolong cukup asing akan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu : Sebagai anggota aktif partai tingkat elit struktur kepengurusan yang berperan dalam menentukan segala bentuk kebijakan serta memiliki pemahaman yang luas terhadap kebijakan-kebijakan internal dan eksternal partai.

Dua Informan tersebut adalah, Ust. Shmad Habibul Muiz yang merupakan Ketua Bidang Pembinaan Kader (BPK) Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur dan Umar Sholahudin yang merupakan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur.

#### **II. 4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukakn dengan cara wawancara secara mendalam dengan para informan-yang menjadi subjek penelitian. Di mana jawaban tidak dibatasi, diharapkan informan mampu memberikan jawabannya secara lengkap, sehingga data yang dihasilkan maksimal. Untuk menambah kelengkapan data yang diperoleh, maka observasi partisipatif akan digunakan dalam penelitan ini dan juga studi-studi literature guna mendapatkan data yang sifatnya empiris maupun teoritis.

#### **II. 5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan analisa secara kualitatif. Sehingga data-data baik primer ataupun sekunder yang didapatkan akan langsung dianalisis. Sedangkan analisisnya, karena menggunakan pendekatan Fenomenologi, data dianalisa dari informasi serta fenomena-fenomena dilapangan yang didapatkan dari informan. Selain itu penelitian ini juga dibantu dengan penggunaan tabel-tabel yang relevan sebagai data penelitian yang sifatnya hanya memperkuat dan memperjelas diskripsi data.

## BAB II.

### Modernisasi, Sejarah dan Identitasnya

#### A. Mendefinisikan Modernisasi

Modernisasi<sup>1</sup> merupakan gejala social yang paling banyak menyedot para ilmuan social dari segala disiplin ilmu tertarik untuk menganalisisnya, mulai dari awal terjadinya, definisi sampai bentuk serta akibat – akibat yang ditimbulkannya sampai sekarang terus mengalami perdebatan. Dalam mendefinisikan Modernisasi tidak lepas dari sejarah munculnya istilah “Modern” itu sendiri. Istilah “Modern” berasal dari Istilah latin akhir abad ke – 5, *Modernus*, yang digunakan untuk membedakan keadaan orang kristen dengan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat. Sesudah itu istilah tersebut digunakan untuk menempatkan kondisi masa kini dalam hubungan dengan berlalunya zaman purbakala, yang muncul dan muncul kembali secara pasti selama periode tersebut di Eropa ketika kesadaran terhadap zaman baru membentuk dirinya sendiri melalui hubungan yang diperbaharui dengan masa lalu’ ( Habermas, 1981: 3-4 ).

Habermas, melihat “modernisasi” sebagai proses rasionalisasi dan differensiasi. “Modernitas” berarti bahwa sistem sosial yang mengatur-diri sendiri, yang berusaha untuk mempertahankan integritasnya di hadapan keragaman lingkungan dan internal yang berskala luas, menjadi semakin

---

<sup>1</sup> Kesulitan dalam mendefinisikan modernisasi dikarenakan tidak adanya ketegasan yang berkaitan dengan konsep-konsep Modern, Modernitas, Modernisme dan Modernisasi. Mengutip pernyataan Lash dan Federico de Onis yang dituliskan oleh Barry Smart dalam buku “*Teori – teori Posmodernitas dan Modernitas*” Bryan Turner, **Modern** didefinisikan pada takaran zaman/masa, **Modernitas** dinyatakan sebagai peristiwa yang terjadi pada abad 16 atau 17, **Modernisme** adalah pencarian terhadap modernisasi sedangkan **Modernisasi** digunakan untuk mengkonsepkan perkembangan dalam kehidupan sosial dan budaya yang sering dianggap sebagai dianggap penjelmaan dari pasca modernitas.

terdiferensiasi. Dalam sistem-sistem ini (1) orientasi budaya cenderung menjadi instrumentalis-kognitif, (2) peran menjadi semakin spesifik, dan (3) individu menjadi semakin terfragmentasi dan terpisah. Kedua, di bawah 'modernisasi', dunia kehidupan, yang mencakup sistem tindakan komunikatif (didasarkan pada inter subjektif), semakin menjadi rasional. Rasionalisasi dunia kehidupan melibatkan (1) 'refleksifitas budaya yang meningkatkan', atau 'peningkatan kesadaran kritis', (2) generalisasi nilai atau norma, atau peningkatan 'formasi-kehendak secara otonom', dan (3) 'individuasi yang meningkatkan pada subjek yang tersosialisasikan'.

Sedangkan Peter Berger berpandangan bahwa modernisasi menyangkut tatanan institusional suatu masyarakat secara keseluruhan -bukan hanya menyangkut institusi ekonomi saja, karena institusi ekonomi (dan teknologi) hanya motor penggerak modernisasi. Modernisasi mendorong berkembangnya teknologi di Negara-megara barat, yang membawa perubahan dalam kehidupan sosial. Toynbee berpendapat bahwa kemajuan teknologi barat telah menimbulkan krisis kemanusiaan melalui beban biaya perubahan yang diluar 'kapasitas kehidupan individu yang bisa diadaptasi', suatu masalah yang kemudian digambarkan oleh Toffler sebagai 'kejutan masa depan'. Di samping itu, berkembangnya teknologi-teknologi baru yang kuat memungkinkan kapasitas produksi yang meningkat secara dramatis dan membuat 'tingkat ketidakadilan sosial konsumen menjadi akut dan membuat 'tingkat ketidakadilan sosial konsumen menjadi akut dan tidak bisa di toleransi ., Sementara Toynbee merujuk pada sumber-sumber material, skenario hubungan demografis dan pekerja industri yang membentuk akomodasi sosial dan politik bagi perubahan ekonomi dan



teknologi, perhatian utamanya, sebagaimana terlihat dalam pembambahasan Bell mengenai revolusi harapan dan hak, mengarah kepada perkembangan 'wilayah publik'.

Sementara Weber secara tersirat mengatakan bahwa modernisasi sebagai proses dimana dunia sosial berada di bawah dominasi estetisme, sekulerisasi, klaim universal tentang rasionalitas instrumental, differensiasi berbagai lapangan kehidupan dunia, birokratisasi ekonomi, praktik-praktik politik dan militer, serta moneterisasi nilai – nilai yang sedang berkembang. Modernitas timbul bersamaan dengan meluasnya imperialisme Barat dalam abad enam belas; dominasi kapitalisme di Eropa bagian Utara, khususnya di Inggris, Belanda dan Finlandia pada permulaan abad ke 17; penerimaan prosedur ilmiah dengan penerbitan karya-karya Francis Bacon, Newton, dan Harvey; dan terutama dengan institusionalisasi pengalaman dan kepercayaan Calvinis pada kelas dominan Eropa Utara<sup>2</sup>.

John Gray, Professor Pemikiran Eropa di London School of Economics memuat banyak definisi dan karakteristik modernitas. Ia menyimpulkan bahwa bentuk modernitas itu sangat banyak dan bahkan beberapa di antaranya masih bersemayam di rahim masa depan. Individualisme bukanlah karakteristik esensial. Ciri modernitas seperti kapitalisme dan industrialisasi dapat terjadi dalam dan dilakukan oleh komunitas, suku atau keluarga tertentu yang masih berpegang pada nilai-nilai pra-modern. Hal ini berlawanan dengan opini yang sudah mapan bahwa individualisme adalah tanda fundamental, untuk tidak mengatakan inheren, dengan modernitas, tidak hanya dalam institusi sosio-politik, seperti dikatakan

---

<sup>2</sup> Ibid.

Ernst Gellner (*Conditions of Liberty*, 1994), tetapi juga dalam pemikiran saintifik<sup>3</sup>.

Apa yang paling menyulitkan Gray tentang modernitas adalah warisan kaum Positivis untuk menata kembali dunia menjadi sebuah masyarakat ideal. Pemikir Pencerahan percaya bahwa etika dan politik akan menyatu dengan berkembangnya pengetahuan yang memungkinkan sains meletakkan fondasi peradaban universal: dengan demikian mengenalkan ide masyarakat sempurna. Pandangan ini bermula dari visi adanya “Timur” dan Barat – komunisme dan liberalisme. Keduanya percaya bahwa masa depan akan memberikan tempat menuju dunia yang lebih baik: tidak hanya untuk moral dan ketaatan atau kelompok elite pilihan sebagaimana dalam pandangan agama-agama langit, tetapi bagi setiap orang yang mengikutinya. Pada abad ke-19 konsep ini semakin berkembang, bahwa untuk membuat masa depan ideal bagi semua umat manusia, maka secara etika dibenarkan untuk mengorbankan sejumlah besar nyawa manusia generasi ini<sup>4</sup>, *“karena revolusi besar selalu tega menelan rakyatnya sendiri”*.

J. W. School menganalisa proses modernisasi dari berbagai aspek, dalam masalah perekonomian misalnya, modernisasi berarti timbulnya kompleks industri yang besar-besar, dimana produksi barang – barang konsumsi dan barang-barang sarana produksi diadakan secara massal. Adanya kompleks –kompleks industri mengandung implikasi adanya organisasi-organisasi yang kompleks untuk mendirikan, menyekenggarakan dan mengembangkan aparat produksi itu dan untuk mengadakan pembelian bahan-bahan baku serta untuk penjualan

---

<sup>3</sup> Harian Pelita, Senin 3 Oktober 2005, *Modernisme vis a vis Fundamentalisme*, oleh A Fatih Syuhud

<sup>4</sup> *Ibid.*

produknya. Adanya spesialisasi produksi secara massal itu hanya mungkin karena adanya pasaran nasional dan/atau internasional untuk modal, bahan baku, barang-barang dan tenaga.

Spesialisasi fungsi-fungsi dalam proses produksi massal memerlukan pendidikan dan latihan yang lama. Pendidikan dan latihan tersebut harus bersifat luas dengan kemampuan spesifikasi yang bagus. Secara tidak langsung pendidikan dan latihan tersebut memerlukan biaya yang besar dan hanya dapat dipikul oleh sistem produksi yang modern.

Mengenai bidang politik, J. W. School melihat perlunya integrasi masyarakat nasional yang kuat akan sangat diperlukan bagi perkembangan ekonomi modern. Hal ini dimungkinkan jika wilayah-wilayah desa atau kota terikat dalam satu hubungan negara nasional yang memungkinkan adanya lalu lintas barang dan jasa secara bebas. Ini berarti, bahwa ada satu pusat untuk memelihara keamanan dan ketertiban dan adanya keseragaman yang besar dalam sistem hukum dan perundang-undangan.

Integrasi dimungkinkan, karena adanya kemajuan teknik, sehingga membawa perluasan yang luar biasa dalam hal komunikasi. Perluasan komunikasi lewat media cetak seperti: koran, majalah dan media elektronik seperti TV sampai Internet memberikan ruang partisipasi aktif masyarakat khususnya dalam aspek kebijakan lokal maupun internasional. Sehingga dalam masyarakat modern peran Pemerintah dalam mengatur kebijakan – kebijakan akan semakin berkurang.

Analisa terakhir dari School adalah masalah sistem kepercayaan dan pandangan dunia yang mengalami perubahan menjadi lebih bersifat universal, dimana masyarakat dunia seluruhnya mendapat tempat dan arti. Bersamaan

dengan hal tersebut terjadilah Sekularisasi, dimana pengaruh sistem nilai seperti agama berkurang bahkan mengalami penghapusan dalam aktifitas – aktifitas yang mulai bersifat otonom.

Para Sosiolog mencoba mencari aspek – aspek dari proses modernisasi dalam gejala – gejala differensiasi dan perbesaran skala. Differensiasi mencangkup gejala bahwa sebuah organisasi yang ada pecah dan menjadi sejumlah organisasi - organisasi baru untuk melaksanakan tugas – tugas atau fungsi – fungsi tertentu secara lebih memadai ( adekuat ) sesuai dengan situasi historik yang ada. Differensiasi sosial itu berhubungan dengan proses semakin bertambahnya pembagian pekerjaan dan spesialisasi yang khususnya nampak jelas dalam organisasi.

Perbesaran Skala ditandai dengan semakin besarnya jumlah relasi dan/atau intensitasnya dalam sebuah satuan sosial tertentu. Di negara-negara yang sedang berkembang misalnya terlihat, bahwa relasi masyarakat – masyarakat desa yang agak terasing dari dunia luar dengan cepat bertambah jumlah dan intensitasnya. ini disertai dengan berkurangnya jumlah dan intensitas relasi-relasi di dalam desa-desa itu sendiri. Relasi itu sifatnya juga berubah seperti pergeseran relasi dari yang relasi perorangan dengan tidak banyak spesifikasi menjadi relasi yang kurang perorangan dengan lebih banyak spesifikasi<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Schoorl, Prof. J. W. *Modernisasi ; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1991

## **B. Sejarah Modernisasi di Eropa**

Awal modernisasi di Eropa sampai sekarang masih mengalami perdebatan di kalangan para ilmuwan. Toynbee berpendapat bahwa awal "Zaman Modern Sejarah Barat" terjadi dalam seperempat akhir abad -15 diantara orang-orang pesisir Atlantik Eropa dan berasal dari munculnya suatu bentuk "kemunafikan budaya" dan "penyelidikan teknologi laut yang luar biasa" ( 1954a: 144). Sementara Bryan Turner melihat modernitas sebagai suatu perubahan social dan budaya yang bersifat massif yang telah terjadi dari pertengahan abad 16 , yang pada gilirannya dan tentu saja berkaitan dengan suatu analisis terhadap masyarakat kapitalis industrial sebagai suatu perubahan revolusioner dimana stabilitas tradisi dan social itu dibangun dalam peradaban agraris yang agak stagnan<sup>6</sup>.

Ada tiga fase dalam perkembangan sejarah Eropa, fase pertama disebut sebagai abad Eropa kuno yang diawali pada zaman Yunani kuno sampai Abad 5 masehi, kemudian abad Pertengahan yang diawali pada akhir abad 5 sampai abad 15 serta abad modern yang diawali dari akhir abad 15 sampai abad 19.

Abad Pertengahan merupakan periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah prakarsa raja Charmlagne pada abad 5 hingga munculnya monarkhi-monarkhi nasional, dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta Reformasi Protestan dengan dimulainya renaisans pada tahun 1517. Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan.

---

<sup>6</sup> Turner, Bryan. *Teori – Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000.

Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Pada masa ini ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepentingan religi. Adanya larangan pengeksposan tubuh manusia dan hewan membuat kesenian menemukan teknik abstraksi yang memungkinkan sensasi tercipta tanpa adanya kehadiran bentuk realis. Pada masa ini pula dibangun sistem Perang Salib untuk mempertahankan pemerintahan Eropa dari desakan pengaruh timur tengah. Seorang ksatria (*knight*) harus selalu bersedia membela keyakinannya setiap kali terjadi pertempuran dalam perang suci. Karena itulah pemerintahan kemudian menjadi di bawah pengaruh keagamaan<sup>7</sup>.

Pada akhir abad 15 timbul berbagai peristiwa yang mengawali proses modernisasi di Eropa. Diawali Renaisans<sup>8</sup> Masa ini ditandai oleh kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran maupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Masa Renaissance bukan suatu perpanjangan yang berkembang secara alami dari abad pertengahan, melainkan sebuah revolusi budaya, suatu reaksi terhadap kakunya pemikiran serta tradisi Abad pertengahan. Renaisans pertama kali diperkenalkan di Eropa Barat, di kawasan Italia. Hal ini dipicu kekalahan tentara salib dalam perang suci. Kekalahan tersebut membuat para pemikir dan seniman menyingkir dari Romawi Timur menuju Eropa Barat. Mereka menyadari telah dimulainya masa mesiu peledak dan untuk menguasai teknologi tersebut mereka harus melepaskan diri

---

<sup>7</sup> id.wikipedia.org

<sup>8</sup> Perkataan "renaisans" berasal dari bahasa Perancis *renaissance* yang artinya adalah "Lahir Kembali" atau "Kelahiran Kembali". Yang dimaksudkan biasanya adalah kelahiran kembali budaya klasik terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno. Namun zaman sekarang hal ini bisa menyangkut segala hal. ( ibid )

dari pengaruh mistisme zaman pertengahan dengan kembali kepada sains zaman klasik yang sebelumnya dilarang karena dianggap pelanggaran terhadap misi ketuhanan. Perkembangan pertama renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausan menjadi penyokong keuangan dengan usaha perdagangan di wilayah Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan seniman memiliki kebebasan besar karena tidak lagi perlu memikirkan masalah keuangan dan mendapatkan perlindungan dari kutukan pihak gereja<sup>9</sup>.

Disusul Reformasi Protestan yang terjadi pada abad 16 yang menuntut pembaharuan terhadap Gereja Katolik Roma. Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang diperparah oleh Pembuangan ke Babel dari Kepausan Avignon, Skisma Besar, dan kegagalan pembaruan oleh Gerakan Konsiliar, pada abad ke-16 mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi (terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembaharu), akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi, karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan Gerakan Konsiliar melahirkan Reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustrasi ini merentang dari nominalisme, ibadah modern, hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkat terhadap kekayaan dan

---

<sup>9</sup> id.wikipedia.org

kekuasaan kaum agamawan elit, membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaisans yang sekuler<sup>10</sup>.

Dalam menganalisa pengaruh Reformasi Protestan terhadap peradaban Eropa, para sejarawan Barat telah menuliskan catatan yang lebih teliti ketimbang yang dilakukan Guizot, bahkan sekalipun dibandingkan dengan yang dilakukan sosiolog besar Jerman, Max Weber. Reformasi Protestan bukan sekadar pencapaian intelektual yang mendorong para penganut agama untuk lebih bertanggung jawab terhadap iman mereka masing-masing. Reformasi Protestan juga merupakan peristiwa politik yang kompleks, yang memicu krisis politik dan kultural yang besar. Pendukung tulen toleransi dalam usia mudanya, seperti terekam dalam *On Secular Authority* (1523), Martin Luther menjadi kurang toleran pada tahun-tahun belakangan. Pecahnya the Peasants War di Jerman tahun 1524 dan meningkatnya popularitas Protestanisme radikal menginspirasi Luther mengambil kesimpulan bahwa otoritas negara memiliki kewajiban bertindak atau menghukum secara tegas para penghujat dan pemberontak agama. Eropa sendiri menyaksikan pecahnya kekerasan massal yang dahsyat dan pembersihan etnik-keagamaan beberapa dekade setelah Reformasi.

Disetujui di wilayah Jerman pada tahun 1555, Perjanjian Augsburg berupaya mengakhiri perang Katolik-Protestan dengan mewajibkan setiap orang dalam setiap teritori mengikuti agama dari raja yang berkuasa di daerahnya. Sambil mengakomodasi pluralisme agama yang sedang tumbuh di Eropa, perjanjian itu juga memperkuat hubungan antara Gereja dan negara, dan mempertebal komitmen para pejabat negara untuk menegakkan ortodoksi

---

<sup>10</sup> *ibid*



keagamaan. Di kedua belah pihak, baik Katolik maupun Protestan Eropa, ribuan pemikir yang (dianggap) menyimpang dikutuk sebagai "orang-orang bidah" dan dieksekusi. Seabad setelah Reformasi juga ditandai dengan serangan yang mengerikan kepada orang Yahudi, juga para pemikir yang menyimpang dan orang-orang eksentrik dari berbagai agama yang secara umum dikenal sebagai "para penyihir". Serangan terhadap orang-orang yang secara sosial dikategorikan eksentrik ini berlangsung dari tahun 1560 hingga tahun 1660 dan mengakibatkan korban jiwa yang lebih parah dari kampanye antibidah. Perkiraan yang konservatif memperkirakan korban jiwa 30.000 orang di Eropa Barat. Namun, perkiraan lain menyatakan jumlahnya tiga hingga empat kali lebih besar dari angka tersebut.

Dari akibat kekerasan Reformasi inilah beberapa penguasa di Republik Belanda, Prusia, Inggris, dan Wales menyimpulkan bahwa di tangan kepentingan politik mereka terletak kekuasaan meminimalkan rangsangan Reformasi menuju purifikasi agama dan untuk mengizinkan para penganut berbagai sekte keagamaan dalam wilayah kekuasaan mereka. Argumen-argumen untuk hal demikian sering kali bersifat pragmatis. Di Prusia, misalnya, raja yang berkuasa mempromosikan multikonfesionalisme (multi ekspresi keberagaman) sebagai metode untuk memikat daya tarik orang-orang kaya dan industri. Di Belanda dan Inggris toleransi terhadap agama minoritas ditegakkan dengan adanya kesadaran yang semakin tumbuh bahwa upaya-upaya negara menegakkan konformitas agama telah mengakibatkan korban jiwa yang dahsyat. Berkat tumbuhnya toleransi pasca-Reformasi dan hilangnya program purifikasi agama yang dipaksakan oleh negara, maka hal itu memungkinkan ilmu pengetahuan Eropa maju dengan pesat,

bisnis berkembang, dan orang dari berbagai latar agama dan etnis hidup berdampingan secara damai<sup>11</sup>.

Pada abad 17, di Perancis terjadi revolusi yang melibatkan para demokrat dan pendukung Republikanisme guna menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan Gereja Katolik Roma dipaksa menjalani restrukturisasi yang radikal. Revolusi ini mengakhiri sistem monarki absolute yang dipegang oleh Napoleon Bonaparte. Adanya ambisi dari kaum Borjuis yang berkembang ditambah kaum petani buruh yang disakiti oleh ide pencerahan mendorong meletusnya revolusi yang mengarah pada konflik pertumpahan darah. Ada beberapa sebab Revolusi Perancis timbul<sup>12</sup>, yaitu :

- Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
- Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan sampai batas tertentu, kaum borjuis.
- Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
- Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
- Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
- Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
- Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
- Kebencian terhadap intoleransi agama.
- Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif

---

<sup>11</sup> Artikel Robert W Hefner, *Protestanisme Islam dan Reformasi Protestan*. Kompas on line. Rabu, 06 April 2005

<sup>12</sup> ibid

Kondisi Revolusiner yang terjadi di Eropa mencapai puncaknya ketika terjadi Revolusi Industri<sup>13</sup> di Inggris pada akhir abad 18<sup>14</sup>. Penemuan – penemuan teknologi baru seperti mesin uap mendorong perubahan sosioekonomi yang ditandai dengan pergantian pekerja dengan mesin – mesin baru seperti dalam industri tekstil. Teknologi ini kemudian terus berkembang yang mendorong penggunaan mesin dalam berbagai jenis industri, mulailah era industrialisasi di Inggris.

### C. Identitas Masyarakat Eropa

Kondisi Eropa khususnya pada abad Pertengahan menggambarkan pengaruh kuat dari Gereja baik dari segi perekonomian sampai pada masalah politik yang digambarkan pada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemerintah. Sepanjang awal abad 15 sampai pertengahan abad 17 Eropa mengalami Revolusi yang merubah segala bentuk pemerintahan sampai pada pengaruh nilai – nilai keagamaan. Diawali dari Renaissance , negara – negara barat mulai meninggalkan agama Kristen yang selama ini menjadi dasar peradabannya dan kemudian dibangun menuju Barat modern diatas warisan Yunani-Romawi klasik. Sejarah baru Barat Modern kemudian ditandai dengan proses sekularisasi atau pemisahan agama dan politik. Peminggiran peran agama

---

<sup>13</sup> Istilah *revolusi* industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19

<sup>14</sup> Penanggalan Revolusi Industri tidak pasti, tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisa dengan Revolusi Industri II dari sekitar 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin kombusi dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.

dalam masalah public affairs dimaksudkan untuk menghindari politisasi agama yang seringkali terjadi.<sup>15</sup>

Pemikiran sekularisme berasal dari sejarah gelap Eropa Barat di abad pertengahan. Saat itu, kekuasaan para gerejawan (*rijaluddin*) demikian mendominasi semua lapangan kehidupan, bahkan termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dogmatisme gereja memasung kreativitas yang tumbuh dikalangan bangsa Eropa yang sedang mengalami masa pencerahan (*renaissance*). Termasuk memberangus hasil-hasil temuan para ilmuwan yang dianggap bertabrakan dengan pendapat gereja dalam ilmu pengetahuan.

Konflik pun berjalan sangat panjang. Seiring dengan dominasi kekuasaan gereja dalam negara yang justru secara riil menyengsarakan masyarakat, para intelektual Eropa berkesimpulan, masyarakat harus dibebaskan dari gereja. Kompromi yang mereka lakukan sampai pada pemisahan agama dari gereja. Inilah cikal bakal sekularisme. Sebagai legitimasi, mereka menukil bunyi kitab suci mereka: "*Berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar dan hak Tuhan kepada Tuhan*" (**Matius 22:21**).

Tercatat ada beberapa faktor yang membuat mereka mulai meninggalkan agama. Dan menariknya, ini semua kurang lebih terjadi di abad yang sama. Pertama, problem di sekitar Yesus atau Isa yang tidak meninggalkan karya tulis sama sekali. Mereka bingung karena, ditangan para "sahabatnya", ajaran-ajaran Isa malah jadi bertentangan satu sama lain dalam banyak masalah pokok. Mereka menduga, ketika berbondong-bondongnya masyarakat Romawi memeluk agama

---

<sup>15</sup> Di ambil dari artikel Saefur Rochmat. Inovasi On Line. Edisi Vol.3/XVII/Maret 2005

Nasrani, hal itu telah mengakibatkan merosotnya baik dasar umum teknologi maupun tingkat umum minat terhadap ilmu pengetahuan (Michael H. Hart, 1982).

Kedua, raja mulai terlibat dalam ketegangan dengan Paus dan dengan kota-kota. Timbul dikotomi antara Raja sebagai penguasa negara dan Paus sebagai penguasa rohani. Kemudian terjadi perdebatan untuk mengeluarkan agama dari kehidupan formal kenegaraan. Negara hendak dibangun atas dasar rasionalitas. Inilah yang disebut sebagai Reformasi Eropa, yang menandai munculnya istilah sekuler dan non-sekuler. Kelak muslim pun terseret akan kesalahkaprahan ini.

Dan yang ketiga, ketidakrelevanan ajaran Gereja. Menurut Gereja, melalui pendeta Ptolomeus, bumi adalah pusat dari semesta (geosentrisme). Namun, menurut Copernicus, paham tersebut sama sekali keliru. Dan dari hasil penelitiannya, ia membantah bahwa bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, melainkan matahari (heliosentrisme). Semenjak itu gereja mengalami guncangan hebat. Dunia ini dan manusia didapati bukanlah pusat. Manusia seakan menemukan dirinya hanyalah puing. Ajaran-ajaran Gereja mulai terlihat usang dan dogmatis. Kaum pendeta itu seakan mendapati dirinya sedang digerogeti dari segenap penjuru, terutama oleh Filsafat-Sains

Dengan pandangan itu Bangsa Eropa melahirkan satu tatanan kehidupan yang bebas dari pengaruh agama Nasrani, yakni ideologi yang kemudian dikenal dengan ideologi Kapitalisme. Dasar ideologi Kapitalisme ini adalah Sekularisme itu sendiri, yakni memisahkan agama dari kehidupan dan negara. Dan kalau mereka melarang agama mengatur negara, bukanlah untuk menjaga netralitas

negara terhadap pluralitas agama —toh agama bangsa Eropa itu satu, Nasrani. Tetapi mereka memang ingin menyingkirkan agama gereja itu dari kehidupan.

Kegagalan sistem pemerintahan yang disusul arus pencerahan yang berusaha untuk kembali pada warisan Yunani-Romawi klasik, memberikan perubahan pada sistem politik Eropa. Mereka kembali pada sistem Demokrasi yang pernah ada pada abad 5 sebelum masehi. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Sekularisme telah merobohkan kekuasaan gereja atas negara. Para filosof sekuler antara lain John Locke, Montesque, dan Voltaire berusaha membangun paradigma baru pemerintahan —setelah menggali filsafat Yunani dan Romawi— yang bakal menjaga kepentingan rakyat. Sebuah pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Mereka menamakan pemerintahan baru itu dengan nama demokrasi (berasal dari kata *demos*= rakyat dan *kratos*= pemerintahan).

Demokrasi sendiri merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yg

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta

demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana)<sup>16</sup>.

#### **D. Globalisasi sebagai sarana transformasi nilai.**

Adanya temuan – temuan baru mendorong Negara – Negara eropa untuk memperluas jalur perekonomiannya. Mereka kemudian melakukan ekspansi keseluruh dunia untuk mencari wilayah baru. Proses inilah yang kemudian diistilahkan sebagai proses mengglobal yang dikenal sebagai Globalisasi. Membicarakan Globalisasi akan melibatkan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam menganalisanya.

Budi Winarno ( 2004: 39 ) yang berangkat dari kaum globalis<sup>17</sup> mencatat ada tiga hal yang sering ditemukan dalam mendefinisikan yaitu kesalinghubungan, integras dan kesalingterkaitan. Masalah kesalinghubungan bisa dilihat dari pendapat Lodge (1991) yang mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang

---

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup>Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. (Cochrane dan Pain ). Di ambil dari Wikipedia Indonesia



lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Sedangkan Amal ( 1992 ) mengemukakan bahwa globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas – batas negara baik ideologi dan lembaga-lembaga politik dunia. Adapaun interdependensi mencakup pengertian bahwa sistem ekonomi, khususnya moneter, dunia saat ini tergantung antara satu dengan yang lain. Akibatnya, kebijakan – kebijakan pada skala nasional tidak dapat begitu saja mengabaikan peristiwa-peristiwa di tingkat global<sup>18</sup>.

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Adi, M. Ramadhan. *Globalisasi: Skenario Mutakhir Kapitalisme*. Bogor. Al Azhar Press. 2005

<sup>19</sup> (id.wikipedia.org )

Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtu. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur<sup>20</sup>.

Perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat dalam arus modernisasi mengarahkan Transformasi nilai – nilai modernisasi juga menyangkut orientasi pada tradisi, adat, norma, agama dan gugusan kepercayaan lainnya yang di bawa oleh arus Globalisasi. Sesuatu yang dulu dikenal sebagai ketetapan eksternal-alami atau kodrati kehilangan daya pembentuknya terhadap tata nilai dan kepercayaan yang sudah lama ada. Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah *dunia yang harus berubah tanpa terkendali* yang ditandai dengan

---

<sup>20</sup> ibid

selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai *zaman transformasi sosial*. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai dunia, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni<sup>21</sup>. Giddens mendefinisikan kondisi seperti ini sebagai dunia yang tunggang-langgang ( Runaway World ). Kondisi yang menyebabkan manusia diarahkan pada satu dimensi nilai yang diakui, "mungkin" inilah yang mengarahkan Marcuse pada satu kesimpulan bahwa manusia hanya dapat berinteraksi lewat satu dimensi ( One Dimensional Man ).

#### **E. Modernisasi di negara – negara ketiga**

Dalam perkembangan selanjutnya, modernisasi diletakkan sebagai upaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal untuk diadopsi negara-negara Dunia Ketiga. Pendekatan pertama dimunculkan oleh Webber yang melihat variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan Dunia Ketiga. Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang meyakini kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi (*the need for achievement*) secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan.

---

<sup>21</sup> ibid

Lewat modernisasi kemudian diperkenalkan tahap-tahap pembangunan politik maupun ekonomi sebagai gerak perubahan yang unilinear dan gradual. Di dalamnya terdapat pemahaman mengenai teori evolusi yang menganalogikan masyarakat sebagai makhluk organik, yang lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Demikian halnya dengan pembangunan politik, yang (telanjur) menjadikan Barat sebagai model puncak modernitas dalam tahap-tahap pembangunan.

Adopsi atas model pembangunan Barat di Dunia Ketiga yang mulai berlangsung pasca-Perang Dunia Kedua, telah memberikan warna tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Hingga hari ini, ternyata modernisasi tak kunjung mampu mengangkat martabat Dunia Ketiga sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Sebaliknya, eksploitasi transnasional yang muncul dalam wujud penanaman modal asing menggeser dan menggantikan bentuk kolonialisme yang semenjak lama dilakukan Barat terhadap Dunia Ketiga. Lewat isu HAM dan demokrasi, Barat memperlakukan Dunia Ketiga tak lebih dari sekadar anak didik yang bisa terus ditekan hingga melampaui batas titik normal. Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya kian terpuruk, bahkan Indonesia khususnya, hampir-hampir mencapai titik nadir kebangkrutan sebagai bangsa, yang dimulai semenjak satu dekade terakhir Orde Baru hingga hari ini.

Kesadaran Dunia Ketiga mulai muncul dipelopori negara-negara Amerika Latin. Prebisch, Gunder Frank, dan Cardoso, adalah tiga nama yang mempopulerkan semangat kemandirian Dunia Ketiga dalam menghadapi negara maju. Bagi mereka, tak ada jalan selain bahwa Dunia Ketiga harus dipaksa masuk dalam percaturan dinamika industri di tingkat dunia. Hal inilah yang

menginspirasi Indonesia dan sebagian besar negara Dunia Ketiga lainnya yang berdampak pada munculnya ideologi pembangunanisme di samping ideologi formal yang telah ada. Manusia tak ditempatkan sesuai dengan kemanusiaannya, melainkan tak lebih sebagai robot-robot pembangunan pelengkap instrumen kapitalisme berskala nasional.

Agak berbeda dari negara-negara kapitalisme Barat yang telah lebih dulu memasuki industrialisasi, Dunia Ketiga memiliki logikanya tersendiri dalam menciptakan masyarakat industri. Di Dunia Ketiga, kebijakan industri justru muncul sebagai inisiatif negara, bukan masyarakat. Bila di Eropa dan negara-negara Barat lainnya industrialisasi berdampak pada demokratisasi politik, maka sebaliknya, kondisi obyektif Indonesia dan Dunia Ketiga lainnya, pasca-industrialisasi justru menampilkan wajah lain berupa terbentuknya pemerintahan otoriter yang secara sepihak menempatkan pembangunan sebagai basis ideologi negara dengan membunuh dimensi humanitas masyarakat, dan sekadar menjadikannya sebagai obyek pembangunan.

Hingga akhir tahun 1983, seiring dengan jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang membawa perekonomian Indonesia kian surut, tersadari bahwa ketika pembangunan telah diposisikan sebagai ideologi sesungguhnya pembangunan telah memberikan dampak berupa tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan bahkan, pada tingkat tertentu pembangunan telah berganti kelamin menjadi kekerasan itu sendiri.

Di Indonesia yang termasuk dalam kategori negara ketiga sekaligus negara dengan penganut Islam terbesar, proses modernisasi dilakukan dengan sangat efektif oleh kekuasaan pemerintah orde baru. Orientasi pembangunan –

khususnya dibidang politik- Orde Baru menghendaki terciptanya tatanan yang dapat mendukung terciptanya sistem yang kuat, stabil dan demokratis. Strategi ini berangkat dari kegagalan Orde Lama dalam menjaga stabilitas baik politik, ekonomi maupun sosial sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pertumbuhan ekonomi yang mendapatkan prioritas dari pemerintahan Orde Baru telah melepaskan manusia dari kemanusiaannya. Politik menjadi barang tabu bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang dibenarkan oleh pemerintah. Itu pun tak lepas dari bentuk-bentuk korporatisme negara. Ideologi selain Pancasila dan pembangunan menjadi barang haram yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan jiwa para penganutnya. Tak terhitung jumlah korban kemanusiaan yang harus jatuh atas nama pembangunan dan kepentingan nasional dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.

Sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, kebijakan yang dibuat pemerintahan Orde Baru secara oposisional berhadapan dengan dimensi lain dari kepentingan masyarakat. Pemerintah secara sistematis menjustifikasi kejahatan kemanusiaan atas nama pembangunan, dan mengusir rakyat dari rumahnya sendiri melalui stigmatisasi penghambat pembangunan. Derita yang diperoleh rakyat menemukan korelasi positifnya seiring dengan kian meningkatnya akselerasi pemerintah dalam mengkampanyekan ideologi pembangunan.

Dalam bidang Politik, Hikam mencatat, Orde Baru melakukan restrukturasi politik yang menghasilkan format politik baru yang memiliki ciri-ciri umum; *pertama* munculnya negara sebagai aktor atau agen otonom yang

posisinya "mengatasi" –berada atau perposisi di atas- masyarakat yang sebetulnya merupakan asal –usul eksistensinya, kedua menonjolkan peran dan fungsi birokrasi serta teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, politik dan ekonomi, ketiga semakin terpinggirkannya sektor-sektor populer dalam masyarakat termasuk kaum intelektual, keempat diterapkannya model politik eksklusiver melalui jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politik dan yang kelima penggunaan secara efektif hegemoni ideologi untuk memperkuat dan meletakkan legitimasi sistem politik<sup>22</sup>

Di titik inilah kemudian terjadi diskoneksitas yang gamang antara kehendak pembangunan dengan ekspektasi kaum pekerja yang sesungguhnya menjadi *core* dalam proses pembangunan. Yang dengan posisinya semacam ini, seharusnya menjadi dominan dalam pembangunan ekonomi dan politik dalam melahirkan sebuah kebijakan.

Hirschman, mengatakan bahwa "Harus ada konfrontasi yang cukup lama antara manusia dengan situasi, sebelum sebuah kreativitas atau solusi lahir." Ungkapan tersebut menarik, karena sejumlah varian yang mempengaruhi kondisi-kondisi obyektif suatu bangsa memang berbeda dari bangsa lainnya. Perbedaan itu pula yang akhirnya membawa dampak perbedaan dalam orientasi pembangunan di setiap negara. Yang menjadi penting dalam konteks ini adalah penghargaan atas situasi kultural yang secara subyektif menjadi penentu paling signifikan atas keberhasilan pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan, maka penghargaan atas kemanusiaan dijunjung tinggi. Dan sebaliknya, menempatkan manusia-manusia pembangunan dengan sebutan SDM

---

<sup>22</sup> Dikutip dari Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, LP3ES, 1999

(sumber daya manusia) harus segera dieliminasi, karena telah terjebak dengan menempatkan manusia sebagai faktor produksi yang tak berbeda dari faktor-faktor produksi lain yang tak memiliki "nilai kemanusiaan".

Pembangunan yang dikampanyekan pemerintah tak seharusnya dimanifestasikan sebagai reduksionisme atas humanitas yang selayaknya dihormati. Pembangunan yang berorientasi kemanusiaan adalah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan dan kebebasan mengaktualisasikan diri sebagai variabel utama pembangunan. Dengan menghindari keterjebakan dari semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengejar setinggi-tingginya penanaman modal asing. Namun, bermuara pada tergadainya *core* kebangsaan melalui aliansi segitiga antara kelompok-kelompok feodal, birokrasi, dan kapitalisme internasional.

Semangat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, *an sich*, terbukti tak cukup mampu memenuhi kebutuhan substansial masyarakat. Bahkan pada tingkat tertentu, sebenarnya, masyarakat bersedia untuk hidup menempuh kesulitan di awal pembangunan. Asalkan hal yang sama juga dilakukan oleh elite-elite pemerintahan yang sewajarnya memberikan keteladanan politik. Tak masalah bagi rakyat untuk membangun perekonomian dari bawah, asal pemerataan dapat dilangsungkan<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Di ambil dari artikel Agus Haryadi, *Kemanusiaan, Teori Modernisasi, dan Dependensi*



### **BAB III.**

## **Identitas Partai Keadilan Sejahtera Dalam Sejarah Indonesia**

### **A. Identitas Islam dalam sejarah Indonesia**

Sejarah Bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pasang –surutnya Gerakan-gerakan yang beridentitaskan ke-Islam-an. Mulai dari jaman penjajahan sampai pada era Reformasi yang menuntut kemampuan adaptasi sosial dalam mempertahankan Identitas kelompoknya. Deliar Noer menyebutkan bahwa gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia tidak terpatok pada satuan tahun, melainkan, biasanya mengandung proses awal atau akhir yang menyebar dalam jangka waktu yang relatif lama. Pada masa penjajahan Belanda, peran kelompok-kelompok Islam sangat besar dalam mencapai kemerdekaan. Diawali oleh Sarekat Islam yang di pelopori H.O.S. Tjokroaminoto (1883-1934) yang merupakan modifikasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tanggal 11 November 1911 oleh H. Samanhudi. Pergeseran dari Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) didorong oleh keterlibatan para pejuang dalam struktur organisasi sehingga tujuan semula adanya persamaan hak di bidang perdagangan bagi kalangan bangsa Indonesia berubah menjadi tujuan politik dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam merupakan gerakan politik Islam Modern pertama yang ada di Indonesia<sup>1</sup>.

Latar belakang Tjokroaminoto berpendidikan barat, namun wawasan komitmen dan kekentalannya terhadap Islam sangat luar biasa. Bahkan menurut syafii Maarif, Tjokroaminoto adalah orang pertama yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Islam mampu menjadi faktor pengikat dan simbol nasional, menuju kemerdekaan yang sempurna bagi rakyat Indonesia. Tjokroaminoto berusaha membangkitkan Islam sebagai motivasi gerakan agama dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan ras, suku dan kepentingan ke dalam SI. Karena beridentitaskan Islam inilah, maka SI mengarah kepada indikasi gerakan Pan Islamisme, Sebagai mana Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani.

Tjokroaminoto menunjukkan integritas yang tinggi akan obsesi kemerdekaan yang dikumandangkannya. Kebenciannya terhadap pemerintah Belanda membuatnya mengundurkan diri menjadi pegawai pemerintah Belanda pada tahun 1934. Tjokroaminoto mempunyai cita-cita mendirikan negara Islam yang bebas dan merdeka dari tekanan penjajah Belanda. Tujuan besar yang kemudian menarik banyak simpatik dari kalangan intelektual –seperti H. Agus Salim yang kemudian bergabung ke SI dan menjadi salah satu tokoh kunci.

Perkembangan SI semakin membesar dan membahayakan bagi pemerintah Belanda. Di Jawa, bagi kebanyakan kaum awam SI dianggap sebagai gerakan *Ratu Adil*, seperti yang ditulis A.P.E. Korver tentang eksistensi SI yang menjadi tumpuan harapan bagi sebagian besar rakyat Indonesia di pulau Jawa agar mampu membangkitkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Pada kongresnya di Batavia tahun 1917, SI mengumumkan aklamasi tuntutan kemerdekaan atas Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Dengan kekuatan serta dukungan rakyat yang luas memberikan ancaman yang serius terhadap pemerintahan kolonial. Gubernur Jenderal Idenburg memberikan antisipasi dengan memasukkan ideologi Marxisme ( Komunis ) ke dalam tubuh SI. Muncullah tokoh – tokoh SI yang berhaluan komunis seperti Semaun, Alimin

dan lainnya. Dengan dukungan dari H.J.F. Sneevliet yang merupakan pendiri *Indische Social Democratische Vereeniging* ( ISDV ) –pada tanggal 23 Mei 1920 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia ( PKI )- , tokoh – tokoh SI yang berhaluan komunis mampu merubah SI menjadi lemah yang kemudian memunculkan istilah SI Merah.

Drs. Abdul Sani menganalisa kegagalan SI dalam spirit politik-kenegaraan Islam, yaitu;

1. SI kekurangan makna terdalam dari inti penjiwaan terhadap khazanah pemahaman Islam. Hal ini yang membuat mereka menerima ide-ide sosialisme yang dibangkitkan kalangan Komunis. Selain itu, SI kurang teguh dalam menancapkan pendirian politik-kenegaraan yang murni dijiwai Islam, sehingga nilai – nilai komunis yang berseberangan diterima begitu saja.
2. Dualisme pemikiran kenegaraan antara nilai Islam dan ide-ide sosialisme-marxis.
3. Tidak adanya tokoh yang mampu mempersatukan SI sepeninggal Tjokroaminoto.

Setahun kemudian berdiri Muhammadiyah tepatnya 18 Dzulhijjah 1330 H / 18 Desember 1912, Muhammadiyah resmi didirikan di Yogyakarta yang didirikan oleh Ahmad Dahlan (1868-1923) . Dahlan merupakan salah satu murid Syaikh Ahmad Khatib, yang juga guru Hasyim Asy'ari (Ketua NU pertama). (Ensiklopedi Muhammadiyah, 2005:250-251). Dahlan juga pernah aktif dalam orgainsasi kepemudaan Budi Utomo pada tahun 1909, ia bertugas mengajarkan agama Islam. Organisasi ini mempunyai karakter tersendiri sebagai gerakan

sosial keagamaan yang mengkhususkan pada permurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan.

Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat dan takayul. Inti gerakan pemurnian ajaran Islam seperti penadahulunya, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab menjadi rujukannya. Ide-ide baru yang ada dalam Muhammadiyah tidak mempengaruhi penderian ereka dalam upaya menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai Al Qur'an dan Sunnah, menggunakan ijtihad intelektual bila sumber – sumber hukum yang lebih tinggi tidak bisa digunakan lagi, termasuk juga menghilangkan taklid dalam praktik fiqih dan menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar.

Karakteristik gerakan Muhammadiyah yang koperatif serta menjauhkan diri dari komitmen politik praktis menyebabkan Muhammadiyah relatif aman dari interfensi penguasa mulai dari jaman penjajah sampai sifat represif orde baru. Begitu juga kalangan elit dan kelas sosial menengah ke atas, merasa gerakan Muhammadiyah mempunyai tingkat pengalaman praktis dan penguasaan terhadap ajaran Islam.

Eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berprioritaskan pendidikan serta kemandirian ekonomi umat sampai sekarang masih terlihat dengan berdirinya sekolah – sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain berdirinya Rumah Sakit sampai lembaga keuangan Islam ( Bazis ) sebagai bentuk kemandirian ekonomi umat.

Pada awal tahun 1925 di Yogyakarta berdiri *Jong Isamieten Bond ( JIB )* atau Ikatan Pemuda Islam yang diketuai oleh R.J. Sjamsuridjal yang merupakan ketua *Jong Java*. JIB dilatarbelakangi adanya kegeliasahan intelektual bagi

kalangan pemuda terpelajar yang berpendidikan keislaman taat. Adanya tuntutan kesadaran beragama dikalangan mereka, kendati sebagian diantara mereka berpendidikan Barat.<sup>2</sup> Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh JIB yaitu mempelajari Islam dan menganjurkan agar ajaran – ajarannya dilaksanakan seta mengembangkan rasa simpati terhadap Islam dan para pengikutnya, disamping menunjukkan sikap toleran positif terhadap pemeluk agama lain<sup>3</sup>.

Agus Salim merupakan tokoh yang berada dibalik berdirinya JIB, dimana beliau yang menyadarkan para pemuda terpelajar untuk berhimpun dalam suatu garis perjuangan keIslaman. Banyak tokoh yang lahir dari JIB, Syaffi Ma'arif menjelaskan bahwa JIB merupakan "pabrik" bagi tokoh nasional seperti M. Natsir, Kasman Singodimejo, A.R. Baswedan dan tokoh pergerakan Islam lainnya.

*Nahdhatul Ulama* ( NU ) didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 yang semula hanya berupa kepanitiaan yang bernama *Komite Merembuk Hijjaz. Jam'iyah* ini dilatarbelakngi keprihatinan kalangan pesantren atas kondisi Hijaz, yang waktu itu terjadi penggulingan kekuasaan Syarif Husain oleh Abdul Azis bin Sa'ud –yang beraliran Wahabi. Pemerintah baru itu merencanakan pertemuan internasional (umat Islam) di Makah. Indonesia mendapat undangan pertemuan itu, dan direspon pada saat Kongres Al Islam ke-4 (Agustus 1925) di Yogyakarta. Dinasti Sa'ud dikenal anti mazhab-keagamaan dalam Islam dan telah menghancurkan peninggalan-peninggaan sejarah Islam di Arabia. Karena itu, kalangan pesantren yang diwakil Wahab Hasbullah keberatan dengan kebijakan Sa'ud itu. Melalui delegasi Indonesia itu, Wahab bermaksud

---

<sup>2</sup> Sani, Drs. Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam* . Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1998

<sup>3</sup> *Ibid*,

mengajukan pembelaan agar pengajaran mazhab di Tanah Suci tak dilarang oleh penguasa Hijaz, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada tetap dibiarkan berdiri (Dharwis 1994: 176). Namun, aspirasi kalangan pesantren ini mendapat penolakan yang sengit dari kelompok Islam lainnya –yang mengikuti Kongres Al Islam. Tidak terakomodirnya aspirasi itu, memicu kalangan pesantren untuk menyampaikan sendiri aspirasinya, dan membentuk Komite Merembuk Hijaz yang kemudian berganti nama menjadi Nahdhatul Ulama ( NU ).<sup>4</sup>

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri serta ketua NU yang pertama kali. K. H. Hasyim Asy'ari lahir tanggal 14 Pebruari 1871, beliau tumbuh besar dikeluarga Kiai yang sangat kental dengan ajaran agama Islam-Tradisional. Beliau termasuk kiai kharismatik di pulau Jawa yang pernah menempuh pendidikan di Mekkah berguru dengan Syaikh Ahmad Khatib dan kemudian mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.

Selain Hasyim Asy'ari, tokoh dibalik berdirinya NU adalah K. H. Abdul Wahab Hasbullah yang lahir di Jombang pada tahun 1888 yang masih memiliki pertalian darah dengan Hasyim Asy'ari. Selain beliau juga ada K.H. Bisri yang di Jawa Tengah pada tahun 1887 yang merupakan saudara ipar dari Abdul Wahab, yang kemudian mendirikan pesantren di Den Anyar.

NU merupakan gerakan Islam yang berbasiskan kelompok tradisional sehingga pengikutnya kebanyakan orang – orang yang tinggal di daerah – daerah pedesaan. NU pernah terlibat aktif dalam politik praktis pada tahun 1952 dan

---

<sup>4</sup> Dalam *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, Deliar Noer menggolongkan NU sebagai gerakan yang timbul sebagai reaksi tumbuhnya gerakan pembaharuan (moderen). Sekilas, penggolongan ini memiliki legitimasi yang kuat, dan memang –sebagaimana telah diterangkan di atas- NU didirikan sebagai kelanjutan Komite Merembuk Hijaz. Tapi, dengan melihat ke-pesantren-an di Indonesia, Komite Merembuk Hijaz bukanlah pijakan dasar NU, melainkan sebagai momentum. Pesantren yang memiliki hubungan geneologis dengan pesantren lainnya, dan memiliki jaringan yang kuat –karena tradisi kekerabatan antar kyai, adalah pijakan dasar *jam'iyah* NU. Jadi, secara sosial, perintisan gerakan ini sudah dimulai sejak pesantren itu didirikan ( di kutip dari Skripsi M Arwan Rosyadi ” Tafsir Sosial Jihad. ” Universitas Airlangga. Surabaya. 2006.

pernah bergabung dalam Masyumi sebelum memutuskan untuk kembali ke khitohnya sebagai gerakan sosial.

Era Reformasi memberikan angin segar bagi gerakan – gerakan keagamaan untuk kembali aktif dalam takaran politik praktis, termasuk NU yang kembali terjun dalam politik pada tahun 1998 dengan menbidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Strategi pergerakan NU hampir sama dengan Muhammadiyah yang cenderung kooperatif dan mengkhususkan diri pada aspek pembinaan umat lewat pondok – pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sepanjang sejarahnya NU tidak lepas dari konflik – konflik internal yang hampir menyeretnya dalam perpecahan. Kondisi yang sampai sekarang masih terjaga dimana peran ulama – ulama senior seperti Kiai – kiai sepuh dalam menjaga stabilitas internal sampai sekarang masih mampu mengurangi gesekan – gesekan yang terjadi, yang ditimbulkan oleh arus gelombang bawah yang berusaha membawa NU dalam wajah baru pergerakan Islam di Indonesia.

Masyumi ( Majelis Syura Muslimin Indonesia ) didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Berbeda dengan organisasi – organisasi Islam sebelumnya, Masyumi menginginkan adanya keterikatan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Latar belakang tersebut mengarahkan Masyumi untuk aktif dalam aktifitas politik. Kondisi sosial politik di Indonesia pada waktu itu dimana pemerintahan ditenpati oleh golongan nasionalis sekuler dan PKI, menjadikan Masyumi sebagai partai alternatif yang beridentitaskan Islam.

Dalam keanggotannya, Masyumi mampu menampung semua kalangan baik dari ulama tradisional, kelompok modernis sampai masyarakat umum dari semua

lapisan dan wilayah. Para tokoh dari pulau Jawa sangat antusia mendukung partai umat islam ini. Sebagai gambaran dalam tubuh Masyumi terdiri dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah sebagai kalangan modernis dan Nahdhatul Ulama dalam kelompok tradisionalnya, yang memiliki masa banyak di seluruh Indonesia khususnya pulau Jawa.

Sebagai partai politik Islam, Masyumi tetap konsisten dengan tujuan-tujuan idealisme yang bermuara kepada cita-cita Islam. Dalam Anggaran Dasarnya, Masyumi bertujuan untuk mewujudkan bentuk negara yang memiliki masa depan dan menegakkan citra ajaran Islam bagi umatnya.

Secara struktur organisasi masyumi memiliki dua jalur badan yang mengurus organisasi, pertama badan *Eksekutif* yaitu bergerak dalam basis kekuatan politik dan *Dewan* yang bergerak dalam urusan – urusan keagamaan<sup>5</sup>. Badan eksekutif ditempati oleh kelompok – kelompok modernis sedangkan Dewan ditempati oleh kalangan tradisional yang mayoritas kiai dari Nahdhatul Ulama. Ketimpangan peran inilah menyebabkan perpaduan yang bersifat labil mengarahkan Masyumi pada perpecahan dengan diawali pada tahun 1947 salah satu unsur Masyumi yaitu PSII ( Partai Syarikat Islam Indonesia ) keluar dan kembali menjadi partai independen, kemudian tahun 1952 NU juga memutuskan keluar dan menjadi partai sekaligus kembali menjadi *Jam'iyah*.

Ketidak mampuan Masyumi dalam menjaga eksistensinya dikarenakan adanya tarik menarik kepentingan dalam internal organisasi. Masyumi tidak mampu memperhitungkan adanya konflik internal yang berujung pada perpecahan kelompok. Kegagalan yang mengalami sejarah Sarekat Islam yang juga

---

<sup>5</sup> *ibid*



mengalami perpecahan dikarenakan konflik kepentingan yang terjadi dalam internal tubuh organisasi.

Fenomena yang menarik jika melihat perkembangan gerakan – gerakan Islam tersebut, ketidakmampuan gerakan – gerakan tersebut dalam melakukan adaptasi dengan kondisi sosial yang ada serta sifat yang "terlalu" kooperatif mengarahkan gerakan tersebut pada kemunduran yang sangat signifikan. Pada masa orde baru yang sangat represif mengakibatkan gerakan – gerakan keagamaan tidak memiliki ruang untuk berakifitas, mulai dari fusi Partai sampai pemberlakuan azas tunggal. Kelompok – kelompok yang lebih kooperatif dengan pemerintah mendapatkan ruang dalam aktifitasnya sedangkan kelompok – kelompok yang lain mengalami pembubaran. Meletusnya reformasi memberikan angin segar bagi gerakan – gerakan keagamaan yang selama ini harus berada pada tataran bawah tanah untuk kembali bermunculan. Adanya pengaruh global dari pergerakan – pergerakan di negara-negara Arab memberikan warna baru bagi gerakan – gerakan identitas keagamaan.

Tabel. Pasang Surut Perjalanan Politik Umat Islam Indonesia

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1911	Sarekat Dagang Islam ( SDI )	Pada tahun 1912 berubah menjadi Sarekat Islam ( SI ), kemudian SI berubah menjadi ormas komunis dan pada tahun 1916 mendesak nama baru menjadi Sarekat Idjo
1912	Partai Sarekat Islam Indonesia ( PSII ) berdiri	Berasal dari Sarekat Dagang Islam ( SDI ) 1911 dan Sarekat Islam ( SI )
1912	Muhammadiyah berdiri	Bergerak di bidang dakwah dan pendidikan
1925	Berdiri Jong Islameten Bond	Menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan
1926	Nahdhatul Ulama berdiri	Keluar dari Masyumi tahun 1952 karena merasa dikhianati dari kesepakatan

		semula, yaitu hanya ada satu parpol Islam
1930	Perti berdiri	Pada tahun 1945 Perti memutuskan jadi parpol
1937	Pembentukan Majelis Isla A'la Indonesia ( MIAI )	Awalnya dari tujuh organisasi kemudian berkembang menjadi 21 organisasi , tanpa NU karena banyak tidak setuju dengan SI
1945	Pembentukan Masyumi	Gabungan dari empat organisasi : Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, Persatuan Umat Islam. Dibubarkan pada 13 September 1960 sebagai parpol dan dibangkitkankembali pada 28 Agustus 1968
1947	PSII dibentuk	Pembentukan setelah pisah dari Masyumi
1949	Al Jamiyatul Wasliyah dan Al Ittihadiyah bergabung dengan ke Masyumi	Hubungan Yogya dan Sumut secara politis pulih
1949	Persatuan Islam ( Persis )	Hubungan Yogya dan Sumut secara politis pulih
1951	Muhammadiyah dan NU bersatu	Bergabung menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia
1966	Pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia ( PPDII )	Namun gagal karena tidak banyak kecocokan
1967	Rehabilitas Masyumi	Gagal karena tidak disetujui Orde Baru
1968	Muslim Indonesia berdiri	Namun perjalannya tidak mulus
1971	Eliminasi mantan tokoh Masyumi dalam Parmusi	Terjadi konflik internal sehingga mengeliminir tokoh yang tidak akomodatif terhadap pemerintah.
1973	Partai Persatuan Pembangunan terbentuk	Fusi dari empat parpol Islam : NU, MI, Perti dan PPP
1990	Badan Cendikiaawan Muslim Indonesia ( ICMI ) berdiri	Dimotori oleh BJ Habibie
1995	Masyumi Baru berdiri	Dideklaraikan sebagai parpol pada 20 Januari oleh mantan pengurus PPP : Najib Simanungkalit dan Azis Harahap
1998	Partai Kebangkitan Bangsa berdiri	Representasi dari Nahdatul Ulama, di prakarsai oleh Gus Dur yang merupakan tokoh sentral NU dan berasaskan Nasionalis
1998	Berdiri Partai Amanat Nasional	Mengklaim representasi dari Muhammadiyah tetapi berazaskan Nasionalis, didirikan oleh Amien Rais yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah

1998	Berdiri Partai Umat Islam ( PUI )	Dipimpin oleh Prof. Dr. Deliar Noer
1998	Berdiri Partai Kebangkitan Umat ( PKU )	Didirikan oleh tokoh NU yang tidak sejalan dengan PKB. Waktu pendirian tidak lama setelah PKB terbentuk.
1998	Berdiri PSII	Dideklarasikan kembali setelah lepas dari fusi PPP
1998	Berdiri PSI-1905	Mengacu pada akar sejarah PSI dan SDI 1905
1998	Berdiri Partai Umat Muslim Indonesia ( PUMI )	Partai Islam baru berasaskan Pancasila
1998	Berdiri Partai Keadilan ( PK )	Partai baru berasaskan Islam, cikal bakal perjuangan Hasan Al Banna
1998	Berdiri Partai Bulan Bintang ( PBB )	Partai baru yang mengklaim pengikut Masyumi (muda) menamakan diri Keluarga Bulan Bintang
1998	Stembus Accord disepakati	Gabungan delapan parpol Islam peserta Pemilu
1999	Tabligh Akbar di Monas	Usulan parpol Islam bersatu dan tokoh Islam menggugat, namun Gus Dur menganggapnya sebagai upaya menggoyang kekuasaannya
2002	Berdiri Partai Keadilan Sejahtetra	Metamorfosis dari Partai Keadilan ( PK ) yang tidak lolos <i>Electroal Treshold</i> pada Pemilu 1999
2006	Bediri Partai Kebangkitan Nasionalis Ulama ( PKNU )	Berdiri setelah terjadi konflik kekuasaan ditubuh PKB pimpinan Muhaimin Iskandar dan Choirul Anam
2006	Berdiri Partai Matahari Terbit	Diusulkan oleh Barisan Muda Muhammadiyah yang tidak puas terhadap Partai Amanat Nasional ( PAN )

Sumber Sabili: Sabili No. 18 th VII 23 Februari dan diolah dari sumber lainnya

### **B. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan manifesto dari Partai Keadilan ( PK ) yang pada Pemilu 1999 tidak lolos *Electroal Treshold* hanya memperoleh 1,4 juta suara ( 7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten ). Partai Keadilan Sejahtera berdiri pada 20 April 2002,

bertepatan dengan 7 shafar 1423 H<sup>6</sup>, dengan Ketua umum Drs. Muzzamil Yusuf yang kemudian pada menetapkan Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan digantikan oleh Tifatul Sembiring setelah beliau mengundurkan diri dikarenakan jabatan rangkapnya sebagai Ketua MPR-RI periode 2004-2009.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan satu diantara 24 kontestan pemilu 2004, yang juga termasuk kedalam kategori 6 partai yang beraliran Islam yang mendapatkan kursi di DPR-RI. Pada Pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera mampu menyedot banyak pakar akan keberhasilannya menembus peringkat 6 dengan jumlah perolehan suara 8.325.020 atau sekitar 7.34% dari jumlah pemilih total yaitu 113,462,414 suara, mampu mengungguli Partai berbasis Islam lainnya seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang pada Pemilu 1999 yang lalu lolos Electoral Threshold.

Hasil Pemilu 2004 mencerminkan akan keberhasilan menarik simpatik para pemilih dengan pendekatan – pendekatan yang elegan lewat pencitraan partai yang Bersih, Reformatif, Anti KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), serta Cerdas dan Bermatabat. Kenaikan suara yang signifikan tersebut, menempatkan PKS sebagai Rising Star pada Pemilu 2004 bersama Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Secara Struktur Partai Keadilan Sejahtera memiliki tingkat – tingkatan yang berbeda dengan partai – partai politik yang ada di Indonesia. Dalam

---

<sup>6</sup> Aay M. Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera*, Teraju, Jakarta, 2004, hal.291

pembentukannya sangat kental dengan identitas – identitas keagamaan yang dipakainya, mulai dari jenjang struktural sampai penggunaan istilah – istilah yang mencirikan sebagai partai dengan basic Islamis-Modern. Ditingkat pusat terdiri dari Majelis Syuro yang merupakan lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga *Ahlul Halli wal-Aqdi*. Majelis Pertimbangan Partai yang merupakan lembaga pelaksana harian. Kemudian Dewan Syari'ah yang berfungsi sebagai lembaga fatwa dan qadha yang bertuigas merumuskan landasan syar'i terhadap segala kebijakan partai. Dewan Pimpinan Pusat merupakan lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Departemen – departemen yang diperlukan.

Ditingkat wilayah khususnya di Jawa Timur secara umum struktur partai mengikuti struktur partai pusat seperti Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah dengan Bidang – bidang kelengkapan seperti Bidang Pembinaan Wilayah yang membawahi beberapa Dewan Pimpinan Daerah yang dibagi dalam Wilayah Dakwah ( WilDa) , Bidang Kewanitaan, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri & Tenologi serta Bidang Pembinaan Pemuda.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai basis pendukung kaum intelektual muda muslim, memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri

yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera ( PI-PKS) dan memiliki kurang lebih 300.000 kader diseluruh tanah air<sup>7</sup>.

Partai Keadilan Sejahtera meyakini dirinya partai Da'wah yang secara tegas menyatakan Islam sebagai azas Partai yang tersirat dari visi dan misi partai yang ingin diwujudkan. Pemahaman Islam yang seperti itu, membawa implikasi perjuangan Islam melalui wahana politik. Karena melandasi perjuangan partai dengan Islam, maka prinsip Islam itu diterjemahkan dalam partai, dan mendedikasikan dirinya sebagai Partai Dakwah, dengan prinsip-prinsip kebijakan sebagai berikut:

*Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.*

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

---

<sup>7</sup> [www.pk-sejahtera.org](http://www.pk-sejahtera.org)

### **1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)**

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

### **2. Al-Ishlah (Reformatif)**

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

### **3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)**

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

### **4. Al-Wasathiyah (Moderat)**

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyriyah (perundang-undangan) harus merefleksikan pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

### **5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)**

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur'an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

## **6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)**

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

## **7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)**

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektifnya.

## **8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)**

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

## **9. Al Hulul (Solusi)**

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

## **10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)**

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai



pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge-nyangping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

#### 10. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Prinsip – prinsip kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari – hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK, dan Hukum, dapat dijelaskan dibawah ini;

##### 1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT ; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip
  - Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,
  - Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan ijtihad.
  - Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

##### 2. Politik

1. Pembangunan sistem  
 Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
2. Pembangunan komunikasi politik  
 Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau

berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.

1. i. Penysadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
2. ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan masyarakat
3. Pembangunan budaya politik
  1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik
  2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik
  3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik
  4. Mengembangkan budaya hisbah.
4. Pembangunan partisipasi politik
  1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela.
  2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.
5. Hubungan eksternal  
Pola ta'awun alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisasikan kebajikan dan taqwa), dan tidak ta'awun alal ismi wal udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.
  1. Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri.
  2. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
  3. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam
  4. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.
6. Pemilu 2004  
Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpolitical semakin luas. Di sisi lain, diterapkannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
  1. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
  2. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera
  3. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
  4. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.
  5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
  6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

### 3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini:

- Pertama : kebobrokan di semua sektor,
- Kedua : menjadi sarang KKN, dan

- Ketiga : tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan islah al-hukumah dengan kebijakan:
  1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
  2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.
  3. Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
  4. Melakukan kontrol secara aktif.

#### 4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Kemandirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi.
2. Membangun kekuatan ekonomi umat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat.
3. Memelihara kekayaan umat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam.
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh umat.
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

#### 5. Sosial Budaya

Kecenderungan membiarknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberantasan, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.
2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian.
3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.

#### 6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat mengenai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan

teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang IPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.
2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.
3. Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM umat.
4. Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi umat dan bangsa.

#### 7. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat.
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

#### 8. Hukum

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional
3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya
4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

#### 9. Pendidikan:

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidikan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.
2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan.
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

Interaksi dengan realitas sosial yang ada mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera untuk mempertahankan identitasnya disamping memperluas pengaruhnya. Acuan ini tercantum dalam strategi umum partai yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal.

#### 1. Konsolidasi Internal.

1. a. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:
  1. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan.
  2. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan.
  3. Menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader.
  4. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah.
2. b. Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syi'ar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik :
  1. Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi.
  2. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya.
  3. Mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader.
  4. Mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial.
3. c. Konsolidasi internal untuk menata perubahan :
  1. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wah nya.
  2. Meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya.
  3. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya.
4. d. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM: Mengingat tantangan masa depan da'wah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:
  1. Melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan ke depan.
  2. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah.
  3. Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan.
  4. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.

#### 2. Ekspansi Eksternal

1. a. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial:
  1. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis.
  2. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.

3. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi.
2. b. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:
  1. Menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis.
  2. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
  3. Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah.
3. c. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:
  1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak.
  2. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal.
  3. Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam.
  4. Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis.
4. d. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:
  1. Menguatkan dukungan sosial dan politik.
  2. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
  3. Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
  4. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.
  5. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
  6. Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia.
  7. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.

### C. TARBIYAH sebagai penyokong pergerakan

Partai Keadilan Sejahtera sebagai kelanjutan dari Partai Keadilan merupakan transformasi dari Gerakan Tarbiyah.<sup>8</sup> Gerakan Tarbiyah mulai dirintis tahun 1980-an di kampus-kampus umum.<sup>9</sup> Sampai saat ini, siapa pendiri gerakan ini masih “misterius”. Kerahasiaan pendiri itu merupakan akibat dari penerapan konsep *sirriyatut-tandhim* (struktur organisasi rahasia) yang diterapkan Tarbiyah sejak awal berdirinya (1980) hingga terbentuknya Partai Keadilan. Penjagaan kerahasiaan ini nampaknya juga sebagai penanaman ajaran bagi kader-kadernya agar kuat memegang nilai dan sistem, dan tidak taklid pada figur dan formalitas.

<sup>8</sup> Lihat Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 th Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

<sup>9</sup> Sejarah yang lebih detail tentang Gerakan Tarbiyah dapat dilihat di Damanik (2002), Furkon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004, dan Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera : Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Jakarta: Harakatuna, 2005.

Menurut Aay Muhammad Furkon, aktivis Tarbiyah merupakan buah misi Dewan Dakwah (M. Natsir) dari kaderisasi yang dilakukan di akhir 1960-an (Furkon, 2004 : 281). Namun analisa ini berbeda dengan Ali Said Damanik, Tarbiyah merupakan gerakan yang lepas dari DDII, buktinya, pasca reformasi DDII membentuk Partai Bulan Bintang, sementara Tarbiyah bertransformasi dalam Partai Keadilan.

Pembaharuan Tarbiyah, Menurut Rofi' Munawwar, mantan Ketua DPW PKS Jawa Timur, masuk ke Indonesia sekitar 27 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya, pada masa kemerdekaan *tarbiyah* pernah akan diterapkan di Indonesia :

Pada masa kemerdekaan dulu, *tarbiyah* ini hampir saja masuk ke Indonesia, yaitu ketika terjadi surat menyurat antara KH Agus Salim dengan Hasan Al-Banna. Atau, terjadi surat menyurat antara Natsir dengan Hasan Al-Banna, yang waktu itu ingin menerapkan pola pembinaan Ikhwanul Muslimin untuk kemudian diterapkan di Masyumi yang ada di Indonesia. Tapi, *wallahu a'lam* gimana ceritanya... Akhirnya itu gagal masuk Indonesia. Barulah kemudian muncul beberapa orang ustadz dari Timur Tengah yang berusaha membawa ini ke Indonesia, membawa model perubahan dengan pola *tarbiyah* ini (Ceramah Rofi' Munawwar, 17.05.2006).

Tarbiyah didirikan sebagai alternatif gerakan perjuangan Islam. Islam yang integral dan komprehensif.

*"Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar."*<sup>10</sup>

Pada awal-awal berdirinya, Tarbiyah memprioritaskan pada pembentukan pribadi peserta *tarbiyah*, kemudian menikahkan antar aktivisnya, dan membentuk komunitas-komunitas *tarbiyah* (misalnya Lembaga Dakwah Kampus). Pada era

---

<sup>10</sup> Sekilas Partai Keadilan ([www.keadilan.or.id](http://www.keadilan.or.id))

80-an sampai dengan awal 1990-an, Tarbiyah berkuat pada lingkup ini. Baru kemudian seiring Soeharto memberikan ruang untuk aktivitas Islam –dengan meresmikan ICMI, peluang ini dimanfaatkan oleh Tarbiyah dengan membentuk institusi-institusi sosial berbasis Islam (LBB Nurul Fikri, Majalah Sabili, SIDIK Foundation, di Surabaya misalnya Lembaga Manejemen Infaq Ukhuwah Islamiyah dan Ma’had Ukhuwah Islamiyah)<sup>11</sup>.

Gerakan ini muncul dari kajian-kajian keislaman dalam bentuk *halaqoh* (kelompok-kelompok kecil) dan *usroh* (secara harfiah berarti keluarga) di masjid, rumah dan terutama di masjid kampus khususnya. *Halaqoh-halaqoh* tersebut merupakan kelompok kajian yang diikuti oleh beberapa orang membahas tentang masalah keislaman dan juga permasalahan-permasalahan sosial dalam masyarakat, muncul pada dekade akhir 1970-an.

Kondisi politik pada masa tersebut sangat tidak memungkinkan bagi perkembangan suatu gerakan Islam, karena sikap represif yang ditunjukkan oleh pemerintah Orde Baru pada gerakan-gerakan Islam. Selain itu berkembang pula perilaku-perilaku masyarakat yang memunculkan dekadensi moral, sebagai salah satu akibat dari kebijakan negara yang berkiblat pada pembangunan negara secara fisik tanpa memperdulikan pembangunan secara psikis dan moral. Nilai-nilai materialisme, hedonisme dan sekularisme tumbuh seiring dengan program pembangunan pemerintah.

Namun hal tersebut tidaklah menjadikan surutnya langkah bagi para gerakan-gerakan Islam di Indonesia sehingga kemudian menjadikan kampus

---

<sup>11</sup> Di ringkas dari skripsi Nugroho, Arif Budi, *Gerakan Islam di Indonesia pada Era dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Gerakan Tarbiyah Indonesia di Surabaya*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2003.



sebagai ladang persemaian para kader-kader dakwah. Begitu pula dengan "Gerakan Tarbiyah", kampus merupakan sarana efektif dalam melakukan perekrutan anggota walaupun harus bersaing dengan organisasi Islam ekstra kampus semacam HMI atau PMII. Walaupun pada awalnya diikuti oleh sedikit orang, namun dari orang-orang tersebut yang juga mendapatkan pembinaan dari para *muassis* (pelopor) "Tarbiyah", kemudian mengembangkan di berbagai daerah di Indonesia .

Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk "Terbuka", gerakan ini cenderung bersifat eksklusif, eksklusifitas tersebut dilakukan selain sebagai usaha untuk menjaga keamanan dari aktivitas gerakan, juga untuk mengkondisikan anggota gerakan supaya tetap terjaga dan tidak mengikuti arus pemikiran atau ideologi lain di sekitar lingkungan mereka.

Pada awal kemunculan gerakan ini, kajian-kajian yang dilakukan hanya diikuti oleh beberapa orang. Dan dari beberapa orang ini, yang kebanyakan adalah mahasiswa - mahasiswa, mengembangkan dakwah ke kampus masing-masing juga ketinggian pelajar sekolah menengah. Usaha yang dilakukan untuk dakwah di kampus dengan masuk dalam lembaga-lembaga atau kegiatan ekstra kurikuler seperti Seksi Kerohanian Islam (SKI) tingkat fakultas maupun universitas sampai pada "pewarnaan" dalam Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) di tingkat Universitas.

Perubahan sosial-politik Indonesia yang begitu cepat berubah, memaksa Tarbiyah untuk merespon dengan cepat pula. Pada tanggal 29 Maret 1998, berdirilah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) –yang kemudian bersama Amien Rais, elemen mahasiswa dan rakyat berhasil

menurunkan Soeharto. Era multi-partai pasca reformasi, kembali memaksa Tarbiyah untuk meresponnya. Aspirasi kader-kader Tarbiyah yang digali melalui survai, menunjukkan bahwa sebagian besar berpendapat sudah saatnya mendirikan partai yang independen. Akhirnya, tanggal 20 Juli 1998 didirikanlah Partai Keadilan –yang pada tahun 2003 lalu berganti Partai Keadilan Sejahtera.

Sebenarnya, jauh-jauh hari sebelumnya, Tarbiyah telah merancang untuk terlibat dalam politik praktis. Hanya saja, gerakan ini merencanakannya pada tahun 2010. Para aktivis Tarbiyah (di Surabaya dan Jawa Timur) merancang tahapan-tahapan pertumbuhan gerakannya, sesuai dengan tujuan dari gerakan sebagai berikut; tahap *Taksis* dari tahun 1980 sampai 1990, *Sa'biyatul Da'wah* tahun 1990 sampai dengan 2000, dan *Mu'asasi* dari tahun 2000 sampai 2010. Tahap *Taksis* merupakan tahap membangun fondasi dari gerakan. Tekanan kerjanya pada rekrutmen anggota baru dan melakukan pembinaan secara intensif terhadap calon-calon kader untuk dijadikan kader yang loyal. Kedua, tahap *Sa'biyatul Da'wah*, misi utama dari tahap ini adalah mensosialisasikan dakwah ke masyarakat. Artinya para kader-kader yang telah di didik diharapkan terjun ke masyarakat dengan melibatkan diri dalam permasalahan-permasalahan umat yang diharapkan kemudian adalah kehadiran dakwah dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tahap ketiga, *mu'asasi*, merupakan tahap penyiapan infrastruktur lahirnya pemerintahan atau penguatan kelembagaan sosial. Target yang akan dicapai pada tahap ini adalah munculnya kader-kader yang loyal terhadap jama'ah, dan berakar dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lebih jelas tentang hal ini, silakan lihat *Nugroho, Arif Budi, Gerakan Islam pada Era dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Gerakan Tarbiyah Indonesia di Surabaya (Skripsi Sosiologi Unair, 2003).*

#### **D. Ikhwanul Muslimin dan Pengaruh Pergerakannya**

PKS banyak diinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin. Dalam pandangan *Ikhwan*<sup>13</sup>, *tarbiyah* (pembinaan) diawali dari pribadi, keluarga, masyarakat, negara, lalu dunia. Karenanya, tahap-tahap gerakan Tarbiyah melalui fase-fase itu. Yon Machmudi, menyebutkan bahwa PKS adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang memiliki Ideologi jelas. Terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan Tarbiyah yang merupakan penyokong dari serta tulang punggung utama partai ini mencoba memformulasikan ajkaran – ajaran Islam dalam kehidupan sehari – sehari sampai pada aktifitas politik dan sosialnya. Berdirinya Partai Keadilan dan disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera diyakini bahwa partai merupakan alat dalam mengemban misi Islam yang Universal.

Bayang – bayang gerakan Ikhwanul Muslimin dalam diri PKS membuat para pengamat Islam dan politik ( Orientalis ) melabelkan PKS sebagai kelompok yang beralioran keras dan fundamental yang menggunakan segala cara dalam pencapaian tujuannya, seperti yang dilabelkan kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang para pengamat yang melihat aktifitas politik dari Ikhwanul Muslimin yang selalu dianggap ancaman oleh Pemerintah Mesir. Mereka tidak melihat aspek social movement yang memungkinkan adanya penilaian lain yang memungkinkan akan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa merupakan gerakan produktif. Sudut pandang yang cenderung positivistik-lah yang menyempitkan analisa para pengamat tersebut.

---

<sup>13</sup> Sebutan untuk Ikhwanul Muslimin

Beberapa contoh yang dapat dilihat adalah adanya kecurigaan akan kestabilan sistem politik Demokrasi yang dianggap sebagai ciri sistem politik modern yang (harus) dianut oleh negara-negara Dunia. Kekhawatiran akan dihapuskannya sistem Demokrasi ketika PKS berkuasa, karena sistem Islam yang selama ini diterapkan oleh PKS tidak mampu berkolaborasi dengan sistem Demokrasi modern. Selain adanya kekhawatiran akan sistem – sistem lain seperti Ekonomi, Hukum sampai Sosial.

Tidak ada hubungan secara Struktural antara Partai Keadilan Sejahtera dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ulama besar moderen, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera) merupakan *imtidad* dari Ikhwanul Muslimin (Mesir). Dalam buku Qardhawi edisi bahasa Indonesia (*Umat Islam Menyongsong Abad ke-21: Sebuah Catatan Akhir Abad; Evaluasi Perjalanan Umat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, Solo: Era Intermedia, 2001), kata *imtidad* ini diartikan “perpanjangan tangan”. Namun, hal ini dibantah oleh Furkon:

Apa yang dikatakan Yusuf Al-Qardhawi bahwa Partai Keadilan adalah perpanjangan tangan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun merupakan kesalahan dalam menerjemahkan. Sesungguhnya kata *imtidad* mempunyai arti perpanjangan, tapi bukan perpanjangan tangan. Namun dalam arti seperti benda yang dijatuhkan ke dalam air dan mempunyai riak air disekelilingnya. Dengan demikian, Partai Keadilan bukan perpanjangan tangan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam bentuk struktural, tapi Partai Keadilan terkena imbas dari riak Al-Ikhwan Al-Muslimun (Furkon, 2004: 285).

Sementara itu, Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi PKS, mengartikan kata *imtidad itu* dengan “pencerminan” (Siddiq, 2004: 40).

Al-Ikhwan al-Muslimun adalah salah sebuah gerakan Islam terbesar di zaman modern ini. Al-Ikhwanul Muslim didirikan oleh Hasan Al Banna tahun

1928 di Mesir. Seruannya ialah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengajak kepada penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan nyata. Gerakan ini telah mampu membendung arus sekularisasi di Dunia Arab dan Islam. Hasan Al Banna sendiri adalah tokoh yang lahir di daerah Buhairah, Mesir, yang kemudian meninggal secara misterius pada tanggal 12 Februari 1249.

Hasan Al Banna merupakan seorang pendidik dan guru sekolah dasar yang besar dikeluarga yang memegang teguh ajaran – ajaran keagamaan dalam aktifitas sehari-harinya. Dilahirkan pada tahun 1906 menamatkan pendidikan modern di Universitas Darul Ulum, Mesir, setelah dari tingkat dasar sampai menengah bersekolah di sekolah Islam tradisional.

Semula Ikhwanul Muslimin hanya bergerak pada gerakan dakwah yang pada waktu itu mencoba untuk menandingi aktifitas misionaris Kristen yang marak di Mesir dengan memanfaatkan media secara efektif sebagai alat penyebarannya. Problematika politik serta sosial di Mesir membuat Ikhwanul Muslimin kemudian menjadi mesin politik yang efektif di Mesir bahkan dalam berbagai kasus sering bentrok dengan kepentingan pemerintah. Mereka kemudian aktif dalam perjuangan pembebasan Palestina dan berperan dalam konflik Terusan Suez antara Mesir dengan Inggris pada Oktober 1951.

Hubungan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir mengalami pasang surut. Pada tanggal 8 November 1948, Muhammad Fahmi Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir waktu itu, membekukan Gerakan Ikhwan dan menyita harta kekayaannya serta menangkap tokoh-tokohnya. Tahun 1950 berdasarkan keputusan Dewan Tertinggi Negara, Ikhwan direhabilitasi. Ketika itu Mesir

diperintah oleh kabinet al-Nuhas. Dewan tersebut juga memutuskan bahwa pembekuan Ikhwan selain tidak sah, juga inkonstitusional. Pada 23 Juli 1952, pasukan Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib, bekerja sama dengan Ikhwan melancarkan Revolusi Juli. Tetapi kemudian Ikhwan menolak kerja sama dalam pemerintahan, karena mereka mempunyai pendapat dan pandangan yang jelas tentang metode revolusi. Jamal Abdunnashir menganggap penolakan tersebut sebagai penolakan terhadap mandat revolusi. Kemudian kedua belah pihak terlibat serangkaian konflik dan permusuhan yang semakin hari semakin tajam. Akibatnya, pada tahun 1954, pihak pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwan dan beribu-ribu orang dijebloskan ke dalam penjara. Tahun 1965—1966 bentrokan antara Ikhwan dan pemerintah Mesir terulang kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah kembali melakukan penangkapan besar-besaran, melakukan penyiksaan serta memenjarakan anggota-anggota Ikhwan.

Pemahaman Ikhwan terhadap Islam bersifat universal, tidak mengenal adanya pemisahan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ikhwan berusaha keras memperluas kawasan gerakannya sampai menjadi sebuah gerakan internasional. Berkenaan dengan da'wah Ikhwan, Hasan al-Banna mengatakan:

"Gerakan Ikhwan adalah da'wah salafiyah, thariqah sunniyyah, haqiqah shufiyyah, lembaga politik, klub olah raga, lembaga ilmiah dan kebudayaan, perserikatan ekonomi dan pemikiran sosial."

Secara umum, gerakan Ikhwanul Muslimin dapat digambarkan sebagai organisasi yang memiliki karakteristik dasar seperti yang dijelaskan oleh Hasan Al Banna sendiri. Gerakan Ukhwanul Msulimin adalah (1) dakwah salafiyah dalam artian menolak setiap aktifitas yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah (2). Tariqah Sunniyah yang menekankan pentingnya mempraktikan

ajaran-ajaran Nabi Muhammad, (3). Haqiqah Sufiyyah yang menempatkan moralitas dan kebersihan hati sebagai identitas (4). Hai'ah Siyasiyah yang menginginkan adanya perubahan politik dan sosial dari dalam (5) Jama'ah Riyadhiyah yang menaruh perhatian pada pentingnya olahraga dan kesehatan (6). Rabithah Ilmiah Tsaqafiyah yang berusaha meningkatkan kemampuan ilmiah dan pengetahuan, (7). Shirkah Iqtishadiyah yang memastikan adanya kekuatan ekonomi dan distribusinya secara adil, (8). Fikrah Ijtimaiyah yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial. Selanjutnya Syaikh Hasan al-Banna mengatakan bahwa ciri gerakan Ikhwan adalah: Jauh dari sumber pertentangan, Jauh dari pengaruh riya dan kesombongan, Jauh dari partai politik dan lembaga-lembaga politik, Memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah, Lebih mengutamakan aspek aspek amaliyah produktif dari pada propaganda dan reklame, Memberi perhatian sangat serius kepada para pemuda dan cepat tersebar di kampung-kampung dan dikota-kota.

Tentang tahapan – tahapan dakwahnya, Hasan al Banna membagi menjadi tiga tahap; tahap Pengenalan yaitu mengenalkan dakwah dan menyampaikannya kepada manusia, tahap Pembentukan yaitu seleksi para pendukung dan menyiapkan prajurit dari kalangan orang-orang yang menyambut dakwah dan tahap Pelaksanaan yaitu fase amal dan produksi.

Dalam masalah yang berhubungan dengan negara – negara Barat, Ikhwanul Muslimin menunjukkan sikap yang kritis. Sikap kritis ini terus meningkat ketika negara – negara barat dengan diwakili oleh Amerika Serikat dengan jelas mendukung Israel yang menjajah Palestina. Sejak awal, Israel merupakan *Common Enemy* bagi negara – negara Timur Tengah yang bukan sekutu Amerika Serikat. Mereka melihat standart ganda yang diterapkan Amerika menunjukkan adanya konspirasi antara Zionis ( Israel ) dengan Barat ( Amerika ), yang kemudian diperluas oleh kelompok – kelompok radikal sebagai konspirasi Nasrani dan Yahudi dalam usahanya menyerang Islam.





## BAB IV

### Perlawanan Identitas Partai Keadilan Sejahtera

#### A. Pengantar

Perlawanan Identitas Partai Keadilan Sejahtera dalam penelitian ini diarahkan pada upaya pembinaan anggota (Kader) dan kebijakan – kebijakan politik sebagai upaya merespon realitas sosial yang ada. Fenomena modernisasi dipandang sebagai realitas sosial tersebut dimana banyak nilai yang terdapat di dalamnya. Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini mengarahkan pada pengetahuan akan modernisasi dengan pengalaman yang sudah ada pada Partai Keadilan Sejahtera. Pengalaman – pengalaman tersebut berkaitan dengan konteks sosial dan historis dari objek penelitian yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam analisis ini, peneliti tidak menjadikan informan terpisah dari gerakan/organisasi, dan menjadikan gerakan sebagai bagian yang tidak berdiri sendiri dari dunia sosio-kulturalnya. Sehingga, peneliti melihat bentuk identitas yang diungkapkan oleh informan tidak lepas dari struktur sosialnya. Walaupun penelitian ini mengambil informan yang berada dalam lingkup Surabaya, namun dari data yang didapatkan, warna organisasi –yang berada pada level nasional-kental mewarnai gagasan informan. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemikiran elit pusat (yang peneliti dapatkan dari literatur-literatur) dengan elit Surabaya (yang didapat dari wawancara), demikian juga kebijakan daerah dengan kebijakan pusat.

Hal ini nampaknya disebabkan oleh secara teritori tidak ada sekat yang membatasi, terlebih di era informasi seperti ini. Selain itu struktur pada objek yang diteliti memungkinkan adanya penggambaran secara umum terhadap struktur yang berada di atasnya –pusat. Selain itu, sebagai gerakan Islam yang menjadikan Alquran sebagai konstitusinya, ketaatan elit lokal terhadap elit pusat maupun keputusan kolektif (*jamaah*) ini nampaknya sebagai keteguhan dalam memegang: "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri<sup>1</sup> kalian (QS. An-Nisa': 59)*". Oleh karena itu, peneliti memotret gerakan-gerakan Islam itu dalam lingkup nasional (Indonesia), dengan informan sebagai "*guide*"-nya.

## **B. Manifestasi Identitas Islam politik baru di Indonesia**

Dalam melihat kecenderungan utama dan karakter Islam politik secara umum didasarkan dalam dua kategori. *Pertama*, Islam dipahami sebagai ideologi politik yang berfungsi sebagai justifikasi dan legitimasi untuk melindungi tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah ada. Kelompok-kelompok Islam memberikan kontribusi dalam upayanya melindungi rezim yang berkuasa serta mempertahankan status quo. *Kedua*, Islam dipahami sebagai ideologi yang anti terhadap rezim yang berkuasa. Perwujudan dari segala aktifitasnya diarahkan dalam usahanya untuk melawan bahkan sampai pada takaran upaya untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa<sup>2</sup>.

Analisa diatas digunakan dalam mengkategorikan aktifitas Islam politik di negara-negara mayoritas Islam –khususnya timur tengah. Pendekatan dengan melihat Islam secara politik, dalam takaran fungsinya mendukung atau menolak

---

<sup>2</sup> Machmudi, Yon. Partai Keadilan Sejahtera "Wajah Baru Islam Politik Indonesia ". Bandung; Harakatuna, 2005.

kondisi status quo, terjadi generalisasi akan peran Islam tersebut sebagai gerakan yang defensif. Hal ini tidak lagi relevan digunakan dalam menganalisa gerakan-gerakan Islam –khususnya gerakan Islam politik- kontemporer sekarang ini. Diperlukan varian-varian baru sehingga tidak terjebak dalam satu persepsi.

Islam politik yang termanifestasikan dalam wujud partai Islam selalu dibenturkan dengan relitas politik yang menuntut adanya power sharing (pembagian kekuasaan) dengan kelompok-kelompok non-agamis. Partai yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dianggap hanya memprioritaskan pada penerapan ajaran-ajrannya secara formal dan tidak dapat menerima kelompok-kelompok lain diluarnya karena akan menjadi penghambat terhadap pencapaian tujuan-tujuannya. Pemahaman yang kemudian menyebabkan Islam sangat sulit menerima sistem Demokrasi yang menuntut adanya power sharing antar kelompok didalamnya. Stigma yang muncul kemudian adalah sistem demokrasi tidak sejalan dengan karakter politik Islam.

Munculnya PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia memberikan gambaran lain terhadap identitas Islam politik di Indonesia. PKS mampu menunjukkan konsistensi dalam membawa identitas keislamannya sekaligus bertahan terhadap realitas sosial politik yang ada. PKS mampu melakukan power sharing dengan kekuatan-kekuatan lain diluar kelompoknya. Penerimaan akan sistem demokrasi yang dilihat secara substansial sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Hal ini dijelaskan oleh Umar Sholahudin, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Penguurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur;

“...dalam demokrasi itu juga ada nilai-nilai keislamannya, seperti sistem *Syuro*’ (musyawarah) dalam mengambil keputusan...”

Beliau kemudian menambahkan;

“...Demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, kita nikmati saja...tidak ada pintu lain ketika kita akan menerapkan fikih dakwah...selain menggunakan sistem yang ada sekarang...kita tidak mungkin mendirikan sistem baru...” (wawancara, 17-12-2006).

Sementara Ketua Bidang Pembinaan Kader (BPK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, Ust. Ahmad Habibul Muiz, Lc. Mengatakan ;

“...Islam tidak serta merta menolak Demokrasi. Dalam bagian-bagian tertentu sangat penting dan sangat krusialnya dengan Islam...”

Ditambahkannya;

“...yang memberikan kesejahteraan, memberikan hak-hak manusia seperti hak untuk berbicara, berekspresi, menghargai aturan yang disepakati, apapun itu disebut demokrasi ataupun namanya, kita tidak masalah...ukurannya itu substansinya bukan capnya itu...”

Demikian juga tentang nilai-nilai demokrasi, beliau juga menjelaskan;

“...di PKS sangat ditekankan mekanisme musyawarah, karena musyawarah itu adalah bagian penting dalam Islam yang harus kita terapkan....tidak ada kebijakan yang diambil secara pribadi, baik ditakaran pusat sampai daerah..” (wawancara, 19-12-2006)

Mahfudz Siddiq ,anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PKS, menjelaskan bahwa ketika Islam politik muncul selalu dipersepsikan sebagai antitesa demokrasi atau sesuatu yang berbeda. PKS melihat prinsip-prinsip dalam demokrasi sebagian sejalan dengan nilai Islam. Perspektif itu muncul sejak awal kemunculan PKS yang menunjukkan diri sebagai kekuatan unsur demokrasi. Demokrasi yang memiliki warna, nilai dan pemikiran Islam<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> ibid

Penerimaan akan nilai-nilai baru yang selama ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai identitasnya juga memberikan pengaruh pada karakter partai. Demokrasi juga tidak secara penuh diaplikasikan oleh partai, pada takaran-takaran tertentu PKS juga melihat kelemahan dari sistem Demokrasi sekarang. PKS menempatkan demokrasi hanya pada takaran tuntutan realitas sosial yang ada, sehingga partai mencoba untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut sesuai batasan-batasan yang ditentukan. Umar Sholahudin mengatakan;

“...demokrasi itu terbaik dari yang terjelek, artinya jelek juga. Karena realitas politik sekarang di Indonesia menggunakan sistem Demokrasi dan kita hanya sekedar numpang lewat...”

Beliau kemudian menganalogikannya dengan menjelaskan bahwa;

“..jika kita mau kedesa A harus melewati kali, dan dikali itu tidak ada jalan lain kecuali melewati jembatan itu. Demokarasi adalah jembatan itu. karena itu merupakan jalan efektif untuk mencapai desa A...oleh karena kita harus mengikuti aturan pada jembatan itu, lebanya berapa, beratnya berapa...”(17-12-2006)

Paradigma pragmatis ini dijadikan sarana agar nilai-nilai identitas yang ada dalam partai tidak larut sehingga terkontaminasi dengan nilai-nilai diluarnya. PKS melihat realitas sosial yang ada sekarang memang bukan produk dari nilai-nilai identitas keIslaman. Akan tetapi pemahaman akan akan kaidah-kaidah hukum-hukum Islam sendiri membolehkan untuk menjalankannya.

Ust. Ahmad Habib menjelaskan;

“...di Islam itu ada satu kaidah....keterpaksaan itu membolehkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang dilarang..”

Ditambahkan beliau bahwa;

“...produk-produk kita itu kebanyakan dari barat...dimanapun dia menjumpai nilai kebaikan dia berhak menjadi orang pertama untuk mengambilnya.”(19-12-2006).

Selain realitas sosial yang mempengaruhi penerimaan PKS terhadap sistem demokrasi, belum adanya acuan yang jelas akan bentuk sistem pemerintahan yang Islam menyebabkan kebijakan-kebijakan PKS didasarkan pada kemaslahatan bersama, Ust. Ahmad Habib menjelaskan;

“...kalau bicara masalah realitas orang Islam harus dipisahkan dengan Islam itu sendiri..tidak serta merta tampilan orang Islam mencerminkan sesungguhnya ajaran agamanya...berbicara masalah konsep pemerintahan sekarang ini tidak menggambarkan nilai-nilai keislaman termasuk pemerintahan model kerajaan seperti Arab Saudi misalnya...”

Manifestasi Islam yang diamalkan PKS menghadirkan contoh lain dari wajah Islam politik. Kemampuan untuk melakukan power sharing memberikan gambaran bahwa Islam tidak lagi dikotomikan hanya pada takaran mendukung atau melawan status quo. Islam di manefestasikan sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan dari dalam. Kesempatan untuk menggandeng kelompok-kelompok lain –yang memiliki identitas dan karakteristik yang berbeda- dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik.

Ust. Ahmad Habib menyimpulkan bahwa;

“...keputusan partai kita harus Musyarokah, kita harus masuk sistem, kita bukan oposisi...kita ingin merajut kesepakatan nilai dengan kelompok-kelompok lain...tentunya dengan nilai-nilai yang bisa kita sepakati...”(19-12-2004)

Keputusan strategi partai yang memutuskan untuk masuk dalam takaran politik, terlepas dari keraguan-keraguan yang ada, menyebabkan PKS harus memiliki kesiapan yang bagus khususnya dalam penjagaan identitas partai yang harus tetap dijaga orisinalitasnya. Hal ini berimplikasi bagi upaya-upaya yang dilakukan PKS untuk mewujudkannya.

## C. Pembentukan Identitas Kader

### C.1. Proses Pembinaan Kader

Perhatian pertama yang diberikan dalam pembinaan kader PKS adalah perbaikan pada pribadi-pribadi anggotanya. Perbaikan yang dimulai dari pribadi-pribadi ini merupakan substansi dari tarbiyah itu sendiri. Tarbiyah dalam konsep PKS yang mengacu pada pegerakan Ikhwanul Muslimin didefinisikan sebagai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (dengan kata-kata) maupun tidak langsung (dalam bentuk teladan) , untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju yang kondisi lebih baik.

Proses pembinaan tidak berhenti pada takaran individu-individu kader. Dengan adanya individu-individu yang memiliki identitas keIslaman yang baik, akan membentuk keluarga-keluarga yang berkualitas yang kemudian menciptakan tatanan masyarakat yang kokoh yang mendukung terbentuknya pemerintahan yang mampu mengatur secara baik. Dengan banyaknya negara-negara yang memiliki struktur pemerintahan yang baik ditujukan untuk tercipta tatanan dunia yang baik.

Dalam masalah Ust. Ahmad Habib mengatakan;

“..membentuk pribadi muslim kemudian, keluarga Muslim kemudian masyarakat muslim terus membentuk pemerintahan yang Muslim, sampai kita menghendaki komunikasi adanya komunikasi antar negara Islam sedunia yang disebut dengan Khilafah Islamiyah meskipun nantinya bentuknya berbeda..”(19-12-2006)

Proses pembentukan kader PKS mengacu pada kurikulum pengenalan dasar-dasar Islam yang terdiri dari lima pembahasan<sup>4</sup>, *Pertama* pembahasan mengenai makna *Syhadat* (*ma'na asy syahadatain*). Pembahasan ini didasarkan

---

<sup>4</sup> Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta:TERAJU, 2002

pada rukun-rukun Islam yang menempatkan rukun Syahadat pada urutan pertama. Syahadat adalah konsep pengikraran diri akan kebenaran yang diyakini serta konsistensi terhadap nilai-nilai yang mengaturnya –bahwa tiada Illah selain Allah, dan mengikuti segala ajaran yang di bawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah-. Pembahasan tema ini menyentuh aspek ideologi kader sehingga setiap kader mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktifitas kesehariannya.

Tema kedua pembahsan tentang mengenal Allah (*ma'rifatullah*). Pembahasan ini ditujukan pada aspek ketuhanan. Setiap kader memiliki keyakinan akan segala tujuan hidupnya hanya ditujukan kepada Allah. Ini merupakan konsep dasar dari ajaran agama Islam. Yang ketiga , tema yang membahas tentang pengenalan terhadap Rasul (*ma'rifaturrasul*). Tema ini mengkhususkan pada pemahaman akan nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Tema ini mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad Saw, serta konsep-konsep ajarannya.

Tema keempat pembahasan tentang pengenalan terhadap Islam (*ma'rifatu Islam*). Setiap kader diharapkan memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap ajaran-ajaran Islam. Karakter ini memberikan pedoman bagi setiap kader untuk menempatkan Islam sebagai dasar baik pemikiran maupun aktifitasnya, dan yang kelima pembahasan tentang pengenalan terhadap manusia (*ma'rifatul Insan*). Dalam pembahasan ini manusia ditempatkan sebagai *Khalifah* (pemimpin) di muka bumi, diciptakan dalam bentuk yang sempurna (*fi ahsani taqwiim*), memiliki kelebihan ruhiyah, memanfaatkan Alam sesuai kepentingannya,



berhubungan langsung dengan Allah, dan memiliki kelengkapan seperti jasad, akal, ruh, hai, keinginan, naluri, dan lainnya di bandingkan makhluk lainnya<sup>5</sup>.

**Kurikulum Pengkaderan PKS**

Kelompok	Kompetensi	No	Materi	Tik/tiu
Dasar Keislaman	Menyadari Islam sebagai agama sempurna, yang mencakup seluruh aktivitas manusia –termasuk didalamnya aktifitas politik– sejak awal penciptaan hingga hari akhir dan dapat diterapkna di seluruh alam semesta.	1	<i>Syumuliyatul</i> Islam dan sejarah politik Islam	Memahami pengertian Islam. Memahami kesempurnaan Islam ditinjau dari ajaran, waktu dan tempat. Memahami bahwa ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari politik Memahami sejarah praktk politik Rasulullah SAW. sejak periode <i>sirriyah</i> sampai akhir periode Mekkah
Dasar Kepartaian	Memahami eksistensi Partai Keadilan Sejahtera	2	Sejarah dan jati diri Partai Keadilan Sejahtera	Memahami sejarah Partai Keadilan Sejahtera
Pengenalan DPD dan DPC Partai Keadilan Sejahtera	Mengenal struktur DPD dan DPC	3	Pengenalan struktur pengurus DPD dan DPC Partai Keadilan Sejahtera	Mengenal dengan baik struktur, pengurus dan medan kerja DPD dan DPC

**Kurikulum TRP dan Pengajian Umum**

Kurikulum Tarbiyah Islamiyah Buku 1, yang menggunakan kelompok materi taklim.

**Kurikulum TOP – II**

Kelompok	Kompetensi	No	Materi	Tik/tiu
Dasar Keislaman	Menyadari Islam sebagai dien al haq, baik dalam tataran ideologi maupun tataran operasional	1	Tauhid: paradigma keyakinan muslim	Memahami kedudukan tauhid sebagai paradigma keyakinan seorang muslim
		2	Islam sebagai pedoman hidup	Memahami Islam sebagai pedoman hidup. Menjadikan Islam sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak
Dasar kepartaian	Memahami eksistensi PKS dan mengenal berbagai identitasnya	3	Konstitusi dan asas PKS	Mengetahui konstitusi yang berlaku dan menjadikannya sebagai acuan peraturan di lingkungan PKS. Menyakini Islam sebagai asas yang tepat bagi PKS.
		4	Identitas PKS	Mengenal berbagai atribut, dokumen yang menjadi identitas PKS
		5	Sanksi-sanksi organisasi	Mengetahui berbagai jenis pelanggaran dan sanksinya. Mengetahui lembaga partai yang memproses perkara setiap jenis pelanggaran.
		6	PKS dalam format politik	Memahami eksistensi dan posisi PKS dalam konstelasi politik di era

<sup>5</sup> ibid

			di era reformasi	reformasi.
Wawasan politik	Memahami konsepsi dasar tentang politik Islam	7	Dasar-dasar politik Islam	Mengetahui prinsip-prinsip politik Islam dan praktik empirisnya dalam perspektif historis
Wawasan sejarah	Memahami sejarah perjalanan politik umat Islam Indonesia	8	Perjuangan politik umat Islam di Indonesia	Mengetahui upaya-upaya politik umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Islam Indonesia.
Keterampilan	Memahami keterampilan dasar dalam pengelolaan organisasi	9	Pengenalan dasar-dasar organisasi	Mengenal prinsip-prinsip dasar pengelolaan organisasi
		10	Manajemen organisasi	Mengenal prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi
Pelengkap	Memahami program-program DPC	11	Serba-serbi DPC	Mengenal dengan baik medan kerja, program, strategi, dan tantangan DPC dalam mencapai tujuan-tujuannya, mengenal struktur kelembagaan desa dan mengetahui permasalahan seputar otonomi daerah

Sumber: <http://www.Keadilan.or.id>

Perangkat nilai yang menjadi identitas dan ditaati bersama (shared values) mempunyai dampak besar terhadap pembentukan karakter individu masing-masing anggota. Selain melakukan perbaikan pribadi-pribandi yang(kadang) dilakukan secara revolusioner, mereka juga memiliki kesadaran untuk melakukan kebaikan-kebakikan pada lingkungan sosialnya. Perubahan internal pada individu-individu tersebut menyentuk wilayah-wilayah ideologi. Kuntowijoyo mendefinisikan kesadaran ideologi sebagai kesadaran dimana kenyataan ditafsirkan dengan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai sebuah kebenaran . karenanya bersifat subjektif, normatif dan tertutup<sup>6</sup>

'Kegairahan' dalam aktifitas keIslaman pasca bersentuhan dengan nilai-nilai baru tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, *Pertama* kegairahan dalam menerima sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini sebuah penjelasan psikologis, dimana kecenderungan kejiwaan pada manusia yang

<sup>6</sup> Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung. Mizan.1997

bergairah apabila menemukan sesuatu yang baru. Hal ini bisa dilihat pada aktifitas kajian keIslaman di kampus-kampus umum seperti UNAIR, ITS, UI dan lainnya lebih marak dibandingkan perguruan tinggi agama, seperti IAIN atau pondok-pondok pesantren yang menjadikan agama sebagai kajian utamanya. *Kedua* aspek fungsional dari nilai-nilai itu sendiri. Secara sosiologis pendekatan tersebut merujuk pada fungsi agama yaitu; memberikan tawaran nilai yang pasti dan jelas, konsep transendel yang harus dipenuhi oleh manusia, adanya nilai-nilai yang disucikan dan dijunjung tinggi bersama, adanya standarnisasi kualitas individu, memberikan perbedaan identitas dengan nilai-nilai yang lain dan yang terakhir sokongan psikologis nilai-nilai tersebut terhadap pertumbuhan manusia<sup>7</sup>. Dan yang *ketiga*, kegairahan tersebut muncul karena adanya pola interaksi yang dibangun didalamnya tidak hanya berdasarkan nilai yang ditawarkan.

Dalam pembinaan anggota Partai keadilan Sejahtera memiliki beberapa bentuk kegiatan sekaligus model perekrutan anggota baru sebagai implementasi internalisasi nilai-nilai identitasnya. Model-model pembinaan ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, Ust. Ahmad Habib mengatakan;

“...kita punya sekian banyak sarana pembinaan dan itu dipandang secara integral dimana satu dengan yang lainnya saling mendukung..”(wawancara, 19-12-2006)

**Liqo** (pertemuan atau perjumpaan) atau **Halaqoh**, yaitu kegiatan pengkajian secara rutin dan kontinyu. Di dalam Liqo biasanya terdiri dari 5 sampai 12 orang **Mutarobbi** (anggota atau kader yang dibina) yang dipimpin oleh seorang **Murobbi** (pendidik atau pembina yang dianggap sebagai guru, saudara yang dituakan –bisa menjadi ‘orang tua ke dua’- yang berfungsi sebagai fasilitator

---

<sup>7</sup> Thomas F. Odea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan awal*. Jakarta. PT. Rajawali Press. Cetakan ke empat. 1992

dan pengontrol) yang dilakukan secara intensif –biasanya seminggu sekali dalam satu bulan.

Liqo atau Halaqoh merupakan model pembinaan yang paling mendapatkan perhatian lebih dalam sistem kadernisasi PKS, hal ini dijelaskan oleh Ust. Ahmad Habib Muiz, Lc ;

“...disitu selalu terjadi tansfomasi nilai, ilmu sehingga terjadi tansfomasi fikroh. Itu sangat penting dalam penyamaan persepsi pola pikir, visi dan misi...keterbukaan dari kita untuk saling mengkoreksi atau muthaba’ah misalnya bagaimana sholatnya...dari kader biasa sampai anggota dewanpun dilihat..oleh karena itu peserta halaqoh itu terbatas maksimal 12 orang, hal itu dalam kurun waktu yang cukup lama tergantung respon yang ikut halaqoh itu..(wawancara, 19-12-2002)

Halaqoh atau Liqo merupakan model kegiatan yang menitik beratkan pada hubungan personal antar anggota, baik antara sesama Mutarobbi atau antara Mutarobbi dengan Murobbi. Intensifitas serta sifatnya yang personal, Halaqoh atau Liqo biasanya diadakan di rumah salah satu anggota atau masjid yang relatif sepi sehingga komunikasi berjalan efektif. Dalam Liqo dan Halaqoh sendiri memiliki rukun-rukun yang selalu dipahami dan dipelihara secara baik dalam kelompok tersebut, rukun-rukun tersebut adalah *ta’aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami) dan *takaful* (saling menanggung beban).

*Ta’aruf* merupakan rukun pertama dan menjadi prioritas sebelum rukun-rukun setelahnya. Dalam prosesnya setiap anggota kelompok diwajibkan untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, tidak sebatas kenal nama tapi juga alamat , hobby, anggota keluarga kelompok lainnya sampai pada hal-hal yang ,menyangkut psikologis teman-temannya, kondisi ekonomi, potensi yang dimiliki sampai pada karakter pribadinya. Proses ini diharapkan mampu menumbuhkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) yang kuat dalam kelompok.

Kemudian *Ta'fahum* yang meliputi penanaman akan rasa saling menghargai antar anggota kelompok sehingga meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada.

Yang terakhir *Takaful* atau saling menanggung beban antar anggota kelompok. Inilah karakter istimewa yang membedakan kelompok inidengan kelompok lain, dengan sudah mengetahui latar belakang sesama anggota kelompok kemudian timbul rasa saling menghargai, timbulah rasa saling menanggung beban dan berlomba-lomba untuk saling membantu diantara anggota kelompok.

Bentuk kegiatan selanjutnya adalah **Dauroh** (semacam ceramah, seminar atau pelatihan) yang menekankan pada pengayaan wawasan atau pengetahuan anggota baik permasalahan keorganisasian maupun permasalahan sosial lainnya. Dauroh dilakukan secara umum yang melibatkan banyak anggota organisasi, yang dilakukan secara temporari. Dalam awal-awal pergerakannya yang masih berada di wilayah kampus, Dauroh digunakan untuk merekut anggota baru melalui pelatihan-pelatihan manejerial kemahasiswaan kepada para mahasiswa baru lewat lembaga-lembaga formal kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) baik setingkat Fakultas maupun Universitas<sup>8</sup>.

Kemudian **Mabit** (bermalam), yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama antara para anggota dan Murobbinya (pembina), kadang juga dilakukan secara umum dengan melibatkan kelompok-kelompok Liqo lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam sebulan sekali dengan mengkhususkan pada aspek pembinaan spiritual. Biasanya dilakukan di masjid-masjid atau tempat-tempat lainnya.

---

<sup>8</sup> Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta:TERAJU, 2002

Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat teoritis, kegiatan pembinaan anggota di PKS juga mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik yang lebih aplikatif, Ust. Ahmad Habib menjelaskan;

“...sarana lain yang lebih berkaitan dengan penyiapan fisik....diantaranya ada Mukhoyyam, Pandu Keadilan<sup>9</sup>....ketika kita diturunkan dalam rangka menerjemahkan nilai yang ada dalam halaqoh..”

**Rihlah** (perjalanan), kegiatan yang mengkhususkan pada pembinaan fisik. Rihlah biasanya dilakukan di daerah-daerah yang sejuk, sepi dengan banyak pemandangan alam disekitarnya. Nilai yang coba ditanamkan pada setiap anggota adalah perlunya keseimbangan antara fisik dengan pikiran. Banyaknya aktifitas yang dilakukan menyebabkan kejenuhan, sehingga setiap anggota diharapkan terus dinamis dengan kondisi fisik dan pikiran yang lebih segar. **Riyadhoh** (berolahraga secara individu atau massal), **Mukhayam** (berkemah) yang dilakukan secara massal yang bertujuan melatih keterampilan secara fisik dilapangan -diselenggarakan oleh bidang kependuan-.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, pembinaan dalam PKS juga menyangkut kemampuan atau skill para kader yang bersifat praktis sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ust. Ahmad Habib mengatakan;

“..adanya penugasan-penugasan ilmiah, fikriyah...training-training organisasi...diharapkan sebagai kader PKS tidak hanya baik sholatnya atau fikihnya tapi dia diharapkan baik mengenai kemampuan menejerialnya, mengenal perkembangan teknologi...”(wawancara,19-12-2006)

Seminar-seminar keIslaman juga menjadi sarana dalam proses pembinaan. Materi-materi umum seperti pelatihan keluarga muslim, pelatihan pendidikan

---

<sup>9</sup> Bentuk pembinaan yang diharapkan para kader memiliki keterampilan fisik dilapangan. Pembinaan ini diarahkan dalam rangka merekrut kader-kader yang memiliki potensi fisik bagus yang kemudian masuk ke dalam *Kepanduan* –semacam satuan tugas mirip Banser di PKB- yang memiliki tugas pengamanan dalam acara-acara partai sampai pada pelibatan dalam aktifitas sosial partai seperti satuan aksi cepat dalam membantu bencana alam.

anak, pelatihan wirausaha sampai seminar-seminar yang membahas isu-isu aktual seperti poligami, terorisme, pornografi dan isu-isu besar lainnya.

Model-model pembinaan yang dilakukan PKS tidak tetutup pada aktifitas-aktifitas diatas. Model pembinaan yang relatif aplikatif dengan melibatkan kader secara aktif diijalankan dengan berbagai metode yang sesuai dengan nilai-nilai identitas partai. PKS tidak menutup diri terhadap model-model baru yang bisa digunakan dalam pembinaan. Ust. Ahmad Habib menggambaranya sebagai berikut;

“...PKS sangat wellcom dengan aneka ragam bentuk-bentuk yang bisa mendokrak mengikuti trend tanpa kehilangan nilai-nilai asasinya...”(19-12-2006)

Bentuk pembinaan yang sangat khas dari PKS adalah demonstrasi yang tertib dan melibatkan segala elemen anggotanya. Demonstrasi yang tertib melibatkan ribuan bahkan sampai jutaan anggota merupakan bentuk pembinaan sekaligus bentuk aktualisasi dari nilai-nilai identitas partai. Demonstrasi yang dilakukan PKS selain digunakan untuk penyingkapan isu serta penyampaian pendapat juga menjadi pendidikan umum terhadap masyarakat akan bentuk identitas Islam yang ada di PKS.

Pembinaan kader dalam PKS tidak terlepas pada jenjang keanggotaan tertentu, akan tetapi menyeluruh dan dilakukan secara terus-menerus. Penjenjangan keanggotaan dalam PKS didasarkan atas tingkat pemahaman serta kemampuan anggota untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah didapatkan dalam aktifitas kesehariannya.

**Jenjang Keanggotaan PKS**

Jenis Keanggotaan	Pengertian
Anggota Pemula	Mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai I (TOP I)
Anggota Muda	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu
Anggota Madya	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua
Anggota Dewasa	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut
Anggota Ahli	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli
Anggota Purna	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli
Anggota Kehormatan	Mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP)

Sumber: <http://www.Keadilan.or.id>

**C. 2. Identitas Kader Partai Keadilan Sejahtera**

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell dalam "*Comparative Politics Today: A World View*" (1996), menjelaskan eksistensi partai memang sesuai dengan basis sosial yang menyokongnya, sehingga dinamika partai juga menggambarkan pergulatan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Namun Almond-Powell membedakan kelompok kepentingan (*interest group*) dengan partai politik (*political party*) walupun jarak perbedaannya tipis sekali.

Dalam Partai Keadilan Sejahtera tahapan-tahapan pembinaan berujuan untuk menciptakan individu-individu yang memiliki kapasitas baik secara individu atau bagian dari masyarakat, Ust. Ahmad Habib menjelaskan bahwa;

"...seorang kader PKS harus siap dengan tantangan yang akan dihadapi..dia harus mampu bertahan terhadap tantangan jaman tanpa kehilangan identitasnya..oleh itu dia harus berusaha mengkombinasikan antara tuntutan masyarakat, peran di masyarakat dengan



penguasaan prinsip-prinsip dakwahnya....semakin besar manfaat yang kita berikan kepada manusia itu semakin bagus..."(19-12-2006)

Kapasitas tersebut terbagi menjadi dua<sup>10</sup> yaitu pertama *Kapasitas Internal* meliputi **Kokoh dan Mandiri**. '*Kokoh*' adalah karakter kader yang memiliki kekuatan, kematangan dan kedewasaan secara *Ma'nawiyah, Fikriyah, Da'awiah dan Jasadiyah*. Sedangkan '*Mandiri*' adalah kader yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengembangan diri dan pembelajara secara mandiri (*Ta'alim dzaati*) dan Kemandirian dalam dimensi *Maaliah* (keuangan).

Indikator Kokoh Ma'nawiyah antara lain; Ikhlas dalam berdakwah, senantiasa memurnikan akidah dari bid'ah dan khurafat, qiyamul minimal 3 kali setiap pekan, puasa sunnah minimal 3 kali setiap hari, tilawah minimal 1 juz setiap hari, membaca ma'tsurat pagi dan sore seetiap hari, tadabbur Al Q!uran minimal satu ayat dalam sehari, sabar dalam menghadapi ujian hidup dan dakwah, senantiasa tawakal kepada Allah SWT dalam setiap situasi dan kondisi dan senantiasa berzikir. Indikator Kokoh Fikriyah antara lain; menguasai *mawad tarbiyah* dengan baik, mampu memahami tafsir dan ulumul Quran sesuai *mawad tarbiyah*, mampu memahami hadis dan ulumul hadis sesuai *mawad tarbiyah*, mampu berbahasa Arab dan Inggris, memiliki wawaasan tentang gerakan-gerakan destruktif, memiliki wawasan global.

Indikator Kokoh Da'wiyah adalah; berpartisipasi dalam rekruting *Hizb* (Partai) dan *tajnid Ikhwani*, aktif melakukan dakwah *fardiyah* (individu) di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, menjaga nilai-nilai da'wiyah dalam keluarga, memiliki skill rekayasa sosial da'awi, mampu membangun jaringan sosial dengan tokoh-tokoh sentral, *Istiqomah* di jalan dakwah. Indikator Kokoh

---

<sup>10</sup> DPP PKS Dewan Kadernisasi, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung. Syaamil. 2004

Jasadiyah adalah, menjaga penampilan, berolah raga minimal 20 menit setiap hari, melakukan general check-up minimal sekali setiap tahun, menjaga Kebersihan, mengikuti pola hidup sehat dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dan Indikator Kemandirian Keuangan adalah; bekerja dan berpenghasilan, mendirikan badan usaha meskipun kecil, melakukan investasi, menabung.

**Dinamis dan Kreatif.** Seorang kader harus memiliki perpaduan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. **Spesialis dan Berwawasa Global.** Seorang Kader memiliki kemampuan keilmuan dalam segala bidang, serta menguasainya secara profesional. Kemampuan yang didasarkan akan nilai – nilai keIslaman.

Sedangkan kapasitas kedua adalah *Kapasitas Eksternal*, meliputi **Murrobbi Produktif.** Seorang kader memiliki kemampuan membina dan mentransformasikan nilai-nilai tarbiyah kepada orang lain. **Beramal Jama'i.** Seorang kader mampu bekerjasama secara kolektif sehingga terbentuk tim yang tangguh untuk mencapai tujuan dakwah. **Pelopop Perubahan.** Seorang kader memiliki sikap mental yang ofensif, senantiasa berada di garda terdepan dalam merespon setiap perubahan positif yang terjadi di masyarakat serta berusaha meminimalisir kejuduman, status quo dan perubahan negatif. **Ketokohan Sosial.** Seorang kader adalah individu yang jujur dan kredibel baik secara moral maupun intelektual, sehingga dirinya menjadi rujukan publik dan menjadi tumpuan masyarakat untuk dimintai saran dan solusi atas permasalahan mereka.

Kapasitas yang dimiliki kader-kader PKS disertai dengan pemahaman akan arah serta tujuan yang menjadi arahan partai. Pemahaman ini disadari betul

oleh setiap kader yang berada pada tingkat atas sampai bawah, Ust. Ahmad Habib menjelaskan;

“..kita selalu menghendaki transformasi nilai dari yang atas sampai bawah, dari presiden partai sampai pendukung-pendukungnya paham tentang fikrohya..”

Kemudian beliau menambahkan;

“...kekuatan kita ada pada Fikroh atau Manhaj dalam memahami Islam itu sendiri..”(19-12-2006)

Pembinaan kader dalam Partai Keadilan Sejahtera harus berdasarkan atas empat faktor<sup>11</sup>, yaitu; *Al Fahmu ad Daqiq* (pemahaman yang luas), dimana seorang kader memahami Islam dengan pemahaman yang benar (*AL Fahmu as Shahih*), pemahaman yang menyeluruh (*Al Fahmu as Syamil*), dan pemahaman yang utuh (*AL Fahmu al Kamil*). Yang kedua *Al Iman Al Amiq* (keyakinan yang kuat), keyakinan yang kuat bahwa Islam satu-satunya sistem yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga *At Takwin Al Matin* (pembinaan yang kokoh) dimana proses pembinaan kader meliputi beberapa aspek yakni *Shibghah Fikriyah* (pembentukan fikrah), *Shibghoh Ruhiyah* (Pembentukan mental spiritual) dan *Shibghoh Harakiyah* (pembentukan Harakah). Yang terakhir adalah *Tarbiyah Mutawashilah* (tarbiyah yang berkesinambungan), pembinaan kader secara intensif (*tarbiyah murakazah*), komprehensif (*mutakamilah*) dan berjenjang (*mutadarajah*).

Pembinaan kader yang dikhususkan pada empat faktor bertujuan untuk mencetak kader-kader yang memiliki sifat; *Ubudiyah Khalishah Lillah* (semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah SWT), *Tajridus sair wal hadaf lillah* (mengarahkan perasaan dan tujuan hanya untuk Allah), *Rafdhusallut al*

<sup>11</sup> Abdul Muiz, MA dkk. *Tarbiyah Menjawab Tantangan*. Jakarta. Robbani Press. Cetakan ke-2. 2002

*jahiliyah* (menolak kekuasaan jahiliyah), *'Aisyul jidd ad-daadib* (selalu memilih hidup serius), *Tha'atul jama'ah wal qiyadah* (menaati jama'ah dan pemimpin) dan yang terakhir *Ats tsabat 'alay thariqi dakwah* (konsisten di jalan dakwah)<sup>12</sup>.

Identitas kader yang Inklusif yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan sosial yang ada tanpa terkontaminasi adalah tujuan asasi yang ingin dicapai oleh partai, Ust. Ahmad Hahib mengatakan;

“...kita itu harus inklusif tapi tidak larut..kita harus bisa hadir sebagai ta'mir masjid, sebagai seorang pengusaha bahkan ketika kita menjadi seorang PNS..biar orang lain yang menilai...”

Identitas tersebut kemudian menjadi landasan bagi kader-kader PKS dalam menjalankan aktifitasnya baik sebagai aktifis politik yang harus menjalankan kebijakan-kebijakan partai serta dalam berinteraksi dengan sesamanya sebagai bagian dari lingkungan sosialnya.

#### **D. Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera**

##### **D.1. Politik Dakwah**

Partai Keadilan Sejahtera –dulu Partai Keadilan- merupakan transformasi terakhir dari gerakan tarbiyah<sup>13</sup>, yang diawali dari gerakan keagamaan yang berbasiskan kampus sampai menjadi salah satu ‘bintang’ pada dua kali penyelenggaraan Pemilu pada era reformasi –tahun 1999 dan 2004. Keraguan akan konsistensi identitasnya sempat muncul, akan tetapi dengan konsistensi akan janji-janji politiknya dan kemampuan *imun* terhadap nilai-nilai diluarnya yang kuat –meskipun harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena tidak lolos *Electroal Treshold-*, mampu bertahan sebagai Partai politik baru yang

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> lihat Ali Said Damanik. *Fenomena Partai Keadilan*. Jakarta. Teraju. 2002. hal 213.

mampu bersaing dengan partai-partai tradisional –Golkar, PDI-P dan PPP, maupun partai lama dengan dengan wajah baru –PKB dan PAN.

Karakter politik unik PKS dibandingkan partai-partai lain didasarkan pada pemaknaan akan definisi politik mereka, Umar Sholahudin mengatakan;

“....definisi politik PKS sama dengan definisi politik yang definisikan oleh Hasan al Banna....”

Lebih lanjut;

“.....ketika seseorang atau sekelompok orang yang punya perhatian politik dan karena orang itu berkomitmen untuk menyelesaikan masalah umat...”(wawancara, 17 Desember 2006)

Dalam buku *Fiqih Syiasi*, Hasan al Banna mendefinisikan politik sebagai kegiatan penyelenggaraan persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Kegiatan internal politik adalah mengurus soal pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan, dan di kritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedang yang dimaksud dengan kegiatan eksternal politik adalah memelihara kemerdekaan kebebasan bangsa, mengantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkannya dalam posisi terhormat di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya. Baik kegiatan internal maupun eksternal politik, sama-sama mencakup ajakan kepada kebaikan, seruan berbuat ma'ruf dan pencegahan dari kezaliman, yang selama ini dianggap hanya merupakan wilayah kerja dakwah.

Secara operasional, paradigma dakwah adalah politik dan politik adalah dapat dipahami jika setiap umat Islam *pertama* memahami nilai-nilai universalitas ajarannya, *kedua* memahami aturan-aturan yang berlaku dan *ketiga* mengetahui cara merealisasikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajarannya.

Hasan al Banna kemudian menyimpulkan bahwa setiap orang Islam belum dikatakan sempurna keIslamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus.

Pemahaman yang berbeda dengan partai-partai lain kemudian teraplikasikan dalam kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan. PKS mencoba menggabungkan antara dakwah –penyampaian nilai-nilai keIslaman- dengan politik praktis, sehingga dakwah menjadi kegiatan politik atau politik menjadi kegiatan dakwah. Dakwah adalah politik apabila berperan memahamkan masyarakat kepada hak dan kewajiban mereka. Dan politik adalah dakwah jika berperan mengajak masyarakat berbuat baik, memfasilitasi berbuat ma'ruf (kebaikan) dan menutup pintu bagi masyarakat untuk berbuat zalim dan dizalimi.

Latar belakang PKS yang lahir dari embrio aktifitas dakwah kampus, kemudian menjadi gerakan ekstra kampus yang ditandai dengan berdirinya KAMMI sebagai salah satu gerbong yang menggerakkan reformasi sampai menjadi partai sangat mempengaruhi karakter politik dalam mencapai tujuannya.

Umar Sholahudin menjelaskan;

“....tujuan bagaimana dengan kita berpartai kan dulu kan hanya ekstra parlementer yang dari kampus trus melebar lagi ke ekstra kampus trus jadi partai sampai sekarang....tujuan ideal yang kita harapkan bagaimana kepemimpinan dakwah itu memimpin artinya dakwah itu bisa dijalankan dalam politik kenegaraan....”

Konsistensi akan tujuan politik –bahkan jauh-jauh hari sebelum menjadi partai- masih mampu dipertahankan PKS. Orientasi pada penyampaian nilai-nilai Islam yang bertujuan menciptakan pemahaman yang integral dan komprehensif terhadap ajaran Islam begitu kental mewarnai aktifitas politik PKS, yang kemudian mempengaruhi cara berpolitik mereka.

PKS memiliki cara berbeda dalam mengimplementasikan politik dakwahnya. Mereka mengedepankan pelayanan bagi masyarakat ketimbang bersifat pragmatis seperti definisi Harold Laswell bahwa politik hanya seputar siapa mendapatkan apa, seberapa, bagaimana dan kapan. Sedangkan konsep politik dalam Islam –dalam konteks pemahaman PKS- yang lebih menitik beratkan pada perhatian urusan dan kepentingan ummat.

Dalam hal ini Umar Sholahudin mengatakan;

“.....dalam PKS politik adalah pelayanan. Artinya apa yang dilakukan PKS itu dalam rangka melayani..”

Lebih lanjut beliau menjelaskan;

“...adanya partai atau tidak adanya partai semangat memberi atau melayani itu tetap di laksanakan. Apalagi sudah menjadi partai sebagai alat perjuangan untuk lebih mengintensifkan misi dakwahnya di parlemen. Sebenarnya tidak ada partai pun pos pelayanan kesehatan, pendidikan seperti baksos tetap jalan terus...tanpa partai pun tetap jalan terus..dalam konteks dakwah adanya partai atau tidak adanya partai, dakwah tetap jalan terus...” (wawancara, 17-12-2006)

Sedangkan Ust. Ahmad Habib memberikan penjelasan;

“...partai itu hanya baju perjuangan...kita bisa berubah menjadi pk, pks atau ketika berubah lagi menjadi yang lainnya, itu tidak masalah...yang penting identitas kadernya tidak hilang..”(19-12-2006)

Bentuk pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengiriman tim evakuasi pada bencana alam, seperti tsunami di Aceh dan Pangandaran, gempa bumi di Jogja, lonsor di Jember, banjir di Trenggalek dan masih banyak lagi. Selain kegiatan-kegiatan yang rutin seperti Baksos pelayanan kesehatan, pelatihan-pelatihan wiraswasta, pembinaan keluarga dan beberapa kegiatan serupa lainnya. Momentum Ramadhan dan Idul Fitri tidak lepas dari aktifitas pelayanan dengan mendirikan posko mudik lebaran –beberapa tahun ini mulai ditiru oleh partai-partai politik lainnya meskipun hanya formalitas- di tempat-tempat strategis seperti terminal atau stasiun kereta api.

## **D. 2. Syariat Islam yang ber-Keadilan**

Fenomena parta-partai politik Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam. Diawali pada awal masa kolonial Belanda oleh Serikat Dagang Islam kemudian Masyumi yang membawa wacana mendirikan negara Islam. Terlepas dari perpecahan serta konflik internal yang menyebabkan eksistensi gerakan tersebut kemudian melemah. Cita-cita pendirian negara Islam kemudian mulai pudar seiring kondisi relitas masyarakat yang belum mampu menerimanya sehingga perjuangan yang mengarah pada penerapan syariat Islam menjadi pilihan terakhir. Partai-partai Islam yang tumbuh pada era Reformasi kembali menyuarakan wacana untuk menerapkan syariat Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menjadi sebuah fenomena yang menarik ketika partai yang berazaskan Islam 'tidak bersemangat' dalam kampanyenya untuk penerapan syariat Islam secara formal. Sebagai salah satu partai yang mengusung azas Islam sebagai landasan aktifitasnya, PKS tidak menyebutkan klausul-klausul yang menyangkut penerapan syariah Islam baik dalam visi misinya maupun wacana-wacana yang dikeluarkannya. 'Politik pintu belakang' merupakan wacana yang kemudian keluar ketika melihat fenomena PKS yang secara 'malu-malu' tidak tertarik untuk memperjuangkan penerapan Islam formal. Kesimpulan yang bersifat generalisasi dan mengambang tersebut dibantah oleh Untung Wahono –Ketua Fraksi PKS di DPR-RI- yang menyatakan bahwa PKS tidak mengenal istilah 'Politik pintu belakang'. Catatan sejarah membuktikan bahwa PKS tidak pernah mengajukan



usul tentang penerapan syariat Islam di Indonesia. Sebaliknya PKS mengusulkan penggunaan Piagam Madinah menggantikan Piagam Jakarta<sup>14</sup>.

Hal ini senada dengan penjelasan Umar Sholahudin yang mengatakan;

“...itu pilihan-pilihan politik strategis dalam dakwah...PKS itu melihat konteks masyarakat. Bagaimanapun masyarakat bisa menerima hukum Allah secara sadar dan tidak ada unsur paksaan..PKS tidak mempunyai obsesi terlalu tinggi apalagi dijadikan alat-alat kampanye, propaganda partai, ingin mendirikan negara Islam...semangat untuk diterima publik bagaimana kepemimpinan dakwah itu memimpin artinya nilai-nilai dakwah bisa mewarnai kehidupan kenegaraan, tidak harus memakai formalitas agama...” (wawancara, 17-12-2006)

Pemilihan wacana penerapan syariat Islam dalam strategi politik yang ditawarkan partai-partai Islam seperti PPP dan PBB terbukti belum dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Selain adanya ketakutan-ketakutan akan penerapan hukum Islam yang ketat -merujuk kepada tipologi Geertz yang membagi Islam di Indonesia dalam tiga kategori; *Santri, Abangan, dan Priyayi*- mayoritas masih tergolong abangan yang pemahaman keislamannya masih sederhana serta tercampur dengan nilai-nilai tradisi dan budaya -sinkritisme.

Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan Sejahtera -pada waktu itu masih Partai Keadilan (PK), lebih mengedepankan isu-isu keagamaan. Karakter eksklusif terlihat dari identitas politik yang ditawarkan. Akan tetapi isu tersebut ternyata tidak dapat mengontrol posisi PK, sehingga hanya mendapatkan 1,36 persen suara, yang menyebabkan PK tidak lolos Elektorat Threshold sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu selanjutnya. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Umar Sholahudin;

“...dulu tahun 1999 PKS dikampanyekan sebagai partai Islam..itu sangat eksklusif, slogan partai “*Berbuat adillah karena adil itu mendekati takwa*”. Itu cenderung kurang marketibel dalam meraup massa..kita tidak harus menjual ayat-ayat al quran itu masyarakat kebanyakan apriori tuduhan-tuduhan misalnya ekstrim terutama menderikan negara Islam itu akan muncul...”(wawancara 17-12-2006)

<sup>14</sup> Untung Wahono. *Piagam Jakarta dan Piagam Madinah*. Kompas.. 30 September 2004

Hal serupa juga dialami oleh partai-partai Islam lainnya seperti PBB dan PPP serta partai berbasis Islam seperti PAN yang pencapaian kursinya tidak cukup signifikan, meskipun mereka relatif berhasil lolos dari batas minimum Elechtroal Treshold 2%. Sedangkan PKB dengan basis massa kalangan NU mendapatkan suara yang sangat signifikan, lengkapnya lihat tabel;

Tabel  
 Perolehan Suara Lima Partai Islam dan Basis Islam dalam Pemilu 1999.

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara	Prosentase
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,62%
2	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,72%
3	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12%
4	Partai Bulan Bintang	2.049.708	1,94%
5	Partai Keadilan	1.436.565	1,36%

Sumber: Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, Teraju, Jakarta, 2002

Strategi politik yang eksklusif dengan menonjolkan identitas keislaman yang sangat formal kemudian mengalami perubahan ketika PK yang kemudian bertransformasi menjadi PKS pada Pemilu tahun 2004. PKS kemudian merubah image dari partai Islam eksklusif menjadi partai Islam yang lebih substansial dengan mewarkan kesan aplikasi dari pemahaman agama. Hal dijelaskan oleh Umar Sholahudin;

“...tahun 2004 tidak lagi menjual ayat-ayat Al quran atau jargon-jargon wacana-wacana yang berkaitan dengan Islam...kita mengangkat tema-tema Islam yang lebih substansial misalnya jargon *“Bersih dan Peduli”*...” (17-12-2006)

Jargon "*Bersih dan Peduli*" yang terimplementasikan dengan gerakan anti Korupsi, bantuan-bantuan bencana alam serta serta calon-calon Legislatif yang terpercaya dan memiliki track record baik mampu mengatrol perolehan suara sampai 7,34% dan menjadikan PKS sebagai salah satu partai baru –meskipun muncul dengan wajah baru-yang menjadi pemenang "sesungguhnya" bersama Partai Demokrat pada Pemilu 2004.

Hal tersebut tampaknya tidak disadari oleh partai-partai Islam lainnya, seperti PPP dan PBB yang masih mempertahankan karakter eksklusifnya. Malah PBB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan dan hanya memperoleh 2,62% suara. Sedangkan PAN tidak mampu mempertahankan konsistensinya terhadap basis massanya –kelompok Muhammadiyah- yang disinyalir mengalihkan suaranya kepada partai lain. Hal yang sama juga dialami PKB yang mulai ditinggalkan warga NU karena ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakannya, meskipun masih mendapatkan suara yang cukup signifikan. Lebih lengkapnya lihat tabel

Tabel

Perolehan Suara Lima Partai Islam dan Basis Massa Islam Pada Pemilu 2004

No	Nama Parpol	Perolehan Suara	Prosentase
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%
2	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34%
4	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44%
5	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PKS melihat wacana penerapan syariat Islam secara formal di Indonesia bukan merupakan tujuan akhir yang diusung, akan tetapi lebih pada substansi atau penerapan nilai – nilai keIslaman dalam kehidupan bernegara. Kampanye anti korupsi serta keadilan terhadap kepentingan ‘wong cilik’ merupakan agenda yang lebih mendasar dari pada menawarkan penerapan syariat secara formall.

Pemahaman yang lebih komprehensif menurut pandangan para kader PKS tentang syariat Islam yang ber-Keadilan dengan mampu memberikan ketenangan, keamanan, keadilan dan jauh dari kemungkinan-kemungkinan diskriminasi.

Umar Sholahudin mengungkapkan;

“...ketika PKS akan memimpin semuanya itu akan Islam, itu tidak. Dia akan mengacu pada konsep Rasulullah dalam memimpin negara juga memperhatikan adanya hak-hak bagi orang-orang non Islam..” ( wawancara, 17-12-2006)

Mengedepankan perilaku bersih dan peduli sebagaimana semboyan kampanyenya. Upaya mendorong pertumbuhan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia adalah contoh manifestasi dari konsep Keadilan yang dijabarkan lebih detail dalam tataran praktis. Mengedepankan penerapan ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan dalam lingkungan sendiri –pribadi dan keluarga-dengan baik, baru kemudian diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut tergambara dalam Platform partai yang mengedepankan dakwa sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan dan menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> DPP PKS, *Menyelematkan Bangsa, Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta. Al I'tishom Cahaya Umat. 2004

Mengutip pernyataan mantan ketua DPW PKS Jawa Timur periode 1999-2004 Rofi Munawar yang sekarang merupakan anggota DPRD I Jawa Timur

“Kita tidak ingin penerapan syariat Islam itu hanya sebuah komoditas politik saja karena kita jumpai pada saat yang sama sebuah partai lantang meneriakkan syariat Islam tetapi di dalam tubuh partai itu syariat Islam serng dilecehkan. Itu tidak kita inginkan<sup>16</sup>.

Sementara tentang penerapan syariat Islam dijelaskan:

“..syariat Islam itu adalah syariat yang menjadi rahmat bagi siapa saja termasuk bagi non-Muslim. Kalau syariat Islam yang digemborkan itu isinya adalah hukum rajam dan potong tangan yang menjadi ketakutan bagi non-Muslim, saya khawatir ada sebuah proses pembahasan yang salah. Memang betul *hudud*<sup>17</sup> adalah bagian dari syariat Islam, tetapi pola pendistribusia ekonomi antara si kaya dan si miskin pun bagian syariat Islam. Akan tetapi sekarang yang dimunculkan adalah masalah hukumnya, sedangkan usaha mendorong si kaya agar rajin berinfak dan si miskin tidak lagi meminta-minta, kurang. Jika ini yang dilakukan, tentu tidak ada yang mencuri dan secara otomatis tidak perlu ada hukuman itu.<sup>18</sup>

Penerapan Islam secara substansial bukan takaran formalitas menjadi arahan yang merupakan hasil dari ijtihad para tokoh-tokoh PKS yang menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan partai serta realitas sosial yang ada di masyarakat. Belajar dari sejarah pergerakan Islam sebelumnya yang merupakan pengalaman yang menjadikannya sebagai pembelajaran akan pentingnya strategi yang tepat serta kekuatan untuk tetap *Isthiqomah* dalam menjaga Identitas partai.

---

<sup>16</sup> Dikutip dari wawancara Rofi Munawar dengan Yon Mahmudi. *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung. 2005

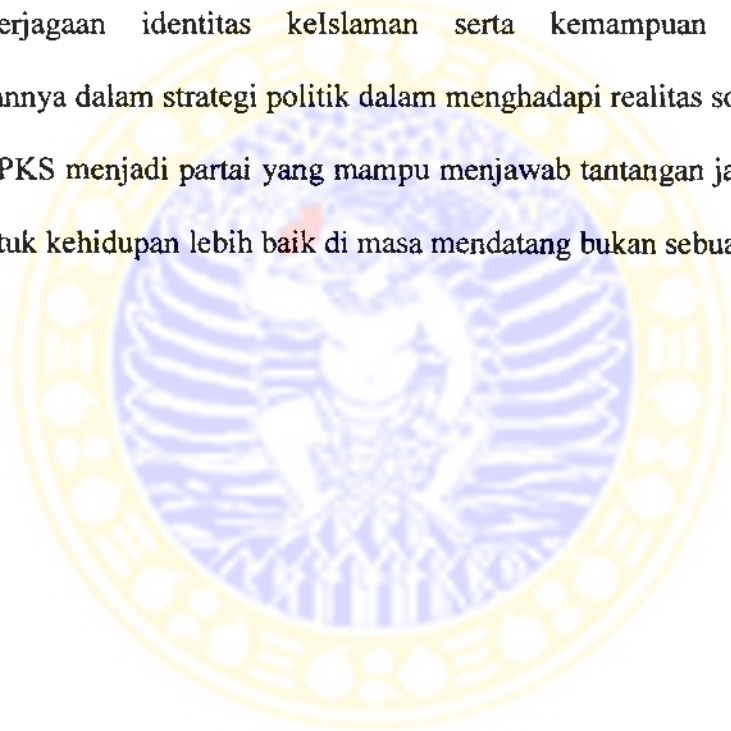
<sup>17</sup> Hukum-hukum Islam yang membahas hukuman bagi kejahatan, misalnya hukum Razam bagi pejina.

<sup>18</sup> *ibid*

Pemahaman syariat Islam yang bersifat humanis ini tidak lantas menghilangkan nilai-nilai identitas partai yang sifatnya prinsipil. Pada nilai-nilai yang bersifat mutlak PKS akan menjaga jarak sehingga orisinalitas identitas Islam mereka tidak terkontaminasi sehingga tujuan yang sebenarnya dapat tercapai, Umar Sholahudin menjelaskan;

“...sesuatu yang mencakup hal-hal prinsipil itu tidak akan berubah sampai tujuan, kaitannya dengan hal yang tidak prinsipil dan karenanya bisa ditoleransi bisa dilakukan..kalo dalam Islam hal-hal yang menyangkut masalah akidah itu tidak berubah, tapi bagaimana mendakwahkan Islam ke orang itu sesuatu yang tidak prinsipil setiap orang punya strategi dalam menjalankan...” (wawancara, 17-12-2006)

Keterjagaan identitas keislaman serta kemampuan PKS dalam menjabarkannya dalam strategi politik dalam menghadapi realitas sosial yang ada, membawa PKS menjadi partai yang mampu menjawab tantangan jaman sehingga harapan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang bukan sebuah impian.



## **BAB V**

### **Kesimpulan**

#### **Berinteraksi tanpa Terkontaminasi**

##### **A. Kesimpulan**

Perlawanan Identitas yang dilakukan oleh PKS terhadap nilai-nilai modernisasi diwujudkan dalam dua aspek, aspek internal dan aspek eksternal. Aspek Internal berupa pembinaan kader dengan mentransformasikan nilai-nilai Islam yang telah diformulasikan oleh PKS. Pembinaan kader diharapkan dapat memperkuat kondisi internal partai sehingga menjadi pondasi aktifitas partai dalam upaya untuk memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai.

Pembinaan kader di PKS dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kader tanpa melihat jenjang keanggotaannya. Pembinaan yang dimulai dari pembentukan pribadi muslim, kemudian menciptakan keluarga-keluarga yang Islami. Dengan banyaknya keluarga-keluarga yang islami terbentuk masyarakat yang terwarnai oleh nilai-nilai keIslam, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang kuat. Dengan adanya pemerintahan Islam yang kuat mampu mendorong negara-negara Islam lainnya menjalin komunikasi sehingga tercipta kesatuan Islam yang menyeluruh di Dunia.

Pembinaan kader di PKS didasarkan pada nilai-nilai kealaman yang telah disistematisasikan sehingga dapat dipahami secara substansi dan mampu diterapkan dalam aktifitas kader. Tema-tema yang disederhanakan diharapkan mampu membangun pemahaman secara integral bagi setiap kader. Menjahui sifat eksklusif agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial menjadi Identitas kader PKS.

Aspek kedua berupa aspek Eksternal berupa perwujudan-perwujudan atau implementasi nilai-nilai identitas partai dalam bentuk kebijakan-kebijakan politiknya. PKS tidak dapat melepaskan diri dari realitas politik yang ada, seperti sistem politik demokrasi. PKS tidak berusaha mempertentangkan nilai-nilai identitas keIslaman yang menjadi landasan pokok partai dengan sistem demokrasi. PKS melihat adanya peluang untuk mencoba mengaplikasikan nilai-nilai identitas keIslamannya dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem demokrasi tentu dalam batasan-batasan tertentu.

Dua aspek tersebut saling berhubungan, dimana pada proses kebijakan-kebijakan yang diambil partai juga melibatkan bentuk pembinaan kader. Gambaran akan kebijakan-kebijakan partai menggambarkan kapasitas yang dimiliki kader-kader PKS. PKS ingin mengaktualisasikan Islam bukan pada takaran formalitas akan tetapi lebih pada takaran substansionalnya, dan itu merupakan bentuk perlawanan Identitas yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

### **B. Saran**

Modernisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh seluruh manusia. Dunia yang kalang kabut (*Runaway World*) tidak lepas dari ulah manusia sendiri sehingga tidak pantas kalau kita saling menyalahkan. Optimistis dengan terus berusaha melakukan perbaikan dan memberikan jalan keluar yang solutif dan tentu saja aplikatif lebih dibutuhkan dibandingkan sekedar berdebat dan berwacana.

PKS memberikan "sedikit" bukti atas permasalahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Dengan menawarkan Identitas Islam baru --meskipun tidak ada istilah Islam baru dalam terminologi Islam sendiri- memberikan kontribusi yang



signifikan. Dengan "membangkitkan bahasa langit" PKS berusaha melawan nilai-nilai identitas baru yang dibawa oleh arus modernisasi. Tanpa menghilangkan nilai-nilai identitasnya, PKS berusaha untuk berinteraksi dengan identitas-identitas tersebut. *Nakhtalitu walakin Natamayyazu* (Berinteraksi tanpa Terkontaminasi) merupakan prinsip pokok yang selalu digunakan.

Perlawanan Identitas yang dilakukan PKS tidak hanya pada aspek-aspek pembinaan atau politik akan tetapi juga mencakup semua aspek seperti ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya, karena perlawanan ini menyangkut wacana modernisasi yang "menyerang" segala identitas yang ada. Karena keterbatasan kemampuan, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara utuh perlawanan Identitas yang dilakukan oleh PKS, dan hanya menggambarkan sebagian bentuk perlawanannya.

Harapan kedepan adanya penelitian yang serupa dengan menitik beratkan pada aspek-aspek diluar sistem pembinaan dan strategi politik PKS, sehingga mampu menggambarkan bentuk identitas Partai Keadilan Sejahtera secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Banna, Hasan. *Memoar Hasan Al Banna*. Solo; Era Media, 2004
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Pustaka Antara, Jakarta:1999
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- bin Ali Jabir bin Muhammad, Hussain. MA, *Menuju Jama'atul Muslimin*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah pengantar dalam* Miriam Budiarjo (Peny.), *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Gramedia, 1982
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern Dari Parsons sampai Habermas*, Rajawali Press, Jakarta, 1994
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta:TERAJU, 2002
- Dekmejian, R. Hrair, *Kebangkitan Islam : Katalisator, Kategori dan Konsekuensi dalam* Hunter, Shireen T., *Politik Kebangkitan Islam (terj)*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2001
- Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Syaamil, 2004.
- DPP PKS, *Menyelematkan Bangsa, Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat. 2004
- DPP PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Syaamil. 2004

- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan (terj)*,  
Yogyakarta : Bina Aksara
- Edward, Djony. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung;  
Harakatuna, 2006.
- Esposito, John L, *Islam Kontemporer : Reformasi atau Revolusi ?*, Bandung :  
Mizam, 1995
- Furkon, Aay Muhamad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik  
Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta:TERAJU, 2004.
- Goodman, Douglas J. dan George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern , Edisi ke-6*,  
Jakarta: Kencana, 2004
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar, 2004
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.1997
- Machmudi, Yon. *Partai Keadilan Sejahtera “ Wajah Baru Islam Politik  
Indonesia “*. Bandung; Harakatuna, 2005.
- Macridis, Roy C., *Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai*, dalam  
Ikhlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Yogyakarta : Tiara  
Wacana, edisi revisi 1996
- Matta, Anis, *Dari Gerakan ke Negara: Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah  
yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan*, Jakarta: Fitrah  
Rabbani, 2006.
- Muiz, Abdul .MA dkk. *Tarbiyah Menjawab Tantangan*. Jakarta. Robbani Press.  
Cetakan ke-2. 2002

- Poloma. Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21: Sebuah Catatan Akhir Abad; Evaluasi Perjalanan Umat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Sani, Drs. Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam* . Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1998
- Schoorl, Prof. Dr. J. W. *Modernisasi “ Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta; Gramedia, 1991.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi (Edisi kedua)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Thomas F. Odea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan awal*. Jakarta: PT. Rajawali Press. Cetakan ke empat. 1992
- Turner, Bryan. *Teori – Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. Yogyakarta; PustakaPelajar, 2000.
- Waluyo, Spto. *Kebangkitan Politik Dakwah “ Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi”*. Bandung; Harakatuna, 2005

## Skripsi

Novri Susan, *Konflik dalam Perspektif sosiologi Pengetahuan: Konflik Agama Masyarakat Ambon Maluku sebagai Konstruksi Sosial*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

Nugroho, Arif Budi, *Gerakan Islam di Indonesia pada Era dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Gerakan Tarbiyah Indonesia di Surabaya*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

Rosyadi, M. Arwan. *Tafsir Sosial Jihad "Studi tentang Konstruksi Sosial Jihad Gerakan Islam pada Masa Nabi Muhammad dan Masa Kontemporer di Indonesia (Muhammadiyah, NU, PKS, dan MMI"*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.



## Rancangan Instrumen Wawancara

Isu	Dimensi	Pertanyaan operasional	indikator	Informan kunci	Data sekunder
Gambaran umum organisasi	Sejarah organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kapan organisasi berdiri</li> <li>2. tokoh pendiri</li> <li>3. latar belakang berdirinya organisasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun berdiri.</li> <li>• Gambaran orang-orang yang mempelopori pendirian organisasi.</li> <li>• Faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya organisasi.</li> </ul>	Ketua, dewan penasehat, ketua-ketua bidang dll atau elit partai	Profil gerakan Susunan pengurus LPJ
Karakteristik organisasi	Nilai dan identitas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa nilai dan identitas yang diperjuangkan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang nilai dan identitas yang diperjuangkan</li> </ul>	idem	AD – ART organisasi
	Strategi program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana strategi pergerakannya ?</li> <li>2. Apa saja program-programnya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang strategi pengimplementasian nilai dan identitas yang diperjuangkan dalam masyarakat</li> <li>• Gambaran tentang program-programnya</li> </ul>	idem	Program kerja organisasi
	Pengaruh Pemikiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemikiran – pemikiran atau gerakan – gerakan apa saja yang mempengaruhi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang pengaruh pemikiran – pemikiran atau gerakan – gerakan yang dijadikan rujukan</li> </ul>	idem	

Modernisasi Politik	Sistem Politik Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan terhadap sistem demokrasi</li> <li>2. Strategi politik yang diambil organisasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran organisasi terhadap sistem demokrasi</li> <li>• Gambaran strategi politik yang diambil</li> </ul>	idem	
	Hubungan dengan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hubungan dengan pemerintah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang hubungan dengan negara/pemerintah</li> </ul>	idem	
Perlawanan Identitas	Kadernisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pola rekrutmen kader ?</li> <li>2. Bagaimana pengelolaan serta pembinaannya?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang pola rekrutmen kader</li> <li>• Gambaran tentang pengelolaan serta pembinaan kader</li> </ul>	Ketua, dewan penasehat dan ketua bidang kadernisasi / anggota.	
	Syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan terhadap pembentukan negara Islam</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran tentang konsep sampai upaya implementasinya</li> </ul>	Ketua, dewan penasehat dan ketua bidang PolHuKam / anggota.	



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JL. DHARMAWANGSA DALAM SURABAYA 60286 TELP. (031) 5034015, 5011744, 5047754, Fax (031) 5012442  
website : <http://www.fisip.unair.ac.id> e-mail : [fisip@unair.ac.id](mailto:fisip@unair.ac.id)

No. : 397 /J03.1.13/PP/2006  
Hal : Ijin Penelitian

Surabaya, 17 Nopember 2006.

Kepada Yth,  
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Keadilan Sejahtera  
Jawa Timur

Dengan ini kami beritahukan, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu mengadakan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Saudara agar berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami

N a m a : Triono Wahyu Santoso  
NPM : 070116517  
Prodi : Sosiologi.  
Judul Penelitian : Perlawanan Identitas  
Lokasi : Surabaya.  
Waktu : 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal surat dikeluarkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya,  
Mengetahui / Menyetujui







**SURAT IJIN**  
**NOMOR : 33/D/IJN/DPW-PKS/1427**

1. Diberikan Kepada :  
Nama : Triono Wahyu Santoso  
NPM : 070116517  
Prodi : Sosiologi  
Judul Penelitian : Perlawanan Identitas  
Lokasi : Surabaya
2. Untuk : Melaksanakan tugas wawancara dengan Bidang Kaderisasi dan Bidang Polhukam Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur
3. Ketentuan Lain : Agar dilaksanakan dengan baik dan menjaga kepatutan Yang ada di dalam lingkungan DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur

Surabaya, 02 Dzulqo'idah 1427 H  
24 Nopember 2006 M

DEWAN PENGURUS WILAYAH  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
JAWA TIMUR



Agus Hari Setiawan. ST, MT.  
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jatim
2. Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Jatim